



Katalog BPS: 3305005



2013

# INDIKATOR PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN HIDUP



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
*Statistics Indonesia*



**INDIKATOR  
PERILAKU PEDULI  
LINGKUNGAN HIDUP**

**2013**

<http://www.bpt.go.id>

# INDIKATOR PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN HIDUP 2013

ISBN : 978-979-064-657-5

Nomor Publikasi : 04320.1304

Katalog BPS : 3305005

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xii + 149 halaman

Naskah :

Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup

Penyunting :

Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup

Gambar Kulit :

Sub Direktorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak Oleh :

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

## KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2013 merupakan hasil Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH) 2013. Indikator perilaku yang disajikan adalah perilaku kepedulian rumah tangga terhadap kondisi lingkungan. Indikator perilaku peduli lingkungan hidup terbagi dalam indikator perilaku rumah tangga terkait fasilitas tempat tinggal, pemanfaatan energi, pemanfaatan air, penggunaan transportasi, pengelolaan sampah, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, baik untuk bahan perencanaan, monitoring maupun bahan evaluasi program pembangunan yang dilaksanakan khususnya di bidang lingkungan hidup. Beberapa indikator dalam publikasi ini juga mencerminkan implementasi dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah seperti dalam hal penghematan energi listrik dan penghematan air.

Disadari sepenuhnya bahwa penyajian publikasi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan publikasi yang akan datang. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan tinggi dan terima kasih.

Jakarta, Desember 2013  
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Grafik .....	xi
Bab I Latar Belakang, Tujuan, dan Metode Survei .....	1
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Metode Survei .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
Bab II Pengetahuan Terkait Perilaku Peduli Lingkungan Hidup .....	7
2.1. Pengetahuan Perilaku Peduli Lingkungan Hidup .....	9
2.2. Sumber Informasi Terkait Lingkungan Hidup .....	12
2.3. Penyuluhan/Pelatihan Terkait Lingkungan Hidup.....	13
Bab III Perilaku Peduli Lingkungan Hidup Rumah Tangga.....	23
3.1. Fasilitas Tempat Tinggal .....	25
3.2. Pemanfaatan Energi .....	35
3.2.1. Pemanfaatan Energi Listrik .....	35
3.2.2. Penggunaan Bahan Bakar Memasak .....	41
3.3 Pemanfaatan Air .....	55
3.4 Penggunaan Transportasi .....	81
3.5 Pengelolaan Sampah .....	100
3.5.1 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga .....	100
3.5.2 Perilaku Membuang Sampah.....	106
3.6 Peduli Lingkungan Sekitar .....	116
3.6.1 Perilaku Merokok .....	116
3.6.2 Kerja Bakti.....	119
3.6.3 Pencemaran Lingkungan .....	120

Daftar Pustaka .....	129
Lampiran.....	131
Lampiran 1 Relative Standard Error (RSE).....	133
Lampiran 2 Kuesioner SPPLH 2013.....	144

<http://www.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persentase Responden yang Memiliki Pengetahuan Perilaku Peduli Lingkungan Hidup Menurut Jenis Pengetahuan dan Daerah Tempat Tinggal.....	10
Tabel 2.2	Persentase Responden yang Memiliki Pengetahuan Peduli Lingkungan Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Pengetahuan .....	15
Tabel 2.3	Persentase Responden Menurut Provinsi dan Sumber Informasi Terkait Lingkungan Hidup .....	18
Tabel 2.4	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Keikutsertaan dalam Penyuluhan/Pelatihan Lingkungan Hidup Selama Tiga Tahun Terakhir.....	20
Tabel 2.5	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Mengikuti Penyuluhan/Pelatihan Lingkungan Hidup Selama Tiga Tahun Terakhir Menurut Jenis Penyuluhan/Pelatihan Lingkungan Hidup .....	21
Tabel 3.1.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal.....	26
Tabel 3.1.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, dan Ketersediaan Area Terbuka .....	30
Tabel 3.1.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Pemanfaatan Cahaya Matahari untuk Penerangan Ruangan .....	33
Tabel 3.1.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Tanaman Keras/Tahunan di Pekarangan Rumah.....	34
Tabel 3.2.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kepemilikan Alat Elektronik dan Perilaku Membiarkan Alat Elektronik Tetap Menyala Meski Tidak Digunakan .....	38
Tabel 3.2.2	Emisi CO <sub>2</sub> yang Dihasilkan Setiap Penggunaan Alat Elektronik Selama 1 Jam Menurut Jenis Alat Elektronik .....	39
Tabel 3.2.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama dan Bahan Bakar Cadangan Memasak yang Digunakan .....	42
Tabel 3.2.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Utama ..	44
Tabel 3.2.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Lampu Hemat Energi yang Terpasang di Rumah .....	45
Tabel 3.2.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Lampu yang Menyala pada Siang Hari.....	46
Tabel 3.2.7	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Alat Elektronik Menurut Provinsi dan Jenis Alat Elektronik.....	47

Tabel 3.2.8	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Alat Elektronik dan Mempunyai Perilaku Kadang-kadang/ Sering Membiarkan Alat Elektronik Tetap Menyala Meski Tidak Digunakan Menurut Provinsi dan Jenis Alat Elektronik .....	49
Tabel 3.2.9	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki AC Menurut Provinsi dan Perilaku Menyalakan AC Dibawah 25°C .....	51
Tabel 3.2.10	Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Pemakaian Listrik Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Listrik .....	52
Tabel 3.2.11	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Kegiatan Memasak, dan Bahan Bakar Utama Memasak yang Digunakan.....	53
Tabel 3.2.12	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perilaku Menutup Panci Ketika Memasak.....	54
Tabel 3.3.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Keperluan Sehari-hari Rumah Tangga.....	56
Tabel 3.3.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum .....	65
Tabel 3.3.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Memasak.....	67
Tabel 3.3.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Mandi .....	69
Tabel 3.3.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Cuci Baju .....	71
Tabel 3.3.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Area Resapan Air .....	73
Tabel 3.3.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Keberadaan Instalasi Air di Dalam Rumah dan Perilaku Membiarkan Air Kran Mengalir Meski Sedang Tidak Digunakan .....	74
Tabel 3.3.8	Persentase Rumah Tangga Menurut Alat/Cara Membilas Cucian Pakaian .....	75
Tabel 3.3.9	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Cara Penggunaan Air Untuk Mencuci Alat Makan/Minum dan Sayuran/Buah.....	76
Tabel 3.3.10	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kebiasaan Memanfaatkan Air Bekas untuk Keperluan Lain.....	77
Tabel 3.3.11	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Alat yang Digunakan Untuk Mandi.....	78
Tabel 3.3.12	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Fasilitas Sistem Penyiraman <i>Flush</i> pada Toilet yang Digunakan .....	79
Tabel 3.3.13	Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Pemakaian Air Selama Setahun Terakhir dan Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Air.....	80

Tabel 3.4.1	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Bekerja dan Sekolah Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Alat Transportasi yang Digunakan.....	85
Tabel 3.4.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kendaraan Bermotor .....	90
Tabel 3.4.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sepeda Motor Menurut Provinsi dan Cara Penggunaan Sepeda Motor yang Lebih Sering Dilakukan Selama Sebulan Terakhir.....	91
Tabel 3.4.4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Mobil Menurut Provinsi dan Cara Penggunaan Mobil yang Lebih Sering Dilakukan Selama Sebulan Terakhir.....	92
Tabel 3.4.5	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Alat Transportasi yang Digunakan untuk Menunjang Kegiatan Bekerja .....	93
Tabel 3.4.6	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Alat Transportasi yang Digunakan untuk Menunjang Kegiatan Sekolah .....	94
Tabel 3.4.7	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Kendaraan Pribadi Menurut Jenis Kendaraan dan Bahan Bakar yang Digunakan.....	95
Tabel 3.4.8	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Kendaraan Bermotor dan Merawat Mesin Kendaraannya Secara Rutin Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan Bermotor .....	97
Tabel 3.4.9	Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi Menurut Provinsi dan Jenis Usaha yang Dilakukan.....	98
Tabel 3.4.10	Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi Menurut Provinsi dan Alasan Utama Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor .....	99
Tabel 3.5.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perlakuan Terhadap Sampah.....	109
Tabel 3.5.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perlakuan Utama Terhadap Sampah .....	110
Tabel 3.5.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perlakuan Memilah Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk.....	111
Tabel 3.5.4	Persentase Rumah Tangga yang Tidak Melakukan Pemilahan Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk Menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Melakukan Pemilahan Sampah.....	112
Tabel 3.5.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perlakuan Terhadap Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	113

Tabel 3.5.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perlakuan Utama Terhadap Barang Bekas Layak Pakai.....	114
Tabel 3.5.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Frekuensi Membawa Tas Belanja Sendiri Ketika Berbelanja.....	115
Tabel 3.6.1	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Merokok Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal .....	122
Tabel 3.6.2	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Merokok Menurut Provinsi dan Kelompok Umur .....	123
Tabel 3.6.3	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Merokok Menurut Provinsi dan Jenis Rokok yang Dikonsumsi Selama Seminggu yang Lalu .....	124
Tabel 3.6.4	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Merokok Menurut Provinsi dan Jumlah Rokok yang Dikonsumsi Selama Seminggu yang Lalu .....	125
Tabel 3.6.5	Persentase Rumah Tangga yang Ada Kegiatan Kerja Bakti di Sekitar Lingkungan Rumah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal .....	126
Tabel 3.6.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kejadian Gangguan Kondisi/Kualitas Lingkungan .....	127
Tabel 3.6.7	Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Kondisi/Kualitas Lingkungan Menurut Provinsi dan Upaya untuk Menanggulangi Gangguan Lingkungan .....	128

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase Responden Menurut Skor Pengetahuan Perilaku Peduli Lingkungan dan Daerah Tempat Tinggal .....	11
Grafik 2.2	Persentase Responden Menurut Sumber Informasi Terkait Lingkungan Hidup ...	12
Grafik 2.3	Persentase Responden yang Pernah Mengikuti Penyuluhan/Pelatihan Terkait Lingkungan Hidup Selama Tiga Tahun Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal .....	14
Grafik 3.1.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Area Resapan Air Menurut Provinsi ...	28
Grafik 3.2.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Banyaknya Lampu Hemat Energi yang Terpasang di Rumah dan Daerah Tempat Tinggal.....	37
Grafik 3.2.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Listrik.....	40
Grafik 3.3.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Area Resapan dan Daerah Tempat Tinggal .....	57
Grafik 3.3.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Area Resapan Air Menurut Jenis Area Resapan Air.....	58
Grafik 3.3.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Perilaku Membiarkan Air Kran Mengalir Meski Sedang Tidak Digunakan Menurut Daerah Tempat Tinggal .....	59
Grafik 3.3.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Alat/Cara Membilas Cucian Pakaian dan Daerah Tempat Tinggal .....	60
Grafik 3.3.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Kebiasaan Memanfaatkan Air Bekas dan Daerah Tempat Tinggal .....	61
Grafik 3.3.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Mandi yang Digunakan dan Daerah Tempat Tinggal .....	62
Grafik 3.3.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Usaha Mengurangi Pemakaian Air dan Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Air .....	63
Grafik 3.4.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Kendaraan Bermotor.....	82
Grafik 3.4.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Daerah Tempat Tinggal .....	83
Grafik 3.4.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Kendaraan Bermotor dan Daerah Tempat Tinggal .....	84
Grafik 3.4.4	Persentase Rumah Tangga yang Ada Usaha Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi Menurut Provinsi .....	86

Grafik 3.4.5	Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Usaha yang Dilakukan .....	87
Grafik 3.4.6	Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi Menurut Alasan Utama Pengurangan dan Daerah Tempat Tinggal .....	88
Grafik 3.4.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Ada Tidaknya Perawatan Mesin Secara Rutin dan Daerah Tempat Tinggal .....	89
Grafik 3.5.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Perlakuan Terhadap Sampah dan Daerah Tempat Tinggal .....	101
Grafik 3.5.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perilaku Pemilahan Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk .....	103
Grafik 3.5.3	Persentase Rumah Tangga yang Tidak Melakukan Pemilahan Sampah Menurut Alasan Utama Tidak Melakukan Pemilahan Sampah .....	104
Grafik 3.5.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Perlakuan Utama terhadap Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) .....	105
Grafik 3.5.5	Persentase penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Kebiasaan Membuang Sampah di Rumah .....	107
Grafik 3.5.6	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Kebiasaan Membuang Sampah di Rumah .....	108
Grafik 3.6.1	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Merokok Seminggu yang Lalu Menurut Provinsi .....	117
Grafik 3.6.2	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Merokok Menurut Jenis Rokok yang Dikonsumsi Seminggu yang Lalu .....	118
Grafik 3.6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Kegiatan Kerja Bakti di Sekitar Lingkungan Rumah .....	119
Grafik 3.6.4	Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Gangguan Pencemaran Menurut Jenis Pencemaran .....	120

# 1



## Latar Belakang, Tujuan, dan Metode Survei





## 1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Demikian juga sebaliknya, lingkungan dapat dipengaruhi oleh aktivitas dan perilaku manusia. Kehidupan yang saling ketergantungan antara manusia dan lingkungannya, menempatkan manusia sebagai subjek utama yang mengambil manfaat dari sumber daya alam untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Posisi manusia sebagai subjek dalam pemanfaatan sumber daya alam, terkadang membuat manusia lupa diri karena didorong adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Proses pembangunan seringkali dilakukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.

Selain proses pembangunan yang sering mengakibatkan degradasi lingkungan, perilaku konsumtif dan gaya hidup manusia juga mengakibatkan permasalahan lingkungan. Kerusakan sumberdaya alam banyak disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti misalnya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan. Berdasarkan hasil kajian *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) pada tahun 2007, selain faktor alam, aktivitas manusia juga merupakan penyebab utama meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi, yang pada akhirnya turut menyumbang terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Beberapa aktivitas manusia tersebut antara lain penggunaan alat transportasi, penggunaan energi, pembakaran hutan dan peternakan.

Pada dasarnya perilaku manusia tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keterkaitan antara aktivitas manusia dan permasalahan lingkungan hidup sebenarnya tidak sesederhana pada boleh tidaknya suatu aktivitas dilakukan. Namun diharapkan setiap orang bisa bertanggung jawab atas kerusakan pada lingkungan yang diakibatkannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dihadapkan pada berbagai pilihan berperilaku baik yang merusak lingkungan maupun yang bermanfaat untuk lingkungan. Untuk mendukung perilaku kepedulian penduduk terhadap lingkungan, maka perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia sudah berusaha membuat peraturan terkait perilaku penduduk untuk pembangunan berkelanjutan. Berbagai regulasi sudah diterbitkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga diatur bagaimana setiap orang berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan diwajibkan untuk

memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1 yang mengatur kepedulian masyarakat terhadap penyediaan ruang terbuka hijau.
4. Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang penghematan energi dan air. Dalam inpres tersebut disebutkan bahwa para kepala pemerintahan (gubernur, bupati, dan walikota) agar melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan penghematan energi dan air dengan target penghematan listrik sebesar 20% (dua puluh persen) dari rata-rata penggunaan listrik dan penghematan air sebesar 10% dari rata-rata penggunaan air.
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang penghematan pemakaian tenaga listrik dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 penghematan pemakaian air tanah.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2011, masyarakat diharuskan untuk bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih dengan cara menggunakan air sesuai kebutuhan minimal, memanfaatkan air hujan, dan memanfaatkan kembali air yang pernah dipakai untuk berbagai kegiatan.

Berbagai peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan untuk mengatur atau mendorong masyarakat supaya berperilaku ramah lingkungan. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas ketersediaan data dan sebagai bentuk kepedulian BPS terhadap permasalahan lingkungan, pada tahun 2013 BPS melaksanakan Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH). SPPLH 2013 memotret perilaku rumah tangga dalam mengelola lingkungan hidup, baik perilaku ramah ataupun yang sifatnya merusak lingkungan hidup, baik secara langsung atau tidak langsung berdampak bagi lingkungan hidup. Hasil pendataan SPPLH tersaji dalam publikasi ini yang berjudul "Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2013".

## **1.2. Tujuan**

Secara umum publikasi ini bertujuan untuk menyajikan indikator perilaku kepedulian rumah tangga terhadap lingkungan hidup, baik perilaku ramah lingkungan ataupun perilaku yang sifatnya merusak lingkungan hidup. Perilaku rumah tangga yang disajikan terbatas pada perilaku rumah tangga terkait tempat tinggal, pemanfaatan energi, pemanfaatan air, penggunaan transportasi, dan rasa kepedulian pada lingkungan sekitar. Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan yang melibatkan rumah tangga pada pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu.

### 1.3. Metode Survei

SPPLH 2013 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga. Hasil SPPLH dapat disajikan baik pada tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan dapat dibedakan menurut daerah yaitu perkotaan dan perdesaan.

Sampel blok sensus yang digunakan adalah daftar blok sensus yang terpilih sebagai sampel pada Susenas 2013 Triwulan II. Adapun kerangka sampel yang digunakan terdiri atas tiga, yaitu:

- Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah daftar wilayah pencacahan Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang disertai dengan informasi jumlah rumah tangga hasil SP2010, muatan blok sensus dominan (pemukiman biasa, mewah, kumuh), informasi daerah sulit/tidak sulit, dan klasifikasi desa/kelurahan (perkotaan atau perdesaan),
- Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah daftar blok sensus pada setiap wilayah pencacahan,
- Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga biasa tidak termasuk *institutional household* (panti asuhan, barak polisi/militer, penjara, dsb) dalam setiap blok sensus sampel hasil pencacahan lengkap SP2010 yang telah dimutakhirkan setiap menjelang pelaksanaan survei.

Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung antara pencacah (PCL) dengan responden. Responden yang diwawancarai adalah anggota rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga itu atau sebagai pengambil keputusan dalam rumah tangga. Dalam hal ini diutamakan kepala rumah tangga, istri/suami dari kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dewasa lain yang mengetahui tentang karakteristik atau perilaku yang ditanyakan. Dari hasil pelaksanaan SPPLH 2013 pada bulan Juli 2013, sebanyak 70.406 rumah tangga berhasil dicacah atau sekitar 93,87 persen dari target sampel sebanyak 75.000 rumah tangga. Rumah tangga yang nonrespon sebagian besar dikarenakan rumah tangga tersebut sudah pindah atau rumah tangga tidak dapat ditemui hingga berakhirnya waktu pencacahan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi “Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2013” terdiri dari empat bab. Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, metode survei, dan sistematika penulisan. Bab II menjelaskan terkait pengetahuan rumah tangga terhadap perilaku peduli lingkungan hidup. Bab III menyajikan indikator perilaku peduli lingkungan hidup rumah tangga yang diperoleh dari

hasil SPPLH 2013. Perilaku peduli lingkungan hidup terbagi ke dalam beberapa subbab, yaitu fasilitas tempat tinggal, pemanfaatan energi, pemanfaatan air, penggunaan transportasi, pengelolaan sampah, dan peduli lingkungan sekitar.

<http://www.bps.go.id>

# 2



## Pengetahuan Terkait Perilaku Peduli Lingkungan Hidup





## 2.1. Pengetahuan Perilaku Peduli Lingkungan Hidup

Tingkat pengetahuan seseorang sangat diperlukan sebagai dasar dalam berperilaku, baik dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan tempat tinggal, maupun tempat bekerja. Demikian juga dalam berperilaku yang berhubungan dengan lingkungan hidup, diperlukan pengetahuan tentang perilaku yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang terkait perilaku ramah atau peduli terhadap lingkungan hidup belum tentu mendorong orang tersebut berperilaku ramah lingkungan. Akan tetapi, faktor pengetahuan mengenai perilaku peduli lingkungan hidup harus tetap diupayakan untuk dimiliki oleh setiap orang. Pengetahuan yang benar mengenai perilaku ramah lingkungan hidup merupakan komponen utama faktor internal yang dapat mendorong perubahan sikap seseorang agar lebih ramah terhadap lingkungan hidup.

Pengetahuan yang dimiliki responden terkait kepedulian terhadap lingkungan diukur dengan seberapa benar responden tersebut menjawab pertanyaan yang diajukan. Tabel 2.1 menyajikan persentase responden (mewakili rumah tangga) yang memiliki pengetahuan berperilaku ramah lingkungan hidup. Dilihat dari daerah tempat tinggal, hasil SPPLH 2013 menunjukkan bahwa responden yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak yang menjawab dengan benar untuk setiap pernyataan berperilaku peduli lingkungan hidup dibandingkan dengan responden yang tinggal di daerah perdesaan. Misalnya untuk pernyataan pengetahuan membakar sampah dapat mencemari udara, persentase responden (rumah tangga) yang tinggal di daerah perkotaan yang menjawab dengan benar tentang pengetahuan tersebut sebesar 85,09 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang tinggal di daerah perdesaan (76,12 persen).

Terkait dengan pengetahuan tentang pengelolaan sampah, sekitar 80,57 persen responden mengetahui bahwa sampah yang dibakar dapat mencemari udara. Sementara pengetahuan tentang pemilahan sampah sebelum dibuang, sekitar 43,1 persen responden dapat menjawab dengan benar. Akan tetapi untuk pengetahuan terkait cara pembuangan sampah yang mengandung bahan kimia, sebagian besar responden kurang memahaminya. Hanya sekitar 9,79 persen responden yang mengetahui bahwa sampah yang mengandung bahan kimia sebaiknya tidak dikubur. Jadi terdapat sekitar 90,21 persen responden yang berpendapat bahwa membuang sampah yang mengandung bahan kimia sebaiknya dikubur, padahal perilaku tersebut adalah salah karena jika sampah yang mengandung bahan kimia tersebut dikubur dalam tanah, maka akan mencemari tanah atau air tanah di sekitarnya.

Pada kelompok pertanyaan pengetahuan terkait perilaku kepedulian terhadap pemanfaatan air, sebagian besar responden sudah memiliki pengetahuan yang benar terkait pernyataan yang ditanyakan, yaitu sekitar 90,98 persen responden mengetahui bahwa membiarkan air mengalir tanpa digunakan berpeluang menyebabkan pemborosan air. Sementara terkait pernyataan bahwa rumah tangga perlu menyediakan area resapan air, ternyata sekitar 61,94 persen responden yang menjawab

dengan benar. Walaupun sudah lebih dari separuh responden mengetahui bahwa rumah tangga perlu menyediakan area resapan air, tetapi dalam prakteknya belum tentu rumah tangga tersebut memiliki atau menyediakan area resapan air di lingkungan rumahnya.

**Tabel 2.1 Persentase Responden yang Memiliki Pengetahuan Perilaku Peduli Lingkungan Hidup Menurut Jenis Pengetahuan dan Daerah Tempat Tinggal**

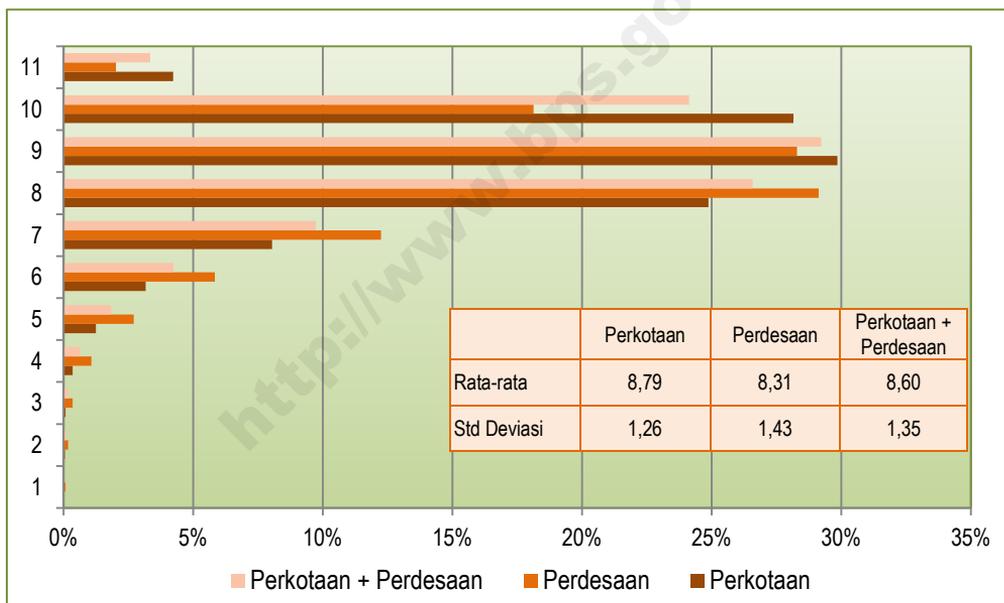
Jenis Pengetahuan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Pengelolaan Sampah</b>			
• Membakar sampah mencemari udara	85,09	76,12	80,57
• Sampah plastik, sampah makanan, sampah kertas, dan sampah lainnya perlu dipilah sebelum dibuang	48,72	37,55	43,10
• Sampah yang mengandung bahan kimia (seperti baterai, kaleng bekas obat nyamuk semprot, dll) sebaiknya tidak dikubur	11,05	8,55	9,79
<b>Kepedulian terhadap Air</b>			
• Membiarkan air mengalir tanpa digunakan berpeluang menyebabkan pemborosan air	94,06	87,93	90,98
• Rumah tangga perlu menyediakan area resapan air	72,11	51,92	61,94
<b>Kepedulian terhadap Energi</b>			
• Menghemat listrik berarti menghemat bahan bakar	85,91	76,88	81,37
• Menggunakan kendaraan umum ketika bepergian berarti menghemat bahan bakar	73,64	63,18	68,37
• Melakukan perawatan kendaraan bermotor ada kaitannya dengan menjaga lingkungan	39,00	26,30	32,61
• Sinar matahari dapat dijadikan sumber energi alternatif	81,81	70,92	76,33
• Menutup panci ketika memasak dapat menghemat bahan bakar	79,64	74,94	77,28
<b>Pemanasan global (<i>Global warming</i>)</b>			
• Asap kendaraan bermotor dan kebakaran hutan menyebabkan semakin memanasnya suhu bumi	77,07	58,32	67,63

Pada pertanyaan pengetahuan terkait kepedulian terhadap energi, dari lima buah pertanyaan yang diajukan kepada responden, sebagian besar responden sudah memiliki pengetahuan yang benar. Tercatat lebih dari dua pertiga responden telah mengetahui bahwa menghemat listrik berarti menghemat bahan bakar, menggunakan kendaraan umum ketika bepergian berarti menghemat bahan bakar, sinar matahari dapat dijadikan sumber energi alternatif, dan menutup panci ketika memasak dapat menghemat bahan bakar. Namun untuk pernyataan pengetahuan tentang perawatan kendaraan bermotor ada kaitannya dengan menjaga lingkungan, ternyata baru sepertiga responden

yang mengetahuinya. Sementara untuk pengetahuan terkait pemanasan global, yaitu asap kendaraan bermotor dan kebakaran hutan menyebabkan semakin memanasnya suhu bumi, baru sepertiga responden yang mengetahui dengan benar pernyataan tersebut.

Jika dilihat menurut provinsi, terlihat bahwa persentase responden di Provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali cenderung memiliki pengetahuan terkait kepedulian lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Walaupun ada juga provinsi lain yang persentase responden menjawab dengan benar untuk pernyataan pengetahuan tertentu paling tinggi dibandingkan provinsi lain, seperti Provinsi Kepulauan Riau untuk pernyataan pengetahuan sinar matahari dapat dijadikan sumber energi listrik alternatif dan Provinsi Sulawesi Utara untuk pernyataan pengetahuan menutup panci ketika memasak dapat menghemat bahan bakar. Persentase responden yang memiliki pengetahuan terkait kepedulian lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Grafik 2.1. Persentase Responden Menurut Skor Pengetahuan Perilaku Peduli Lingkungan dan Daerah Tempat Tinggal**



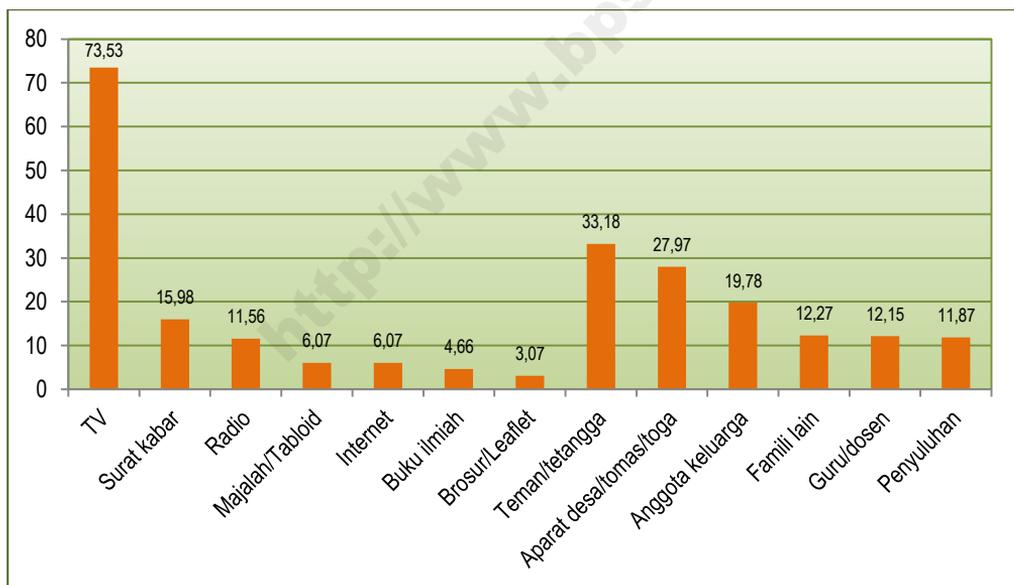
Berdasarkan pertanyaan terkait pengetahuan kepedulian lingkungan hidup, dari sebelas pertanyaan yang diajukan, diberikan skor 1 (satu) untuk jawaban yang benar dan skor 0 (nol) untuk jawaban yang salah, maka diperoleh skor pengetahuan perilaku peduli lingkungan hidup dengan skor terendah 0 dan skor tertinggi 11. Pada Grafik 2.1 terlihat bahwa sebagian besar responden mempunyai skor antara 8 sampai 10 dengan rata-rata skor pengetahuan responden adalah 8,6 dan standar deviasi sebesar 1,35. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden terhadap

perilaku pengetahuan lingkungan hidup sudah cukup tinggi. Dari grafik juga terlihat bahwa tidak ada responden yang menjawab salah semua dari sebelas pernyataan pengetahuan yang ditanyakan.

## 2.2. Sumber Informasi Terkait Lingkungan Hidup

Informasi-informasi terkait lingkungan hidup dapat diperoleh melalui berbagai media, seperti media cetak, media elektronik, ataupun dari lingkup keluarga, masyarakat, pendidikan atau lingkungan kantor. Media elektronik, khususnya televisi sangat berperan dalam memberikan informasi terkait lingkungan hidup ke masyarakat, yaitu mencapai sekitar 73,53 persen responden (Grafik 2.2). Hal ini mengindikasikan bahwa media televisi merupakan media yang sangat berpengaruh dalam memberikan segala informasi kepada masyarakat, termasuk informasi terkait lingkungan hidup. Sedangkan media cetak yang cukup berperan dalam memberikan informasi terkait lingkungan hidup ke masyarakat adalah surat kabar (15,98 persen).

**Grafik 2.2. Persentase Responden Menurut Sumber Informasi Terkait Lingkungan Hidup**



Dilihat menurut provinsi, lebih dari separuh responden di setiap provinsi menyatakan memperoleh informasi terkait lingkungan melalui televisi, kecuali di Provinsi Nusa Tenggara Timur (33,00 persen) dan Papua (28,99 persen). Bahkan untuk beberapa provinsi, responden yang menyatakan memperoleh informasi terkait lingkungan hidup dari media televisi lebih dari 85 persen yaitu terdapat di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Tabel 2.3).

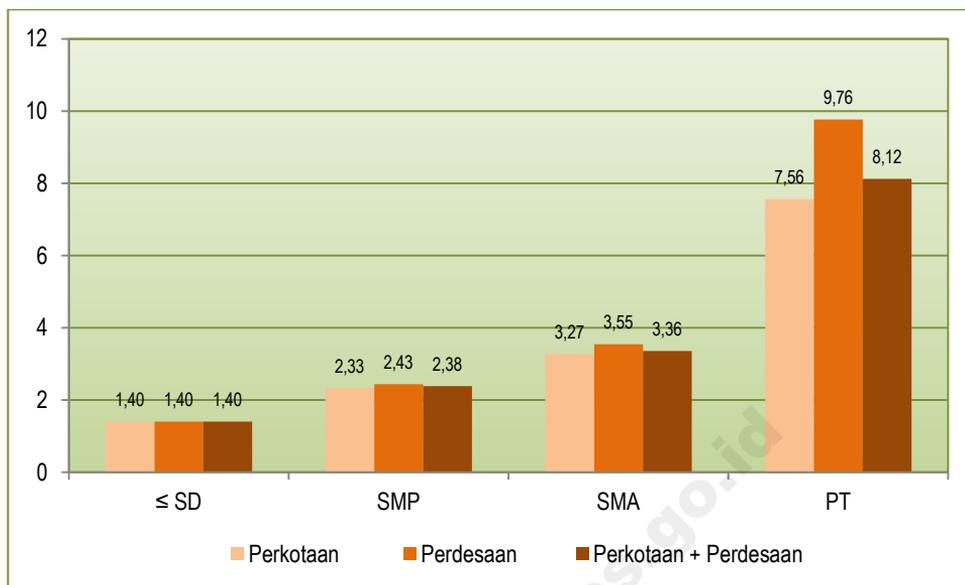
Selain media cetak dan elektronik, sumber informasi dari orang lain seperti teman, tetangga, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau bahkan anggota keluarga juga berperan dalam memberikan informasi terkait lingkungan hidup. Informasi dari teman termasuk tetangga menyumbang sekitar 33,18 persen informasi terkait lingkungan hidup kepada responden. Sementara aparat desa/tomas/toga juga cukup berperan dalam memberikan informasi terkait lingkungan hidup kepada masyarakat yaitu sekitar 27,97 persen, diikuti sumber informasi yang diperoleh dari anggota keluarga (19,78 persen). Adapun persentase responden yang menyatakan penyuluhan sebagai sumber informasi terkait lingkungan hidup sebesar 11,87 persen. Untuk provinsi Bali, persentase responden yang menyatakan penyuluhan sebagai sumber informasi terkait lingkungan hidup sudah mencapai sekitar 20,21 persen.

### **2.3. Penyuluhan/Pelatihan Terkait Lingkungan Hidup**

Penyuluhan atau pelatihan terkait lingkungan hidup adalah proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dengan mengikuti penyuluhan atau pelatihan terkait lingkungan hidup, diharapkan seseorang akan menambah pengetahuannya dan merubah perilakunya kearah peduli lingkungan. Disadari juga bahwa penyuluhan atau pelatihan terkait lingkungan hidup masih jarang dilakukan, karena masih banyak yang menganggap bahwa aspek lingkungan hidup tidak terlalu penting.

Pada Tabel 2.4 terlihat bahwa persentase penduduk 10 tahun keatas yang pernah/sedang mengikuti penyuluhan/pelatihan terkait lingkungan hidup selama tiga tahun terakhir hanya sebesar 2,47 persen. Persentase tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara (6,67 persen), diikuti Gorontalo (4,82 persen), DI Yogyakarta (4,58 persen), dan Jawa Tengah (4,19 persen). Jika dilihat dari tingkat pendidikan, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula persentase penduduk 10 tahun keatas yang pernah mengikuti penyuluhan/pelatihan terkait lingkungan hidup (Grafik 2.3). Persentase penduduk 10 tahun keatas lulusan perguruan tinggi dan pernah mengikuti penyuluhan/pelatihan terkait lingkungan hidup tercatat sebesar 8,12 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk 10 tahun keatas yang hanya berpendidikan SD kebawah. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk 10 tahun keatas yang pernah mengikuti penyuluhan/pelatihan terkait lingkungan hidup di daerah perkotaan dan perdesaan hampir berimbang, kecuali untuk lulusan perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi yang tinggal di daerah perdesaan yang pernah mengikuti penyuluhan/pelatihan terkait lingkungan hidup lebih banyak di banding yang tinggal di daerah perkotaan.

**Grafik 2.3. Persentase Responden yang Pernah Mengikuti Penyuluhan/Pelatihan Terkait Lingkungan Hidup Selama Tiga Tahun Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal**



Tema yang diajarkan pada penyuluhan/pelatihan terkait lingkungan hidup juga bermacam-macam jenisnya, mengingat lingkungan hidup luas cakupannya. Pada survei ini tema penyuluhan/pelatihan terkait lingkungan hidup dikelompokkan menjadi 5 tema besar yaitu pengelolaan sampah, penghematan/konservasi air, penghematan listrik/penggunaan energi listrik alternatif, penghijauan, dan konservasi satwa. Penyuluhan/pelatihan terkait pengelolaan sampah merupakan jenis penyuluhan/pelatihan yang paling banyak diikuti yaitu mencapai 47,96 persen, diikuti penyuluhan/pelatihan tentang penghijauan sebesar 32,74 persen. Sementara tema tentang penghematan/konservasi air, penghematan listrik/penggunaan energi listrik alternatif, dan konservasi satwa merupakan tema penyuluhan/pelatihan yang kurang banyak diikuti oleh penduduk 10 tahun keatas, yaitu persentasenya kurang dari 10 persen (Tabel 2.5). Hal ini menunjukkan bahwa tema penyuluhan/pelatihan terkait pengelolaan sampah dan penghijauan merupakan masalah yang banyak menjadi perhatian di bidang lingkungan hidup.

**Tabel 2.2 Persentase Responden yang Memiliki Pengetahuan Peduli Lingkungan Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Pengetahuan**

Provinsi	Jenis Pengetahuan			
	Membakar sampah mencemari udara	Sampah plastik, sampah makanan, sampah kertas tidak perlu dipilah sebelum dibuang	Sampah yang mengandung bahan kimia sebaiknya dikubur	Asap kendaraan bermotor menyebabkan semakin memanasnya suhu bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	78,01	34,81	7,91	63,10
Sumatera Utara	79,09	42,73	11,54	75,28
Sumatera Barat	80,50	42,76	7,71	68,73
Riau	80,18	37,09	4,36	64,38
Jambi	84,05	40,70	6,09	69,08
Sumatera Selatan	78,60	39,33	7,59	73,06
Bengkulu	78,80	50,68	12,84	74,92
Lampung	81,95	37,58	8,26	63,48
Kep. Bangka Belitung	76,33	48,14	10,56	70,95
Kepulauan Riau	87,48	55,14	7,81	80,86
DKI Jakarta	90,23	46,90	11,02	83,33
Jawa Barat	82,78	47,51	9,24	71,09
Jawa Tengah	80,96	44,94	9,17	68,78
DI Yogyakarta	85,82	67,77	16,00	84,63
Jawa Timur	78,90	40,82	11,01	62,78
Banten	82,04	34,39	10,70	61,57
Bali	86,65	65,01	20,89	83,53
Nusa Tenggara Barat	76,24	30,28	7,29	57,91
Nusa Tenggara Timur	75,72	40,12	7,87	56,61
Kalimantan Barat	78,57	34,74	8,83	61,60
Kalimantan Tengah	83,99	32,11	5,70	67,38
Kalimantan Selatan	85,87	45,40	12,93	73,09
Kalimantan Timur	85,21	45,55	9,53	71,51
Sulawesi Utara	85,72	47,93	8,61	77,61
Sulawesi Tengah	75,59	46,84	5,68	65,06
Sulawesi Selatan	73,09	37,30	8,78	52,84
Sulawesi Tenggara	75,69	53,86	12,59	59,30
Gorontalo	74,85	42,47	14,93	61,91
Sulawesi Barat	66,99	51,14	18,82	47,85
Maluku	83,95	39,27	13,12	69,13
Maluku Utara	82,14	26,06	4,44	61,26
Papua Barat	78,48	31,88	7,81	58,27
Papua	51,33	25,58	8,14	36,47
<b>Indonesia</b>	<b>80,57</b>	<b>43,10</b>	<b>9,79</b>	<b>67,63</b>

Lanjutan Tabel 2.2

Provinsi	Jenis Pengetahuan			
	Membiarkan air mengalir tanpa digunakan berpeluang menyebabkan pemborosan air	Rumah tangga perlu menyediakan area resapan air	Menghemat listrik berarti menghemat bahan bakar	Menggunakan kendaraan umum ketika bepergian berarti menghemat bahan bakar
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	90,76	46,97	76,77	60,64
Sumatera Utara	91,17	58,90	82,46	70,94
Sumatera Barat	89,60	63,55	81,01	69,54
Riau	86,08	54,67	80,93	66,85
Jambi	90,93	57,57	84,09	66,59
Sumatera Selatan	91,81	67,55	82,25	71,11
Bengkulu	89,84	73,76	86,33	68,24
Lampung	90,83	57,01	83,85	68,99
Kep. Bangka Belitung	92,52	63,42	85,70	71,88
Kepulauan Riau	94,91	71,80	93,09	76,42
DKI Jakarta	92,41	79,25	86,21	80,27
Jawa Barat	92,39	65,36	80,44	71,38
Jawa Tengah	92,05	63,53	84,42	71,83
DI Yogyakarta	95,45	88,67	86,45	78,97
Jawa Timur	91,04	55,83	77,74	63,99
Banten	90,84	59,92	79,21	66,17
Bali	96,59	84,12	89,45	78,92
Nusa Tenggara Barat	89,67	49,80	75,21	63,61
Nusa Tenggara Timur	79,70	59,19	78,00	58,96
Kalimantan Barat	88,18	53,59	85,72	63,31
Kalimantan Tengah	93,80	68,45	88,86	72,78
Kalimantan Selatan	95,51	62,34	87,42	74,69
Kalimantan Timur	96,66	64,70	88,79	64,22
Sulawesi Utara	94,64	78,57	91,76	79,47
Sulawesi Tengah	93,49	74,45	86,35	69,58
Sulawesi Selatan	89,65	53,14	78,08	58,42
Sulawesi Tenggara	89,69	62,37	80,56	56,38
Gorontalo	89,19	70,75	80,36	65,61
Sulawesi Barat	88,77	42,49	72,45	46,21
Maluku	91,99	60,52	88,37	63,73
Maluku Utara	89,62	54,46	85,41	65,67
Papua Barat	81,08	49,97	75,51	57,19
Papua	57,12	34,37	50,45	35,08
<b>Indonesia</b>	<b>90,98</b>	<b>61,94</b>	<b>81,37</b>	<b>68,37</b>

Lanjutan Tabel 2.2

Provinsi	Jenis Pengetahuan		
	Melakukan perawatan kendaraan bermotor tidak ada kaitannya dengan menjaga lingkungan	Sinar matahari dapat dijadikan sumber energi listrik alternatif	Menutup panci ketika memasak dapat menghemat bahan bakar
(1)	(10)	(11)	(12)
Aceh	29,08	69,46	66,93
Sumatera Utara	34,81	75,38	75,12
Sumatera Barat	38,26	80,42	73,61
Riau	30,49	76,56	61,98
Jambi	31,14	79,38	72,32
Sumatera Selatan	34,10	81,58	80,86
Bengkulu	40,18	86,40	76,20
Lampung	32,20	79,31	77,04
Kep. Bangka Belitung	34,08	88,75	75,36
Kepulauan Riau	41,01	91,83	78,37
DKI Jakarta	42,18	87,31	79,18
Jawa Barat	31,98	75,70	77,54
Jawa Tengah	32,29	73,06	80,53
DI Yogyakarta	48,55	85,01	80,65
Jawa Timur	30,43	71,86	80,52
Banten	27,20	73,89	77,39
Bali	50,23	83,53	89,08
Nusa Tenggara Barat	22,68	68,75	62,78
Nusa Tenggara Timur	28,16	82,36	78,95
Kalimantan Barat	27,85	71,43	69,65
Kalimantan Tengah	29,72	88,41	81,97
Kalimantan Selatan	38,35	85,90	73,38
Kalimantan Timur	39,52	87,43	72,41
Sulawesi Utara	38,06	87,16	89,49
Sulawesi Tengah	35,30	84,67	82,93
Sulawesi Selatan	30,98	70,65	78,59
Sulawesi Tenggara	32,88	76,15	71,98
Gorontalo	32,37	75,24	75,06
Sulawesi Barat	37,23	71,34	72,35
Maluku	22,52	87,01	81,79
Maluku Utara	30,36	78,54	73,26
Papua Barat	22,30	73,57	67,84
Papua	19,21	70,43	53,18
<b>Indonesia</b>	<b>32,61</b>	<b>76,33</b>	<b>77,28</b>

**Tabel 2.3 Persentase Responden Menurut Provinsi dan Sumber Informasi Terkait Lingkungan Hidup**

Provinsi	Sumber Informasi						
	Brosur/ Leaflet	Surat kabar	Majalah/ Tabloid	Radio	TV	Internet	Buku ilmiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	6,09	23,93	8,50	13,00	74,26	6,40	5,57
Sumatera Utara	4,90	21,71	6,64	12,00	74,04	5,73	6,94
Sumatera Barat	2,94	19,80	10,17	10,96	71,69	7,34	5,96
Riau	2,82	21,44	7,94	13,22	80,51	6,75	5,97
Jambi	2,10	12,74	5,65	6,06	78,45	3,56	4,51
Sumatera Selatan	2,76	13,45	4,39	7,65	73,42	3,53	3,72
Bengkulu	1,37	15,83	4,67	7,40	75,86	6,42	4,64
Lampung	1,62	11,08	2,61	6,96	73,41	2,66	3,62
Kep. Bangka Belitung	1,84	15,59	5,97	8,84	72,70	5,85	9,56
Kepulauan Riau	4,01	28,38	11,75	19,50	82,62	21,29	4,47
DKI Jakarta	6,29	34,61	13,53	12,97	86,37	13,88	5,62
Jawa Barat	3,22	15,52	4,60	10,67	79,55	5,88	3,29
Jawa Tengah	1,66	10,91	5,01	11,78	69,92	4,52	3,79
DI Yogyakarta	5,09	25,12	10,84	13,49	65,64	14,46	8,73
Jawa Timur	2,91	15,12	7,52	16,03	76,44	6,30	5,12
Banten	3,50	17,07	5,86	9,20	82,14	6,03	3,23
Bali	4,55	20,44	6,99	15,44	71,37	7,84	4,27
Nusa Tenggara Barat	2,40	7,69	3,07	8,09	62,75	4,16	3,39
Nusa Tenggara Timur	1,96	12,68	5,92	13,22	33,00	2,89	8,76
Kalimantan Barat	2,16	10,42	4,25	7,89	71,84	3,48	4,13
Kalimantan Tengah	4,05	18,44	9,74	13,45	76,54	5,93	9,35
Kalimantan Selatan	1,90	13,72	3,38	9,06	86,21	5,59	3,69
Kalimantan Timur	6,27	24,10	8,15	8,43	85,42	13,10	5,49
Sulawesi Utara	1,64	18,02	5,18	8,74	63,99	4,92	3,26
Sulawesi Tengah	1,65	8,04	3,29	3,24	55,73	4,53	5,40
Sulawesi Selatan	3,03	13,83	3,39	7,26	60,34	5,15	5,14
Sulawesi Tenggara	0,78	10,50	4,53	6,25	65,68	4,64	9,03
Gorontalo	1,33	8,57	4,50	17,84	55,24	3,95	2,76
Sulawesi Barat	1,93	12,59	2,69	4,81	52,68	2,64	3,45
Maluku	3,26	13,70	6,10	15,05	61,57	6,05	5,66
Maluku Utara	3,36	17,75	6,59	10,64	71,47	3,99	8,08
Papua Barat	5,32	9,00	6,70	15,69	50,38	3,24	3,96
Papua	2,86	11,11	3,53	12,07	28,99	2,66	4,43
<b>Indonesia</b>	<b>3,07</b>	<b>15,98</b>	<b>6,07</b>	<b>11,56</b>	<b>73,53</b>	<b>6,07</b>	<b>4,66</b>

Lanjutan Tabel 2.3

Provinsi	Sumber Informasi					
	Aparat desa/tomas/toga	Guru/ dosen	Penyuluhan	Teman/ tetangga	Anggota keluarga	Famili lain
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	26,51	12,63	5,86	38,31	26,71	16,99
Sumatera Utara	24,87	16,42	18,09	28,50	17,71	11,47
Sumatera Barat	25,77	17,56	10,44	42,36	28,01	17,63
Riau	20,12	16,02	6,65	32,61	17,51	12,40
Jambi	31,38	6,66	7,65	26,81	17,17	12,22
Sumatera Selatan	23,10	14,82	6,03	30,45	16,24	9,59
Bengkulu	20,25	9,81	5,84	36,21	16,11	8,67
Lampung	24,27	8,26	6,67	31,19	17,31	8,88
Kep. Bangka Belitung	13,51	14,60	15,90	35,84	19,14	9,90
Kepulauan Riau	30,77	12,43	9,01	35,15	16,29	12,05
DKI Jakarta	34,96	6,08	11,56	20,55	12,88	8,51
Jawa Barat	25,39	8,82	14,45	30,86	16,00	9,05
Jawa Tengah	31,28	10,86	16,45	34,32	22,09	11,85
DI Yogyakarta	27,50	15,70	16,22	39,50	16,08	7,93
Jawa Timur	23,80	15,63	9,38	41,33	24,35	16,78
Banten	18,32	10,05	7,27	34,88	15,74	14,77
Bali	24,00	12,43	20,21	28,46	9,98	7,22
Nusa Tenggara Barat	26,88	11,14	10,82	40,38	21,53	15,70
Nusa Tenggara Timur	60,29	19,95	14,67	31,73	23,70	15,50
Kalimantan Barat	18,49	11,13	5,16	30,17	16,97	11,60
Kalimantan Tengah	21,23	16,03	7,48	36,54	25,54	17,71
Kalimantan Selatan	18,31	12,28	5,95	27,49	20,21	11,41
Kalimantan Timur	23,48	14,14	11,28	29,37	24,53	13,08
Sulawesi Utara	66,21	11,46	12,86	20,71	11,27	3,61
Sulawesi Tengah	38,70	9,55	18,02	23,17	42,39	11,32
Sulawesi Selatan	48,66	12,61	9,41	27,62	16,30	10,16
Sulawesi Tenggara	35,06	15,76	18,22	36,03	21,98	11,29
Gorontalo	44,70	18,58	13,16	19,29	20,55	6,62
Sulawesi Barat	39,10	22,83	3,39	44,67	20,68	8,96
Maluku	42,60	17,67	8,50	24,91	36,72	16,83
Maluku Utara	34,76	14,22	6,60	24,03	14,31	13,00
Papua Barat	30,68	6,92	13,70	23,09	20,51	13,22
Papua	44,20	6,78	6,27	32,22	28,14	26,09
<b>Indonesia</b>	<b>27,97</b>	<b>12,15</b>	<b>11,87</b>	<b>33,18</b>	<b>19,78</b>	<b>12,27</b>

**Tabel 2.4 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Keikutsertaan dalam Penyuluhan/Pelatihan Lingkungan Hidup Selama Tiga Tahun Terakhir**

Provinsi	Keikutsertaan dalam Penyuluhan/Pelatihan Lingkungan Hidup		
	Pernah/sedang	Tidak pernah	Tidak tahu
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,48	91,04	7,48
Sumatera Utara	1,71	95,23	3,06
Sumatera Barat	1,88	93,57	4,55
Riau	1,46	93,94	4,60
Jambi	2,09	93,86	4,05
Sumatera Selatan	1,66	94,08	4,26
Bengkulu	1,90	89,64	8,46
Lampung	1,27	93,03	5,69
Kep. Bangka Belitung	1,94	95,17	2,89
Kepulauan Riau	3,05	92,52	4,43
DKI Jakarta	2,95	88,33	8,72
Jawa Barat	2,51	90,80	6,68
Jawa Tengah	4,19	87,00	8,80
DI Yogyakarta	4,58	90,61	4,81
Jawa Timur	1,87	92,13	6,01
Banten	1,70	92,22	6,08
Bali	2,93	91,58	5,49
Nusa Tenggara Barat	1,67	93,23	5,10
Nusa Tenggara Timur	3,81	91,10	5,09
Kalimantan Barat	0,92	91,43	7,65
Kalimantan Tengah	1,30	96,11	2,59
Kalimantan Selatan	2,07	95,29	2,64
Kalimantan Timur	3,09	91,05	5,86
Sulawesi Utara	6,67	90,01	3,32
Sulawesi Tengah	2,05	95,13	2,81
Sulawesi Selatan	2,41	88,06	9,53
Sulawesi Tenggara	1,55	97,12	1,33
Gorontalo	4,82	90,95	4,23
Sulawesi Barat	0,63	97,74	1,63
Maluku	3,71	90,65	5,64
Maluku Utara	1,85	93,01	5,15
Papua Barat	3,85	91,55	4,60
Papua	1,10	91,50	7,40
<b>Indonesia</b>	<b>2,47</b>	<b>91,32</b>	<b>6,21</b>

**Tabel 2.5 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Mengikuti Penyuluhan/Pelatihan Lingkungan Hidup Selama Tiga Tahun Terakhir Menurut Jenis Penyuluhan/Pelatihan Lingkungan Hidup**

Provinsi	Jenis Penyuluhan/Pelatihan Lingkungan Hidup					
	Pengelolaan sampah	Penghematan/konservasi air	Penghematan listrik/penggunaan energi listrik alternatif	Penghijauan	Konservasi satwa	Tidak tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	36,33	9,20	5,23	36,69	1,61	10,93
Sumatera Utara	40,28	4,05	12,88	39,23	-	3,55
Sumatera Barat	52,35	10,98	4,08	30,77	0,80	1,00
Riau	35,55	2,31	7,85	40,79	0,33	13,16
Jambi	52,27	2,52	5,45	36,49	0,93	2,34
Sumatera Selatan	32,11	7,58	3,04	53,33	1,08	2,86
Bengkulu	57,92	10,25	-	24,15	6,48	1,20
Lampung	65,12	2,44	6,08	22,05	1,60	2,71
Kep. Bangka Belitung	54,94	9,77	5,48	27,32	-	2,49
Kepulauan Riau	44,61	1,53	0,54	50,45	-	2,86
DKI Jakarta	53,10	9,30	6,44	29,90	0,79	0,47
Jawa Barat	51,91	11,77	4,57	29,15	0,21	2,38
Jawa Tengah	51,90	10,96	7,63	26,11	0,28	3,12
DI Yogyakarta	67,28	3,23	1,20	25,93	1,50	0,86
Jawa Timur	43,01	8,66	5,45	40,03	0,68	2,16
Banten	62,29	5,59	5,50	18,26	2,67	5,69
Bali	53,62	5,78	4,76	28,81	0,68	6,36
Nusa Tenggara Barat	52,83	4,90	11,46	24,42	2,73	3,67
Nusa Tenggara Timur	44,57	13,86	1,12	38,77	1,05	0,63
Kalimantan Barat	44,14	6,25	-	36,69	4,54	8,38
Kalimantan Tengah	37,28	20,75	-	32,83	8,81	0,34
Kalimantan Selatan	36,52	15,28	1,06	40,99	-	6,15
Kalimantan Timur	35,44	8,43	12,30	40,64	-	3,19
Sulawesi Utara	49,63	2,09	8,05	34,45	0,87	4,90
Sulawesi Tengah	30,60	29,78	0,62	30,39	2,64	5,97
Sulawesi Selatan	29,59	6,21	5,56	54,67	0,11	3,86
Sulawesi Tenggara	28,96	33,71	3,79	30,58	-	2,97
Gorontalo	36,67	5,01	1,76	54,26	-	2,29
Sulawesi Barat	34,87	21,37	-	43,75	-	0,02
Maluku	30,38	9,48	8,86	46,58	1,92	2,78
Maluku Utara	12,77	21,34	4,73	51,62	2,91	6,62
Papua Barat	15,32	27,92	25,50	26,05	0,62	4,58
Papua	33,95	4,11	12,05	32,50	-	17,39
<b>Indonesia</b>	<b>47,96</b>	<b>9,44</b>	<b>5,98</b>	<b>32,74</b>	<b>0,71</b>	<b>3,17</b>



3



# Perilaku Peduli Lingkungan Hidup Rumah Tangga





## Fasilitas Tempat Tinggal

# 3.1

Kondisi fisik bangunan tempat tinggal dan fasilitasnya dapat menggambarkan tingkat sosial ekonomi dan tingkat kesehatan penghuninya. Selain itu, kondisi bangunan dan fasilitas tempat tinggal juga dapat menggambarkan tingkat kepedulian penghuninya terhadap aspek lingkungan hidup. Terkait dengan bangunan tempat tinggal yang ramah lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan. Beberapa kriteria yang terdapat dalam peraturan menteri tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah rumah tangga sudah menempati bangunan tempat tinggal yang ramah lingkungan atau tidak.

Berdasarkan peraturan menteri di atas, bangunan ramah lingkungan (*greenbuilding*) adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaannya dan aspek penting penanganan dampak perubahan iklim. Diantara kategori bangunan ramah lingkungan adalah menggunakan material bangunan yang ramah lingkungan seperti material bangunan yang bersertifikat *eco-label* dan material bangunan lokal. Selain itu, dalam bangunan tersebut tersedia fasilitas untuk konservasi sumber daya air dan mempunyai sistem pemanfaatan air hujan, memiliki sistem pencahayaan dan pengkondisian udara buatan yang hemat energi, terdapat sistem pengolahan air limbah domestik dan fasilitas pemilahan sampah, serta memaksimalkan penggunaan sinar matahari dan melengkapi bangunan dengan ruang terbuka hijau sebagai taman, konservasi hayati, dan resapan air hujan. Oleh karena itu, untuk menilai apakah suatu tempat tinggal ramah lingkungan dapat dikaji dari kondisi fisik maupun fasilitasnya.

Pada SPPLH 2013, kondisi dan fasilitas tempat tinggal yang ditanyakan terbatas pada beberapa hal seperti ketersediaan area terbuka, tempat pembuangan akhir tinja, penggunaan cahaya matahari sebagai pencahayaan atau penerangan ruangan, ketersediaan area resapan air, dan keberadaan tanaman keras/tahunan. Status kepemilikan bangunan tempat tinggal menjadi salah satu pertimbangan dalam menganalisis perilaku peduli lingkungan, terutama terkait dengan fasilitas tempat tinggal. Rumah tangga dengan status rumah milik sendiri tentu akan lebih leluasa ketika ingin mendesain rumah atau melakukan inovasi sesuai dengan keinginan penghuninya dibandingkan dengan rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri. Berdasarkan hasil survei,

menunjukkan bahwa 83,50 persen rumah tangga menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri, sedangkan sisanya 16,50 persen menempati bangunan bukan milik sendiri (kontrak, sewa, bebas sewa, dinas, milik orang tua/anak/saudara).

**Tabel 3.1.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal**

Fasilitas	Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal		
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri*)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Ketersediaan area terbuka</b>			
Tidak ada	17,66	44,73	22,13
< 10% luas tanah tempat tinggal	6,63	5,96	6,52
10-30% luas tanah tempat tinggal	22,88	19,52	22,32
> 30% luas tanah tempat tinggal	52,83	29,79	49,03
<b>Penggunaan pencahayaan matahari untuk penerangan ruangan</b>			
Sebagian besar ruangan	67,17	58,43	65,73
Sebagian kecil ruangan	26,34	30,76	27,07
Tidak ada	6,49	10,80	7,20
<b>Ketersediaan area resapan air</b>			
Ada	31,35	20,63	29,58
Tidak ada	68,65	79,37	70,42
<b>Keberadaan tanaman keras/tahunan</b>			
Ada	56,16	31,77	52,14
Tidak ada	43,84	68,23	47,86

Keterangan : \*) Rumah tangga menempati bangunan tempat tinggal secara kontrak, sewa, bebas sewa, dinas, milik orang tua/anak/saudara, dan lainnya

Pada Tabel 3.1.1 terlihat bahwa secara umum terdapat perbedaan ketersediaan beberapa fasilitas rumah antara rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dengan rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri. Rumah yang memiliki area terbuka memungkinkan terjadinya sirkulasi udara yang baik di sekitar rumah dan memungkinkan penghuninya untuk menyediakan area resapan air. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyediaan ruang terbuka hijau publik minimal 20 persen yang disediakan pemerintah dan penyediaan ruang terbuka hijau privat (masyarakat/swasta) minimal 10 persen dari lahan yang dimiliki oleh masyarakat/swasta. Berdasarkan hasil survei tercatat sebanyak 71,35 persen rumah tangga

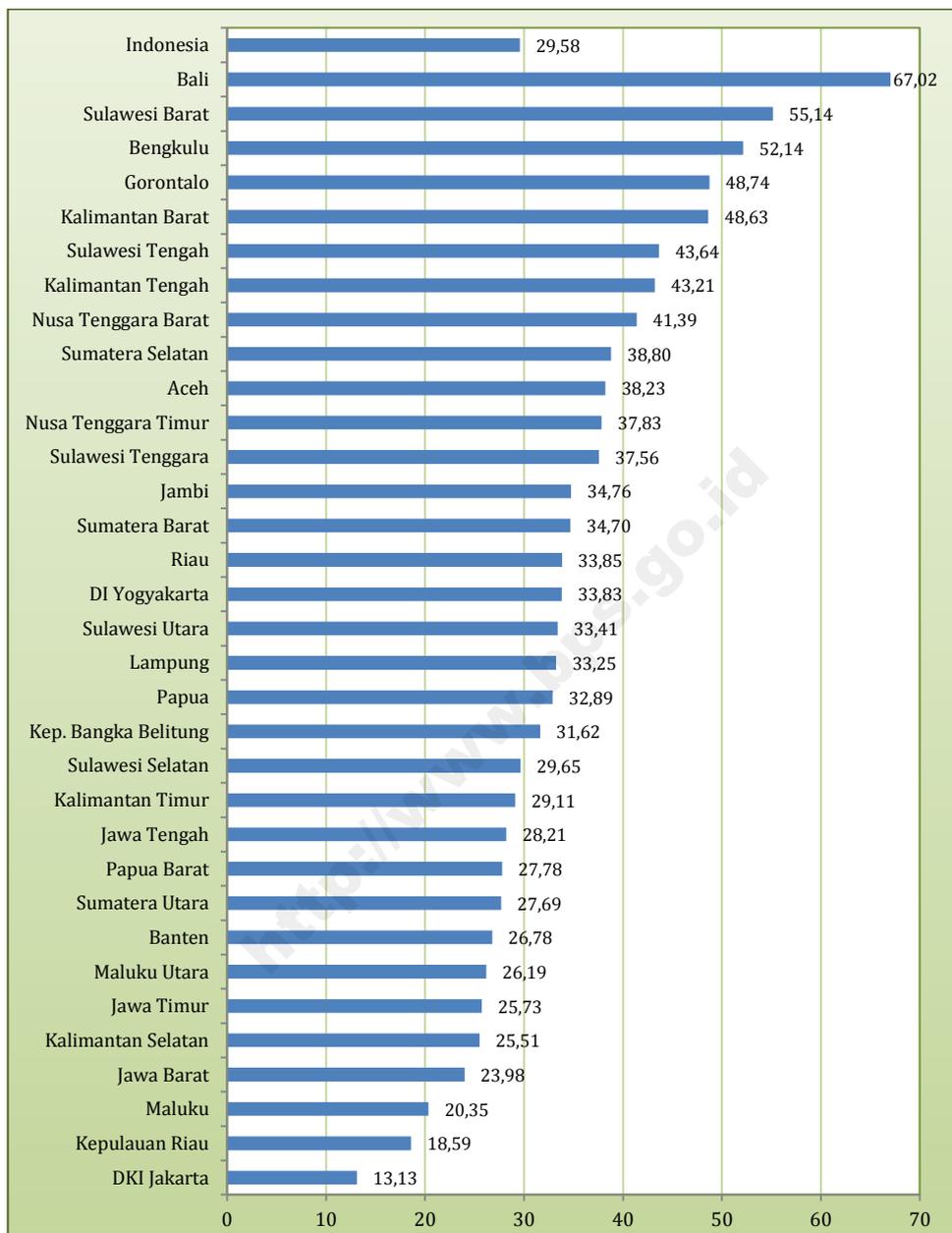
memiliki area terbuka lebih dari 10 persen luas tanah tempat tinggal, sebanyak 6,52 persen rumah tangga hanya memiliki area terbuka kurang dari 10 persen luas tanah tempat tinggal, dan sisanya 22,13 persen rumah tangga tidak mempunyai area terbuka.

Rumah tangga yang menempati rumah/bangunan milik sendiri cenderung lebih memiliki area terbuka dibandingkan dengan rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri. Persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dengan area terbuka lebih dari 10 persen luas tanah tempat tinggal tercatat sekitar 75,71 persen, atau 1,5 kali lebih tinggi daripada rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri (49,31 persen). Jika dilihat menurut provinsi, persentase rumah tangga yang tidak memiliki area terbuka terlihat lebih banyak terdapat di provinsi-provinsi di Pulau Jawa (Tabel 3.1.2). Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga yang tidak memiliki area terbuka tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain yaitu mencapai 79,22 persen atau dengan kata lain hanya ada 20,78 persen rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki area terbuka. Hal ini wajar karena tingkat kepadatan penduduk di Jakarta yang tinggi dan ketersediaan tanah yang terbatas, sehingga sebagian besar lahan sudah digunakan untuk bangunan.

Cahaya matahari sangat diperlukan untuk penerangan ruangan di dalam rumah pada waktu siang hari. Dengan adanya sinar matahari yang cukup masuk ke dalam ruangan, maka pada waktu siang hari tidak perlu menyalakan lampu untuk aktivitas di dalam rumah sehingga dapat menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan juga berfungsi untuk menjaga kesehatan di dalam rumah. Sebagian besar rumah tangga sudah memanfaatkan sinar matahari untuk penerangan ruangan di dalam rumah yaitu mencapai 92,80 persen, dimana rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri lebih banyak yang sudah memanfaatkan sinar matahari untuk penerangan ruangan (93,51 persen) dibandingkan dengan rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri (89,20 persen). Jika dilihat menurut provinsi, Provinsi DI Yogyakarta dan Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga yang sudah memanfaatkan sinar matahari tertinggi yaitu sudah mencapai 98 persen. Sementara Provinsi Papua dan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang belum memanfaatkan sinar matahari untuk penerangan ruangan pada siang hari yaitu masing-masing tercatat sebesar 19,21 persen dan 18,31 persen.

Keberadaan area resapan air dan tanaman sangat penting untuk konservasi sumber daya air. Persentase rumah tangga yang sudah mempunyai area resapan air (minimal ada 1 jenis area resapan air, baik sumur resapan, lubang biopori, atau taman/tanah berumput) mencapai sekitar 29,58 persen. Persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri memiliki area resapan air lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri.

**Grafik 3.1.1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Area Resapan Air Menurut Provinsi**



Tanaman atau pohon sangat membantu dalam penyediaan udara segar dan membantu penyerapan air ke dalam tanah. Keberadaan tanaman keras atau tanaman tahunan di pekarangan rumah, selain untuk membuat rindang dan asri halaman rumah, juga dapat membantu penyerapan air khususnya air hujan sehingga penyediaan air tanah terjamin. Persentase rumah tangga yang memiliki

tanaman keras/tahunan di pekarangan rumah mencapai sekitar 52 persen (Tabel 3.1.1). Rumah tangga yang menempati rumah/bangunan milik sendiri cenderung memiliki tanaman keras/tahunan di pekarangan rumah dibandingkan rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri yaitu 56,16 persen berbanding 31,77 persen. Persentase rumah tangga yang memiliki tanaman keras/tahunan untuk setiap provinsi rata-rata mencapai diatas 40 persen, kecuali Provinsi DKI Jakarta yang hanya 15,88 persen dan Jawa Barat sebesar 39,75 persen.

<http://www.bps.go.id>

**Tabel 3.1.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, dan Ketersediaan Area Terbuka**

Provinsi	<i>Milik Sendiri</i>			
	Ketersediaan Area Terbuka			
	Tidak ada	<10% luas tanah tempat tinggal	10 – 30% luas tanah tempat tinggal	>30% luas tanah tempat tinggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,92	3,93	15,76	76,39
Sumatera Utara	13,09	5,22	23,51	58,17
Sumatera Barat	7,69	5,63	23,80	62,87
Riau	3,98	5,62	12,83	77,57
Jambi	9,11	4,83	16,50	69,56
Sumatera Selatan	11,24	6,87	14,75	67,14
Bengkulu	8,93	5,49	15,06	70,51
Lampung	5,66	2,90	7,68	83,76
Kep. Bangka Belitung	5,73	3,61	12,42	78,24
Kepulauan Riau	50,74	13,83	12,92	22,52
DKI Jakarta	72,66	8,11	13,75	5,49
Jawa Barat	26,74	7,85	28,11	37,30
Jawa Tengah	16,13	8,56	29,70	45,61
DI Yogyakarta	18,15	5,67	17,72	58,46
Jawa Timur	17,56	6,01	25,79	50,64
Banten	25,44	9,68	32,88	31,99
Bali	13,32	16,61	26,42	43,66
Nusa Tenggara Barat	7,40	2,85	14,51	75,24
Nusa Tenggara Timur	1,16	3,05	13,86	81,93
Kalimantan Barat	7,85	4,62	15,53	72,00
Kalimantan Tengah	6,39	4,27	11,96	77,38
Kalimantan Selatan	11,36	6,12	21,79	60,73
Kalimantan Timur	18,86	7,32	17,51	56,31
Sulawesi Utara	12,87	4,82	12,99	69,33
Sulawesi Tengah	8,91	3,62	8,70	78,76
Sulawesi Selatan	11,80	4,63	19,13	64,44
Sulawesi Tenggara	8,00	5,10	11,38	75,52
Gorontalo	5,32	8,41	13,31	72,96
Sulawesi Barat	3,62	1,79	14,71	79,88
Maluku	9,25	3,33	19,37	68,05
Maluku Utara	6,29	2,61	14,82	76,29
Papua Barat	8,12	3,66	14,96	73,26
Papua	6,17	2,05	16,25	75,53
<b>Indonesia</b>	<b>17,66</b>	<b>6,63</b>	<b>22,88</b>	<b>52,83</b>

Lanjutan Tabel 3.1.2

Bukan Milik Sendiri

Provinsi	Ketersediaan Area Terbuka			
	Tidak ada	<10% luas tanah tempat tinggal	10 – 30% luas tanah tempat tinggal	>30% luas tanah tempat tinggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	18,76	9,44	16,28	55,52
Sumatera Utara	25,50	5,36	23,06	46,08
Sumatera Barat	20,29	7,40	30,63	41,67
Riau	8,80	7,68	21,72	61,80
Jambi	27,62	5,45	27,65	39,27
Sumatera Selatan	29,38	8,70	15,69	46,23
Bengkulu	20,30	4,65	21,91	53,13
Lampung	15,89	4,59	15,53	63,99
Kep. Bangka Belitung	20,10	5,71	23,67	50,53
Kepulauan Riau	67,05	4,33	8,68	19,94
DKI Jakarta	88,15	2,44	7,93	1,48
Jawa Barat	53,41	5,20	20,72	20,67
Jawa Tengah	37,67	11,67	24,80	25,86
DI Yogyakarta	60,81	1,17	12,39	25,64
Jawa Timur	49,56	4,17	20,85	25,42
Banten	63,80	9,73	16,97	9,51
Bali	53,25	15,36	16,39	15,01
Nusa Tenggara Barat	24,29	1,13	19,52	55,06
Nusa Tenggara Timur	22,06	2,61	18,06	57,27
Kalimantan Barat	21,38	6,00	16,20	56,42
Kalimantan Tengah	27,81	5,79	16,95	49,45
Kalimantan Selatan	31,15	3,38	32,64	32,82
Kalimantan Timur	54,50	4,80	20,26	20,44
Sulawesi Utara	24,10	7,09	14,44	54,37
Sulawesi Tengah	32,43	3,50	12,11	51,95
Sulawesi Selatan	32,72	2,84	23,89	40,55
Sulawesi Tenggara	33,14	3,55	16,42	46,89
Gorontalo	12,18	15,37	26,29	46,15
Sulawesi Barat	18,97		11,13	69,89
Maluku	36,28	7,71	21,23	34,79
Maluku Utara	27,00	4,13	10,36	58,51
Papua Barat	36,81	7,73	22,26	33,20
Papua	24,83	2,06	26,84	46,28
<b>Indonesia</b>	<b>44,73</b>	<b>5,96</b>	<b>19,52</b>	<b>29,79</b>

Lanjutan Tabel 3.1.2

Provinsi	Ketersediaan Area Terbuka			
	Tidak ada	<10% luas tanah tempat tinggal	10 – 30% luas tanah tempat tinggal	>30% luas tanah tempat tinggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	6,26	4,80	15,84	73,10
Sumatera Utara	16,53	5,26	23,39	54,83
Sumatera Barat	10,60	6,04	25,38	57,98
Riau	5,22	6,15	15,11	73,53
Jambi	12,36	4,94	18,46	64,24
Sumatera Selatan	14,32	7,18	14,91	63,59
Bengkulu	10,24	5,40	15,85	68,52
Lampung	6,63	3,06	8,42	81,89
Kep. Bangka Belitung	7,73	3,91	13,99	74,38
Kepulauan Riau	55,83	10,87	11,60	21,71
DKI Jakarta	79,22	5,70	11,28	3,79
Jawa Barat	31,45	7,38	26,81	34,36
Jawa Tengah	18,46	8,90	29,17	43,47
DI Yogyakarta	25,91	4,85	16,75	52,49
Jawa Timur	20,51	5,84	25,34	48,31
Banten	33,03	9,69	29,74	27,54
Bali	22,18	16,33	24,19	37,30
Nusa Tenggara Barat	9,32	2,66	15,08	72,94
Nusa Tenggara Timur	3,31	3,01	14,29	79,39
Kalimantan Barat	9,01	4,74	15,58	70,67
Kalimantan Tengah	10,44	4,56	12,91	72,10
Kalimantan Selatan	15,10	5,61	23,84	55,45
Kalimantan Timur	28,32	6,65	18,24	46,80
Sulawesi Utara	15,61	5,37	13,34	65,68
Sulawesi Tengah	12,43	3,60	9,21	74,76
Sulawesi Selatan	14,83	4,37	19,82	60,98
Sulawesi Tenggara	11,24	4,90	12,03	71,83
Gorontalo	6,32	9,42	15,19	69,07
Sulawesi Barat	5,29	1,59	14,32	78,79
Maluku	13,98	4,10	19,69	62,23
Maluku Utara	8,59	2,78	14,32	74,32
Papua Barat	14,22	4,52	16,51	64,75
Papua	8,90	2,05	17,80	71,26
<b>Indonesia</b>	<b>22,13</b>	<b>6,52</b>	<b>22,32</b>	<b>49,03</b>

**Tabel 3.1.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Pemanfaatan Cahaya Matahari untuk Penerangan Ruangan**

Provinsi	Pemanfaatan Cahaya Matahari untuk Penerangan Ruangan		
	Sebagian besar ruangan	Sebagian kecil ruangan	Tidak sama sekali
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	67,05	25,91	7,04
Sumatera Utara	68,16	21,16	10,68
Sumatera Barat	80,83	16,11	3,06
Riau	76,94	20,31	2,75
Jambi	83,08	13,93	2,98
Sumatera Selatan	69,78	23,39	6,83
Bengkulu	77,00	20,90	2,11
Lampung	77,63	16,93	5,45
Kep. Bangka Belitung	88,66	9,48	1,86
Kepulauan Riau	56,87	31,94	11,18
DKI Jakarta	38,70	42,99	18,31
Jawa Barat	61,57	31,89	6,53
Jawa Tengah	68,12	26,26	5,62
DI Yogyakarta	82,20	16,48	1,32
Jawa Timur	62,38	29,82	7,80
Banten	46,94	42,75	10,30
Bali	76,49	19,84	3,67
Nusa Tenggara Barat	62,98	28,76	8,26
Nusa Tenggara Timur	72,17	20,96	6,87
Kalimantan Barat	74,30	20,33	5,37
Kalimantan Tengah	83,33	14,48	2,19
Kalimantan Selatan	76,63	19,52	3,85
Kalimantan Timur	75,24	19,42	5,34
Sulawesi Utara	82,10	13,82	4,08
Sulawesi Tengah	81,83	12,31	5,86
Sulawesi Selatan	64,48	28,74	6,77
Sulawesi Tenggara	77,53	19,32	3,15
Gorontalo	81,22	14,85	3,93
Sulawesi Barat	66,10	17,33	16,58
Maluku	71,07	18,64	10,29
Maluku Utara	55,47	31,20	13,33
Papua Barat	65,94	24,85	9,20
Papua	49,46	31,32	19,21
<b>Indonesia</b>	<b>65,73</b>	<b>27,07</b>	<b>7,20</b>

**Tabel 3.1.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Tanaman Keras/Tahunan di Pekarangan Rumah**

Provinsi	Keberadaan Tanaman Keras/Tahunan	
	Ada	Tidak ada
(1)	(2)	(3)
Aceh	64,54	35,46
Sumatera Utara	49,93	50,07
Sumatera Barat	57,72	42,28
Riau	66,08	33,92
Jambi	55,45	44,55
Sumatera Selatan	57,18	42,82
Bengkulu	64,81	35,19
Lampung	67,55	32,45
Kep. Bangka Belitung	60,61	39,39
Kepulauan Riau	42,02	57,98
DKI Jakarta	15,88	84,12
Jawa Barat	39,75	60,25
Jawa Tengah	58,05	41,95
DI Yogyakarta	63,10	36,90
Jawa Timur	55,83	44,17
Banten	42,72	57,28
Bali	65,99	34,01
Nusa Tenggara Barat	52,52	47,48
Nusa Tenggara Timur	74,24	25,76
Kalimantan Barat	64,10	35,90
Kalimantan Tengah	65,18	34,82
Kalimantan Selatan	54,11	45,89
Kalimantan Timur	42,19	57,81
Sulawesi Utara	56,25	43,75
Sulawesi Tengah	55,17	44,83
Sulawesi Selatan	62,32	37,68
Sulawesi Tenggara	57,20	42,80
Gorontalo	62,05	37,95
Sulawesi Barat	64,00	36,00
Maluku	47,02	52,98
Maluku Utara	52,42	47,58
Papua Barat	60,05	39,95
Papua	48,24	51,76
<b>Indonesia</b>	<b>52,14</b>	<b>47,86</b>

Energi mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat modern, diantaranya untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Berbagai fungsi energi telah dimanfaatkan oleh manusia dalam kuantitas dan kualitas yang terus meningkat, mulai dari keperluan penerangan, rumah tangga, komunikasi, industri, dan transportasi. Jika akses manusia terhadap energi dibatasi, maka berbagai bentuk kesulitan akan dialami oleh manusia. Hal ini karena manusia sudah sangat tergantung akan kebutuhan energi. Pada bagian ini, pemanfaatan energi yang akan dibahas terbatas pada pemanfaatan energi listrik untuk rumah tangga dan bahan bakar yang digunakan untuk memasak.

### 3.2.1. Pemanfaatan Energi Listrik

Manusia membutuhkan energi listrik untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti untuk penerangan pada waktu malam hari, untuk mengoperasikan berbagai macam peralatan elektronik, dsb. Semakin banyak jumlah penduduk dan semakin meningkat taraf kehidupan penduduk, maka kebutuhan akan energi listrik juga akan meningkat. Disisi lain, sumber daya atau bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik semakin berkurang persediaannya dan mahal biaya pokok penyediaan listrik di Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya penghematan penggunaan energi listrik sehingga cadangan sumber daya penghasil listrik tidak cepat habis.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait penghematan energi, diantaranya Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penghematan Energi dan Air, yang merupakan pengganti Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2008. Dalam inpres tersebut disebutkan bahwa para kepala pemerintahan (gubernur, bupati dan walikota) agar menghimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat termasuk perusahaan swasta yang berada di wilayah masing-masing untuk melaksanakan penghematan energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah lama mengeluarkan peraturan dalam rangka penghematan energi, diantaranya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hemat Energi. Pelaksanaan penghematan energi pada rumah tangga dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Menggunakan lampu hemat energi;
- 2) Mengurangi pemakaian listrik minimal 50 watt saat beban puncak antara pukul 17.00 sampai dengan pukul 22.00;
- 3) Mengatur suhu ruangan ber-AC di rumah pada suhu minimal 25°C.

Pada tahun 2012, Kementerian ESDM juga mengeluarkan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik. Pada peraturan menteri tersebut, disebutkan juga beberapa cara menghemat penggunaan energi listrik, seperti memanfaatkan cahaya alami (sinar matahari) sebagai sumber penerangan di dalam rumah pada siang hari dan mematikan alat elektronik (peralatan pemanfaat listrik untuk rumah tangga, seperti TV, radio, AC, pompa air) jika tidak digunakan atau menggunakan seperlunya.

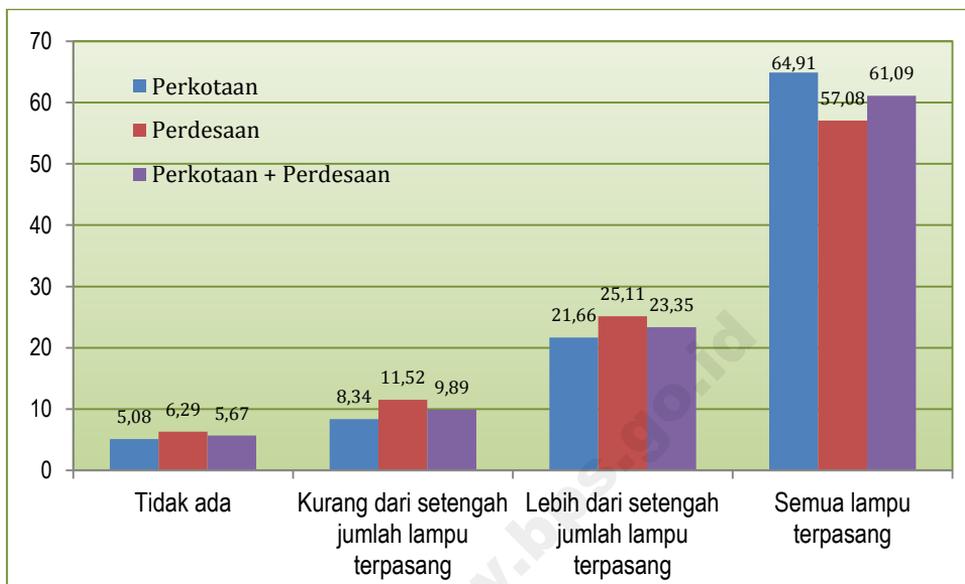
Beberapa pertanyaan dalam SPPLH 2013 ditujukan untuk mengumpulkan data terkait implementasi himbauan pemerintah dalam hal penghematan energi listrik oleh rumah tangga. Salah satu cara untuk menghemat listrik adalah menggunakan lampu hemat energi. Lampu hemat energi merupakan lampu yang dapat menghemat pemakaian energi listrik sampai beberapa persen. Beberapa merk lampu menuliskan seberapa hemat di dalam kemasannya, seperti 23 watt lampu hemat energi setara dengan 120 watt lampu pijar. Hal ini berarti lampu hemat energi tersebut dapat menghemat listrik sampai dengan 80 persen. Bahkan sekarang ini mulai banyak dipasarkan lampu LED (*Light Emitting Diode*). LED memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan lampu lain, dimana LED lebih hemat energi 80 persen sampai 90 persen dibandingkan lampu lain dan memiliki waktu penggunaan yang lebih lama.

Berdasarkan hasil survei diperoleh bahwa sekitar 96,75 persen rumah tangga sudah mendapatkan akses listrik untuk sumber penerangan, dengan rincian sebesar 93,72 persen rumah tangga menggunakan listrik PLN, 2,12 persen rumah tangga menggunakan listrik non PLN yang bersumber dari energi non alternatif, dan sisanya sebesar 0,90 persen rumah tangga menggunakan listrik non PLN yang bersumber dari energi alternatif. Mahalnya biaya pokok penyediaan listrik dan *supply* energi yang masih terbatas, penggunaan listrik yang bersumber dari energi alternatif merupakan langkah yang patut diapresiasi walaupun persentasenya kecil.

Terkait dengan penggunaan lampu untuk penerangan, dari hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga sudah menggunakan lampu hemat energi pada semua lampu yang terpasang yaitu sekitar 61,09 persen. Persentase rumah tangga yang sudah menggunakan lampu hemat energi pada semua lampu yang terpasang lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan yaitu 64,91 persen berbanding 57,08 persen (Grafik 3.2.1). Sementara rumah tangga yang sudah menggunakan lampu hemat energi lebih dari setengah jumlah lampu terpasang sebesar 23,35 persen. Akan tetapi masih ada sekitar 5,67 persen rumah tangga yang tidak menggunakan lampu hemat energi sama sekali. Bahkan untuk Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Jawa Barat, persentase rumah tangga yang tidak menggunakan lampu hemat energi masih diatas sepuluh persen yaitu masing-masing 10,52 persen dan 10,12 persen.

**Grafik 3.2.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Banyaknya Lampu Hemat Energi yang Terpasang di Rumah dan Daerah Tempat Tinggal**



Selain penggunaan lampu hemat energi, langkah penghematan listrik yang lain adalah dengan cara tidak menyalakan lampu pada siang hari dan mengurangi/mematikan sebagian lampu yang dinyalakan pada malam hari. Sebagian besar rumah tangga tidak menyalakan lampu pada siang hari yaitu mencapai 81,92 persen, yang berarti ada sekitar 18,08 persen rumah tangga yang menyalakan lampu untuk aktivitas di dalam rumah pada siang hari. Hal ini juga seiring dengan banyaknya rumah tangga yang memanfaatkan pencahayaan matahari untuk penerangan ruangan pada waktu siang hari. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga terbesar yang menyalakan lampu pada siang hari untuk menunjang aktivitasnya di dalam rumah yaitu mencapai 61,30 persen. Pemukiman yang padat di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan banyak rumah yang letaknya berdempetan, sehingga tembok antar rumah menjadi satu dan menyebabkan banyak ruangan rumah yang tidak terkena sinar matahari. Hal ini menjadikan penghuninya harus menyalakan listrik ketika beraktivitas di dalam rumah pada siang hari.

Selain digunakan untuk penerangan, energi listrik juga sangat dibutuhkan untuk menyalakan/mengoperasikan berbagai peralatan elektronik yang digunakan rumah tangga, seperti televisi, lemari es, setrika, kipas angin, komputer, dispenser, mesin cuci, dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Dari hasil SPPLH 2013 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Indonesia sudah

memiliki televisi yaitu mencapai sekitar 88,11 persen rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa televisi sudah bukan menjadi sebuah kebutuhan tersier lagi, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan primer/pokok. Alat elektronik yang juga dimiliki oleh lebih dari separuh rumah tangga yaitu setrika (68,72 persen), *magic com/rice cooker* (64,06 persen), dan kipas angin/*exhaust fan* (53,63 persen). Alat elektronik yang belum banyak dimiliki rumah tangga yaitu AC (*Air Conditioner*) atau penyejuk ruangan yang hanya dimiliki oleh 5,56 persen rumah tangga. Hal ini wajar karena selain harganya mahal, daya yang digunakan untuk menyalakan AC juga tergolong besar sehingga kepemilikan AC cenderung hanya dimiliki oleh rumah tangga golongan menengah keatas.

**Tabel 3.2.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kepemilikan Alat Elektronik dan Perilaku Membiarkan Alat Elektronik Tetap Menyala Meski Tidak Digunakan**

Jenis Alat Elektronik	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Alat Elektronik	Perilaku Membiarkan Alat Elektronik Tetap Menyala Meski Sedang Tidak Digunakan		
		Tidak Pernah	Kadang-Kadang	Sering
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Televisi	88,11	49,00	28,83	22,17
AC	5,56	57,84	27,72	14,44
Kipas angin/ <i>Exhaust fan</i>	53,63	52,75	33,49	13,76
Komputer/Laptop	17,52	66,50	20,93	12,57
Radio/Tape/DVD	46,08	59,68	32,10	8,22
Pompa air	42,85	69,04	13,13	17,83
Setrika	68,72	*	*	*
Lemari es	43,51	*	*	*
Dispenser	28,70	*	*	*
<i>Magic com/Rice cooker</i>	64,06	*	*	*
Mesin cuci 1 tabung	9,17	*	*	*
Mesin cuci 2 tabung	11,11	*	*	*

Keterangan : \* khusus alat elektronik tersebut, tidak ditanyakan perilaku membiarkan alat elektronik meski sedang tidak digunakan

Terkait penggunaan alat elektronik, ada beberapa perilaku yang dapat dilakukan oleh rumah tangga untuk menghemat energi listrik yang digunakan, seperti mematikan alat elektronik ketika tidak dimanfaatkan, mencabut kabel dari sumber listriknya ketika tidak digunakan, dan gunakan timer untuk menghindari lupa mematikan televisi/AC. Salah satu perilaku yang ditanyakan dalam survei ini adalah kebiasaan atau perilaku membiarkan alat elektronik tetap menyala meski sedang tidak dimanfaatkan/digunakan. Perilaku ini termasuk ke dalam perilaku yang tidak ramah lingkungan karena

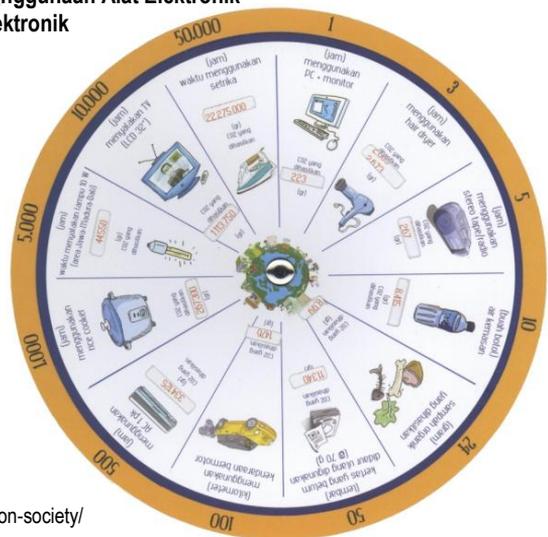
membiarkan energi listrik terbuang percuma. Bagi rumah tangga yang memiliki televisi, ternyata tercatat sekitar 51 persen rumah tangga mempunyai kebiasaan sering atau kadang-kadang membiarkan televisi tetap menyala meski tidak ditonton. Bahkan di beberapa provinsi, persentase rumah tangga yang mempunyai kebiasaan sering atau kadang-kadang membiarkan televisi tetap menyala meski tidak ditonton melebihi angka 60 persen, seperti Provinsi Papua Barat, Maluku Utara dan Kalimantan Barat.

Untuk alat elektronik yang lain (AC, kipas angin/*exhaust fan*, komputer/laptop, radio/*tape/dvd player*, pompa air), persentase rumah tangga yang mempunyai kebiasaan atau perilaku kadang-kadang/sering membiarkan alat elektronik tersebut tetap menyala meski tidak dimanfaatkan mencapai diatas 30 persen. Persentase yang juga cukup tinggi yaitu perilaku membiarkan kipas angin tetap menyala meski tidak dimanfaatkan yaitu mencapai 47,25 persen. Walaupun mungkin sebagian orang menganggap perilaku seperti diatas adalah hal yang sepele, tetapi bagi lingkungan dampaknya luar biasa. Sebagai contoh, setiap menyalakan televisi (LCD 32") selama 1 jam akan menghasilkan emisi CO<sub>2</sub> sebesar 111,4 gram. Bisa dibayangkan jika 88 persen rumah tangga di Indonesia memiliki televisi dan 51 persen diantaranya kadang-kadang/sering menyalakan televisi tanpa ditonton, maka energi listrik yang terbuang percuma akan sangat besar dan emisi CO<sub>2</sub> yang dihasilkan setiap hari juga akan sangat besar. Hal ini mungkin belum atau tidak disadari oleh setiap orang.

**Tabel 3.2.2 Emisi CO<sub>2</sub> yang Dihasilkan Setiap Penggunaan Alat Elektronik Selama 1 Jam Menurut Jenis Alat Elektronik**

Jenis Alat Elektronik	Emisi CO <sub>2</sub> yang Dihasilkan (gr)
(1)	(2)
Lampu 10 watt	8,9
Radio/tape	53,4
TV LCD 32"	111,4
Komputer	223,0
Rice cooker	267,3
Setrika	445,5
AC 1 PK	668,3

Sumber : <http://www.iesr.or.id/category/kampanye-2/low-carbon-society/>

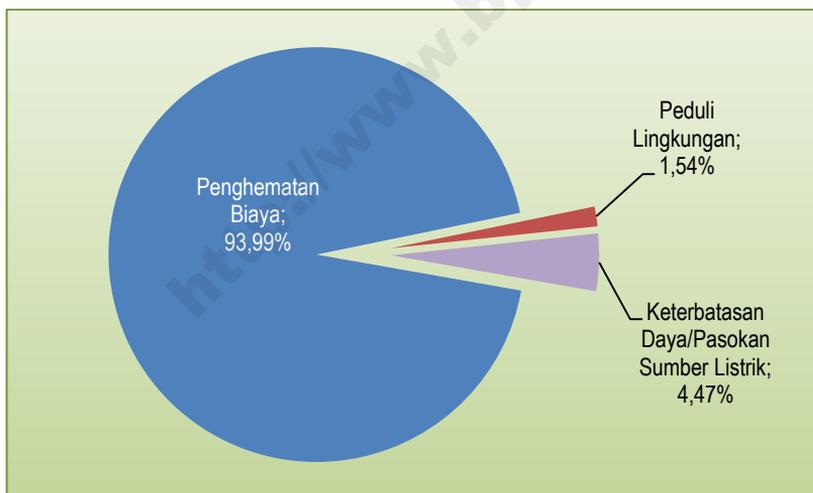


Penyejuk ruangan (AC) merupakan alat elektronik yang membutuhkan energi listrik cukup besar. AC belum menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, karena baru sebagian kecil rumah tangga yang memilikinya dan pada umumnya adalah rumah tangga golongan menengah keatas yang hidup di daerah perkotaan. Dalam penggunaan AC sebaiknya diatur pada

suhu minimal 25°C karena semakin rendah atau semakin dingin pengaturan suhu AC, maka energi listrik yang digunakan semakin besar. Dari hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan kadang-kadang atau sering menyalakan AC dibawah suhu 25°C, dengan rincian rumah tangga yang menyatakan kadang-kadang sebesar 40,99 persen dan rumah tangga yang menyatakan sering sebesar 36,78 persen (Tabel 3.2.9). Sementara rumah tangga yang menyatakan tidak pernah menyalakan AC dibawah suhu 25°C tercatat sebesar 22,23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa himbauan atau anjuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyalakan AC dibawah suhu 25°C masih belum banyak dilakukan oleh rumah tangga. Mungkin juga hal ini karena ketidaktahuan rumah tangga akan cara penggunaan AC yang hemat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan energi listrik terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama akibat pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penyediaan energi listrik masih terbatas dan biaya pokok untuk penyediaan listrik cukup mahal, disamping juga sumber daya alam untuk pembangkit listrik semakin terbatas terutama BBM dan batubara. Untuk itu perlu langkah penghematan listrik, salah satunya dengan mengurangi pemakaian listrik.

**Grafik 3.2.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Listrik**



Berdasarkan hasil survei diperoleh persentase rumah tangga yang melakukan usaha mengurangi pemakaian listrik sebesar 38,23 persen. Jika dilihat menurut provinsi, Gorontalo merupakan provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang melakukan usaha mengurangi pemakaian listrik (63,20 persen), diikuti provinsi DKI Jakarta (51,65 persen). Adapun sebagian besar rumah tangga melakukan usaha mengurangi pemakaian listrik karena alasan penghematan biaya yaitu mencapai 93,99 persen. Sisanya sebesar 4,47 persen karena alasan keterbatasan daya atau

pasokan listrik dan sebesar 1,54 persen karena alasan peduli lingkungan. Khusus untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, persentase rumah tangga yang mengurangi pemakaian listrik karena alasan keterbatasan daya/pasokan listrik cukup banyak yaitu masing-masing sebesar 33,93 persen, 25,72 persen, 24,59 persen, 19,96 persen, dan 18,21 persen. Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa di provinsi-provinsi tersebut pasokan listriknya masih terbatas.

### **3.2.2. Penggunaan Bahan Bakar Memasak**

Penggunaan bahan bakar memasak oleh rumah tangga, selain terkait dengan unsur kesehatan juga terkait dengan kepedulian rumah tangga terhadap lingkungan. Semakin banyak rumah tangga yang menggunakan bahan bakar minyak tanah, kayu, briket, arang, dan jenis bahan bakar dari biomasa lainnya akan berdampak pada peningkatan polusi dan berkurangnya stok sumber daya alam.

Pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan program konversi minyak tanah ke gas sejak tahun 2007 secara bertahap di seluruh Indonesia, walaupun sampai sekarang masih ada beberapa daerah yang belum terkena program konversi gas tersebut. Program konversi gas dilakukan dengan beberapa alasan, seperti semakin tingginya tingkat subsidi untuk penyediaan BBM terutama minyak tanah, peningkatan potensi nilai tambah minyak menjadi avtur, efisiensi penggunaan energi karena nilai kalor energi gas lebih tinggi daripada minyak tanah, dan kandungan karbon yang lebih kecil. Dengan kebijakan konversi ini, pemerintah telah berhasil meningkatkan penggunaan bahan bakar gas sebagai bahan bakar utama memasak oleh rumah tangga.

Persentase rumah tangga yang melakukan kegiatan memasak tercatat sebesar 98,18 persen, berarti ada sekitar 1,82 persen rumah tangga tidak memasak. Persentase rumah tangga yang tidak memasak di daerah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan yaitu 2,94 persen berbanding 0,71 persen. Rumah tangga yang tidak memasak terutama terjadi pada rumah tangga yang hanya beranggotakan 1 anggota rumah tangga (tinggal sendiri).

Diantara rumah tangga yang melakukan kegiatan memasak, tercatat sebanyak 58,68 persen rumah tangga menggunakan gas/elpiji/gas kota sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Hal ini mengindikasikan bahwa program konversi minyak tanah ke gas sudah cukup berhasil, walaupun di beberapa provinsi program tersebut belum sepenuhnya berjalan atau bahkan belum berjalan seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua, dimana persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar gas untuk memasak masih dibawah 10 persen. Sementara rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak juga masih cukup banyak yaitu sebesar 34,22 persen.

Bahkan untuk daerah perdesaan, rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak masih lebih dari separuh jumlah rumah tangga yaitu mencapai sekitar 54,64 persen. Masih tingginya rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak tentu tidak baik bagi lingkungan, selain menimbulkan emisi karbon yang lebih banyak dibandingkan bahan bakar gas/elpiji, tentu juga akan mengurangi stok sumber daya alam khususnya kayu jika tidak dibarengi dengan penanaman kembali.

Dalam penggunaan bahan bakar untuk memasak, ternyata ada sebagian rumah tangga yang menggunakan lebih dari satu jenis bahan bakar. Dari Tabel 3.2.3 terlihat bahwa sekitar 34 persen rumah tangga menggunakan bahan bakar cadangan/komplemen, sedangkan sekitar 66 persen hanya menggunakan satu jenis bahan bakar untuk memasak. Sebagai contoh rumah tangga yang menggunakan gas/elpiji sebagai bahan bakar memasak (56,68 persen), ternyata ada sebanyak 14,12 persen yang juga menggunakan bahan bakar kayu sebagai bahan bakar memasak cadangan. Demikian juga sebaliknya, dari 34,22 persen rumah tangga yang menggunakan kayu sebagai bahan bakar utama, ternyata ada sebanyak 9,26 persen yang menggunakan gas/elpiji sebagai bahan bakar cadangan untuk memasak.

**Tabel 3.2.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama dan Bahan Bakar Cadangan Memasak yang Digunakan**

Bahan Bakar Utama	Bahan Bakar Cadangan							Total
	Listrik	Gas/Elpiji/ Gas Kota	Biogas	Minyak Tanah	Arang/ Briket	Kayu Bakar	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Listrik	0,33	0,20	0,00	0,08	0,00	0,23	0,02	0,87
Gas/Elpiji/Gas Kota	0,67	40,26	0,02	2,91	0,14	14,12	0,55	58,68
Biogas	0,00	0,00	0,02	0,02	-	0,01	-	0,06
Minyak Tanah	0,09	0,14	0,00	3,42	0,09	1,96	0,05	5,75
Arang/Briket	-	0,07	-	0,07	0,13	0,10	0,00	0,38
Kayu Bakar	0,22	9,26	0,02	2,85	0,13	21,47	0,28	34,22
Lainnya	0,00	0,01	-	0,01	-	0,00	0,02	0,04

Catatan : Bagian (angka) yang diarsir menunjukkan bahwa rumah tangga hanya menggunakan satu jenis bahan bakar (tidak menggunakan bahan bakar cadangan).

Selain menggunakan jenis bahan bakar memasak yang lebih ramah lingkungan, rumah tangga juga dapat melakukan perilaku peduli lingkungan dari sisi pemanfaatan energi dengan cara menutup panci/penggorengan/wadah pada saat memasak. Gouri Mirpuri (2011) dalam bukunya “40 Green Tips” menjelaskan bahwa kebiasaan menutup panci/wadah pada saat memasak dapat menghemat energi sampai dengan 70%. Dari Tabel 3.2.12 terlihat bahwa sudah sebagian besar

rumah tangga mempunyai kebiasaan menutup panci ketika memasak, yaitu rumah tangga yang menyatakan sering menutup panci ketika memasak tercatat sebesar 70,53 persen dan rumah tangga yang menyatakan kadang-kadang menutup panci ketika memasak tercatat sebesar 25,26 persen.

Persentase tertinggi rumah tangga yang sering menutup panci ketika memasak terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu mencapai 89,89 persen, diikuti Provinsi Nusa Tenggara Timur (87,53 persen). Sedangkan persentase tertinggi rumah tangga yang tidak pernah menutup panci ketika memasak terdapat di Provinsi Sumatera Barat (11,16 persen), diikuti Provinsi DKI Jakarta (10,15 persen) dan Papua (9,93 persen).

<http://www.bps.go.id>

**Tabel 3.2.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Utama**

Provinsi	Listrik PLN	Listrik Non PLN Sumber Energi Alternatif	Listrik Non PLN Sumber Energi Non Alternatif	Petromak/ Pelita/Sentir/ Obor/Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	96,64	0,60	0,03	2,73
Sumatera Utara	92,75	0,86	1,24	5,15
Sumatera Barat	90,37	1,45	0,92	7,27
Riau	70,07	4,30	20,96	4,67
Jambi	87,09	1,15	8,00	3,77
Sumatera Selatan	87,81	1,24	7,04	3,91
Bengkulu	93,55	1,61	1,55	3,29
Lampung	88,50	2,36	6,12	3,02
Kep. Bangka Belitung	95,93	0,09	3,10	0,87
Kepulauan Riau	90,82	2,90	5,46	0,81
DKI Jakarta	99,98	0,02	0,00	0,00
Jawa Barat	99,39	0,24	0,16	0,20
Jawa Tengah	99,56	0,01	0,18	0,24
DI Yogyakarta	99,97	0,00	0,00	0,03
Jawa Timur	99,61	0,15	0,09	0,15
Banten	99,40	0,12	0,04	0,44
Bali	99,49	0,00	0,00	0,51
Nusa Tenggara Barat	94,99	1,42	0,58	3,01
Nusa Tenggara Timur	63,50	4,72	3,57	28,21
Kalimantan Barat	78,24	1,11	8,06	12,60
Kalimantan Tengah	75,99	2,70	10,43	10,88
Kalimantan Selatan	93,72	0,26	3,27	2,75
Kalimantan Timur	88,44	2,31	7,10	2,15
Sulawesi Utara	97,99	0,47	0,18	1,35
Sulawesi Tengah	80,45	3,35	5,15	11,06
Sulawesi Selatan	90,01	2,09	3,27	4,63
Sulawesi Tenggara	82,93	2,88	4,11	10,08
Gorontalo	86,47	1,58	1,33	10,61
Sulawesi Barat	60,24	10,61	16,49	12,66
Maluku	74,55	1,30	3,82	20,33
Maluku Utara	74,92	2,01	10,86	12,21
Papua Barat	63,21	6,51	10,56	19,72
Papua	35,06	5,90	6,11	52,93
<b>Indonesia</b>	<b>93,72</b>	<b>0,90</b>	<b>2,12</b>	<b>3,25</b>

**Tabel 3.2.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Lampu Hemat Energi yang Terpasang di Rumah**

Provinsi	Banyaknya Lampu Hemat Energi yang Terpasang di Rumah			
	Tidak Ada	Kurang dari Setengah	Lebih dari Setengah	Semua Lampu Terpasang
		Jumlah Lampu Terpasang	Jumlah Lampu Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,11	3,76	21,40	71,73
Sumatera Utara	2,84	2,87	9,75	84,54
Sumatera Barat	2,67	5,63	17,43	74,27
Riau	2,73	5,20	8,98	83,09
Jambi	2,69	2,94	13,04	81,32
Sumatera Selatan	5,10	6,46	14,69	73,76
Bengkulu	5,67	9,08	22,39	62,86
Lampung	5,00	7,37	19,91	67,72
Kep. Bangka Belitung	2,17	2,12	13,04	82,67
Kepulauan Riau	0,88	3,28	4,58	91,26
DKI Jakarta	4,58	3,18	14,77	77,47
Jawa Barat	10,12	16,57	26,48	46,84
Jawa Tengah	5,82	15,01	34,47	44,70
DI Yogyakarta	1,63	8,26	26,82	63,29
Jawa Timur	5,30	9,63	29,17	55,90
Banten	5,74	14,26	23,50	56,50
Bali	3,79	14,16	25,94	56,11
Nusa Tenggara Barat	10,52	6,43	22,67	60,37
Nusa Tenggara Timur	4,37	3,18	14,78	77,67
Kalimantan Barat	4,21	6,17	18,25	71,37
Kalimantan Tengah	4,63	2,75	11,00	81,62
Kalimantan Selatan	3,28	3,05	14,71	78,97
Kalimantan Timur	2,21	2,41	12,60	82,79
Sulawesi Utara	1,39	5,74	16,29	76,58
Sulawesi Tengah	0,83	3,13	14,41	81,63
Sulawesi Selatan	2,42	4,16	19,58	73,85
Sulawesi Tenggara	4,93	1,64	9,28	84,15
Gorontalo	4,51	6,24	20,08	69,18
Sulawesi Barat	3,77	2,56	15,34	78,33
Maluku	3,78	7,55	23,06	65,61
Maluku Utara	2,66	5,40	20,38	71,56
Papua Barat	6,84	1,49	9,48	82,19
Papua	7,83	5,63	14,85	71,69
<b>Indonesia</b>	<b>5,67</b>	<b>9,89</b>	<b>23,35</b>	<b>61,09</b>

**Tabel 3.2.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Lampu yang Menyala pada Siang Hari**

Provinsi	Banyaknya Lampu yang Menyala pada Siang Hari		
	Tidak Ada	Kurang dari Setengah Jumlah Lampu Terpasang	Lebih dari Setengah Jumlah Lampu Terpasang
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	90,06	9,07	0,87
Sumatera Utara	84,45	14,44	1,11
Sumatera Barat	87,60	11,35	1,05
Riau	83,35	15,36	1,29
Jambi	84,34	13,99	1,68
Sumatera Selatan	78,90	19,12	1,98
Bengkulu	90,06	8,69	1,25
Lampung	88,37	10,64	0,99
Kep. Bangka Belitung	82,31	16,50	1,19
Kepulauan Riau	77,60	20,33	2,07
DKI Jakarta	35,98	49,93	14,09
Jawa Barat	75,42	22,62	1,96
Jawa Tengah	88,39	10,82	0,79
DI Yogyakarta	86,09	12,08	1,83
Jawa Timur	88,56	10,43	1,01
Banten	67,75	29,42	2,82
Bali	90,57	7,92	1,52
Nusa Tenggara Barat	93,50	5,59	0,91
Nusa Tenggara Timur	95,73	3,61	0,66
Kalimantan Barat	88,47	11,17	0,36
Kalimantan Tengah	88,88	9,43	1,69
Kalimantan Selatan	84,81	13,76	1,43
Kalimantan Timur	79,74	19,40	0,85
Sulawesi Utara	85,32	13,38	1,31
Sulawesi Tengah	89,54	9,16	1,30
Sulawesi Selatan	85,38	12,53	2,09
Sulawesi Tenggara	88,25	9,37	2,38
Gorontalo	91,71	7,57	0,72
Sulawesi Barat	90,63	8,23	1,14
Maluku	83,73	12,76	3,51
Maluku Utara	89,60	8,89	1,51
Papua Barat	79,24	16,40	4,36
Papua	73,00	24,10	2,90
<b>Indonesia</b>	<b>81,92</b>	<b>16,16</b>	<b>1,93</b>

**Tabel 3.2.7. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Alat Elektronik Menurut Provinsi dan Jenis Alat Elektronik**

Provinsi	Jenis Alat Elektronik					
	Televisi	AC	Kipas angin/ Exhaust Fan	Komputer/ Laptop	Radio/Tape/ DVD	Pompa Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	80,20	6,42	57,75	13,43	31,30	36,33
Sumatera Utara	88,87	3,77	50,79	12,82	45,51	39,42
Sumatera Barat	87,13	1,90	42,00	19,55	47,89	29,32
Riau	92,34	9,56	73,64	19,99	51,01	49,29
Jambi	95,80	3,98	63,99	17,20	50,13	46,44
Sumatera Selatan	89,45	4,66	64,12	15,58	42,97	39,18
Bengkulu	87,93	4,15	34,39	18,64	40,49	42,95
Lampung	90,06	2,33	47,86	9,75	36,56	36,91
Kep. Bangka Belitung	91,89	10,96	71,16	20,64	55,22	60,57
Kepulauan Riau	95,02	30,58	87,44	35,93	66,72	21,04
DKI Jakarta	97,26	25,62	94,61	35,44	59,24	63,28
Jawa Barat	91,03	5,12	46,61	17,56	48,44	50,05
Jawa Tengah	89,57	2,15	46,31	13,27	47,83	39,38
DI Yogyakarta	87,63	3,57	54,32	31,08	47,85	49,27
Jawa Timur	86,52	2,79	54,28	14,72	48,66	46,11
Banten	90,26	10,63	64,58	19,06	44,20	56,09
Bali	92,47	8,79	55,61	25,79	52,84	20,90
Nusa Tenggara Barat	72,32	1,03	32,31	10,71	26,58	19,38
Nusa Tenggara Timur	50,59	2,01	16,75	15,67	27,57	7,36
Kalimantan Barat	91,45	6,46	61,56	15,28	43,63	50,55
Kalimantan Tengah	91,33	4,46	71,35	18,38	48,24	50,25
Kalimantan Selatan	91,80	5,98	75,89	21,45	49,11	46,67
Kalimantan Timur	93,82	11,46	86,08	29,92	49,76	24,79
Sulawesi Utara	84,85	5,81	36,19	22,79	43,59	30,48
Sulawesi Tengah	76,56	4,18	38,41	16,68	30,17	23,90
Sulawesi Selatan	85,58	5,81	51,97	21,67	31,59	42,71
Sulawesi Tenggara	76,23	5,37	43,46	18,66	29,51	22,19
Gorontalo	72,89	7,17	34,08	16,50	34,48	19,28
Sulawesi Barat	69,70	2,15	34,24	18,97	29,06	30,67
Maluku	79,81	6,46	33,74	21,10	45,75	11,87
Maluku Utara	73,66	4,68	34,11	17,30	32,20	16,79
Papua Barat	76,88	7,95	48,01	18,38	39,18	25,44
Papua	67,46	5,01	43,93	17,99	45,80	31,85
<b>Indonesia</b>	<b>88,11</b>	<b>5,56</b>	<b>53,63</b>	<b>17,52</b>	<b>46,08</b>	<b>42,85</b>

Lanjutan Tabel 3.2.7

Provinsi	Jenis Alat Elektronik					
	Setrika	Lemari Es	Dispenser	Magic Com/ Rice Cooker	Mesin Cuci Satu Tabung	Mesin Cuci Dua Tabung
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	76,39	48,61	49,69	69,95	9,33	7,05
Sumatera Utara	76,35	43,20	45,53	72,98	8,28	7,69
Sumatera Barat	81,38	47,50	38,72	76,90	7,55	17,26
Riau	75,67	51,34	46,52	67,40	14,31	21,56
Jambi	75,32	54,41	35,35	72,09	11,70	19,66
Sumatera Selatan	63,06	48,50	21,87	54,58	7,18	14,30
Bengkulu	65,68	50,28	36,89	67,42	9,25	17,38
Lampung	68,67	36,15	17,50	70,59	7,56	7,92
Kep. Bangka Belitung	69,11	71,73	47,87	78,60	8,53	33,88
Kepulauan Riau	86,14	66,88	60,25	81,65	24,37	27,84
DKI Jakarta	94,80	76,46	54,75	88,49	19,55	23,07
Jawa Barat	76,92	44,17	39,14	70,89	9,78	12,05
Jawa Tengah	66,34	32,39	16,13	65,86	6,26	7,27
DI Yogyakarta	73,21	35,20	26,42	59,69	11,68	10,04
Jawa Timur	63,09	34,75	10,11	60,53	6,27	6,30
Banten	77,84	57,95	33,49	75,26	13,26	13,93
Bali	68,95	48,93	16,48	57,51	12,05	5,51
Nusa Tenggara Barat	34,33	20,91	9,58	23,21	3,11	2,61
Nusa Tenggara Timur	39,89	22,12	19,83	27,50	3,10	4,54
Kalimantan Barat	46,16	46,95	26,42	54,05	7,51	8,99
Kalimantan Tengah	52,23	47,67	32,18	57,35	9,04	15,69
Kalimantan Selatan	59,60	55,95	33,09	61,40	12,15	18,62
Kalimantan Timur	79,77	71,68	39,29	65,32	17,01	37,24
Sulawesi Utara	75,35	52,04	51,60	62,21	11,85	13,10
Sulawesi Tengah	46,02	40,36	30,39	33,58	8,38	7,42
Sulawesi Selatan	53,00	55,65	32,09	38,64	11,34	9,80
Sulawesi Tenggara	40,47	42,70	34,45	37,41	9,96	11,66
Gorontalo	52,00	42,58	32,41	34,43	8,13	5,25
Sulawesi Barat	32,58	35,63	18,60	26,30	6,93	6,02
Maluku	60,65	38,32	31,60	39,76	5,49	7,87
Maluku Utara	53,42	32,70	34,26	42,87	7,90	8,29
Papua Barat	55,33	39,13	36,72	46,74	8,51	17,82
Papua	56,30	37,32	40,69	43,36	11,30	11,09
<b>Indonesia</b>	<b>68,72</b>	<b>43,51</b>	<b>28,70</b>	<b>64,06</b>	<b>9,17</b>	<b>11,11</b>

**Tabel 3.2.8. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Alat Elektronik dan Mempunyai Perilaku Kadang-kadang/ Sering Membiarkan Alat Elektronik Tetap Menyala Meski Tidak Digunakan Menurut Provinsi dan Jenis Alat Elektronik**

Provinsi	Televisi		AC		Kipas angin/ Exhaust Fan	
	Kadang-kadang	Sering	Kadang-kadang	Sering	Kadang-kadang	Sering
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	33,56	22,16	36,10	14,68	39,85	15,83
Sumatera Utara	25,27	32,95	30,20	30,07	32,41	25,77
Sumatera Barat	29,19	17,97	16,93	0,00	34,50	9,24
Riau	25,20	29,37	20,56	29,83	32,07	23,86
Jambi	30,43	12,52	20,72	5,69	28,74	4,11
Sumatera Selatan	26,56	13,29	33,12	9,76	25,03	9,63
Bengkulu	16,70	17,84	0,00	5,48	17,86	2,78
Lampung	28,03	20,06	35,40	7,83	34,61	11,93
Kep. Bangka Belitung	35,80	23,03	26,32	19,90	34,25	13,35
Kepulauan Riau	34,75	12,90	15,54	10,43	34,11	12,73
DKI Jakarta	29,09	18,77	36,73	6,98	33,16	18,49
Jawa Barat	31,91	22,05	26,88	15,79	35,85	11,75
Jawa Tengah	29,03	24,54	21,56	19,34	37,82	10,97
DI Yogyakarta	20,08	11,97	19,91	11,31	10,91	5,36
Jawa Timur	27,46	26,09	30,82	16,26	35,82	15,81
Banten	30,94	18,52	26,81	14,13	33,15	13,49
Bali	24,35	11,75	12,06	5,72	18,79	4,29
Nusa Tenggara Barat	30,17	16,81	64,52	0,00	32,25	7,77
Nusa Tenggara Timur	22,49	11,75	14,49	0,00	18,72	7,41
Kalimantan Barat	36,50	28,75	24,83	13,73	48,95	15,20
Kalimantan Tengah	30,62	26,21	41,56	12,96	36,39	17,95
Kalimantan Selatan	29,91	21,84	22,87	33,38	34,96	15,56
Kalimantan Timur	28,16	24,78	27,28	19,80	31,53	17,51
Sulawesi Utara	36,26	20,81	48,57	37,18	46,05	13,92
Sulawesi Tengah	22,37	18,22	9,92	22,42	23,85	13,74
Sulawesi Selatan	25,92	12,24	19,86	6,44	20,13	4,93
Sulawesi Tenggara	23,62	9,11	26,46	0,00	22,67	2,66
Gorontalo	16,83	17,85	21,85	22,88	22,37	14,23
Sulawesi Barat	22,92	3,35	0,00	0,00	15,28	1,22
Maluku	26,19	27,84	24,65	17,02	32,55	11,51
Maluku Utara	36,95	26,83	45,46	19,24	46,89	28,97
Papua Barat	26,44	38,47	23,78	17,40	33,90	32,48
Papua	22,79	30,04	25,97	26,73	25,50	24,82
<b>Indonesia</b>	<b>28,83</b>	<b>22,17</b>	<b>27,72</b>	<b>14,44</b>	<b>33,49</b>	<b>13,76</b>

Lanjutan Tabel 3.2.8

Provinsi	Komputer/Laptop		Radio/tape/DVD		Pompa Air	
	Kadang-kadang	Sering	Kadang-kadang	Sering	Kadang-kadang	Sering
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	30,98	11,66	42,28	6,19	22,23	13,11
Sumatera Utara	27,30	24,30	38,55	11,21	14,96	29,03
Sumatera Barat	21,15	10,36	34,33	6,81	19,08	12,36
Riau	23,02	19,90	33,08	8,12	17,15	20,99
Jambi	16,58	3,86	20,20	2,34	11,43	8,20
Sumatera Selatan	21,44	5,94	18,26	5,36	10,27	8,11
Bengkulu	6,70	6,53	17,64	3,79	8,75	6,21
Lampung	23,65	12,72	30,13	6,43	13,69	15,09
Kep. Bangka Belitung	16,87	13,25	36,99	4,85	18,21	12,59
Kepulauan Riau	15,38	7,97	22,23	8,87	16,80	21,00
DKI Jakarta	22,33	8,64	24,42	9,42	14,54	19,85
Jawa Barat	25,24	12,09	33,21	6,10	12,92	18,22
Jawa Tengah	17,88	16,14	35,37	11,09	11,17	20,10
DI Yogyakarta	10,21	7,77	10,03	4,28	7,66	8,65
Jawa Timur	20,78	15,55	36,58	11,04	13,01	19,58
Banten	19,41	6,46	28,92	4,43	12,93	13,51
Bali	16,29	6,84	27,42	4,35	5,76	8,21
Nusa Tenggara Barat	24,57	11,14	27,44	5,71	9,87	20,14
Nusa Tenggara Timur	12,94	5,10	21,20	6,29	9,19	7,62
Kalimantan Barat	27,51	9,97	38,98	8,82	22,55	19,48
Kalimantan Tengah	33,59	12,38	44,41	7,40	19,24	18,80
Kalimantan Selatan	22,67	17,74	31,52	7,10	15,42	17,01
Kalimantan Timur	15,95	12,09	28,78	3,29	16,22	19,07
Sulawesi Utara	35,54	21,23	48,60	5,61	15,60	35,86
Sulawesi Tengah	13,06	16,81	23,65	5,60	8,36	20,39
Sulawesi Selatan	15,18	8,21	20,73	6,01	8,51	6,28
Sulawesi Tenggara	10,38	4,47	25,86	1,20	11,29	3,06
Gorontalo	3,30	20,09	18,72	24,83	5,84	18,66
Sulawesi Barat	6,59	1,76	8,37	1,29	12,07	3,06
Maluku	11,80	35,66	34,93	13,26	18,19	7,29
Maluku Utara	17,51	6,22	38,29	16,19	16,11	29,07
Papua Barat	22,80	28,40	31,83	33,58	14,22	34,01
Papua	20,99	16,12	26,29	12,93	7,90	29,21
<b>Indonesia</b>	<b>20,93</b>	<b>12,57</b>	<b>32,10</b>	<b>8,22</b>	<b>13,13</b>	<b>17,83</b>

**Tabel 3.2.9. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki AC Menurut Provinsi dan Perilaku Menyalakan AC Dibawah 25°C**

Provinsi	Perilaku Menyalakan AC dibawah 25°C		
	Tidak Pernah	Kadang-kadang	Sering
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	21,29	54,65	24,06
Sumatera Utara	16,18	48,76	35,05
Sumatera Barat	21,09	50,13	28,78
Riau	10,24	28,94	60,83
Jambi	13,7	54,95	31,35
Sumatera Selatan	14,38	36,68	48,94
Bengkulu	21,82	44,35	33,83
Lampung	32,94	40,97	26,08
Kep. Bangka Belitung	20,62	49,55	29,83
Kepulauan Riau	21,09	27,92	50,99
DKI Jakarta	21,18	40,05	38,76
Jawa Barat	19,43	45,59	34,99
Jawa Tengah	26,04	39,6	34,36
DI Yogyakarta	45,69	30,59	23,71
Jawa Timur	29,71	42,7	27,59
Banten	26,31	39,68	34,02
Bali	37,69	37,59	24,72
Nusa Tenggara Barat	21,3	65,88	12,82
Nusa Tenggara Timur	31,11	28,62	40,27
Kalimantan Barat	33,01	36,14	30,85
Kalimantan Tengah	15,2	44,28	40,52
Kalimantan Selatan	19	52,8	28,2
Kalimantan Timur	20,74	44,16	35,1
Sulawesi Utara	15,81	47,71	36,48
Sulawesi Tengah	12,97	31,06	55,96
Sulawesi Selatan	16,5	35,56	47,94
Sulawesi Tenggara	15,78	40,76	43,47
Gorontalo	17,07	29,61	53,32
Sulawesi Barat	13,69	57,95	28,35
Maluku	33,76	20,57	45,67
Maluku Utara	36,1	24,14	39,76
Papua Barat	4,15	59,93	35,92
Papua	24,6	32,39	43,01
<b>Indonesia</b>	<b>22,23</b>	<b>40,99</b>	<b>36,78</b>

**Tabel 3.2.10. Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Pemakaian Listrik Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Listrik**

Provinsi	Rumah Tangga yang Mengurangi Pemakaian Listrik	Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Listrik		
		Penghematan Biaya	Peduli Lingkungan	Keterbatasan Daya/Pasokan Sumber Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	47,17	95,82	1,34	2,83
Sumatera Utara	45,16	95,68	1,56	2,76
Sumatera Barat	34,73	97,46	1,38	1,17
Riau	41,28	93,40	1,47	5,13
Jambi	29,98	94,04	1,70	4,26
Sumatera Selatan	38,63	89,11	1,40	9,49
Bengkulu	25,40	88,90	0,62	10,48
Lampung	34,20	94,01	0,63	5,36
Kep. Bangka Belitung	44,97	65,11	0,96	33,93
Kepulauan Riau	44,27	91,97	4,35	3,68
DKI Jakarta	51,65	95,35	3,21	1,44
Jawa Barat	41,75	95,04	1,74	3,22
Jawa Tengah	36,03	97,18	1,21	1,61
DI Yogyakarta	27,50	88,93	3,98	7,09
Jawa Timur	33,11	95,25	0,95	3,80
Banten	36,30	95,46	2,18	2,36
Bali	37,05	95,56	1,61	2,83
Nusa Tenggara Barat	38,04	87,27	0,91	11,82
Nusa Tenggara Timur	42,88	78,60	1,43	19,96
Kalimantan Barat	38,52	94,60	0,87	4,53
Kalimantan Tengah	43,67	90,72	3,01	6,27
Kalimantan Selatan	36,13	94,80	1,54	3,66
Kalimantan Timur	28,73	81,78	3,60	14,62
Sulawesi Utara	48,59	95,48	1,36	3,16
Sulawesi Tengah	34,56	93,47	0,41	6,12
Sulawesi Selatan	39,75	91,81	0,96	7,23
Sulawesi Tenggara	29,28	91,09	0,54	8,37
Gorontalo	63,20	96,25	0,54	3,21
Sulawesi Barat	16,37	72,59	1,70	25,72
Maluku	48,58	81,02	0,78	18,21
Maluku Utara	43,27	88,57	0,91	10,51
Papua Barat	26,47	74,36	1,06	24,59
Papua	33,33	88,70	0,63	10,67
<b>Indonesia</b>	<b>38,23</b>	<b>93,99</b>	<b>1,54</b>	<b>4,47</b>

**Tabel 3.2.11. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Kegiatan Memasak, dan Bahan Bakar Utama Memasak yang Digunakan**

Provinsi	Rumah Tangga yang Memasak	Bahan Bakar Utama Memasak						
		Listrik	Gas/Elpiji/ Gas Kota	Biogas	Minyak Tanah	Arang/ Briket	Kayu Bakar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	98,24	0,80	62,30	0,07	5,97	-	30,85	-
Sumatera Utara	99,24	1,12	60,92	0,01	7,67	-	30,21	0,06
Sumatera Barat	98,68	1,43	14,00	0,38	29,31	-	54,88	-
Riau	99,27	1,74	63,85	0,23	10,55	4,63	18,96	0,04
Jambi	99,04	0,15	50,30	0,02	9,65	5,85	33,97	0,05
Sumatera Selatan	99,72	0,93	69,14	0,08	2,27	0,40	27,18	-
Bengkulu	99,19	0,34	56,81	-	1,98	-	40,86	-
Lampung	99,37	0,19	47,14	0,10	0,36	0,07	52,11	0,03
Kep. Bangka Belitung	99,37	0,45	53,57	0,16	34,45	0,25	10,85	0,26
Kepulauan Riau	94,82	0,50	63,52	0,07	28,92	0,11	6,88	-
DKI Jakarta	95,01	1,16	95,38	-	3,46	-	-	-
Jawa Barat	98,14	0,85	75,53	0,02	0,44	0,04	23,09	0,02
Jawa Tengah	97,99	1,11	58,83	0,04	0,42	0,15	39,42	0,02
DI Yogyakarta	92,16	0,05	56,57	-	0,31	1,04	42,04	-
Jawa Timur	97,91	0,91	60,95	0,08	0,62	0,01	37,37	0,06
Banten	97,99	0,53	75,10	-	0,57	-	23,74	0,06
Bali	94,95	0,51	62,03	0,12	0,88	-	36,45	-
Nusa Tenggara Barat	99,11	0,54	29,67	0,11	17,20	-	52,42	0,06
Nusa Tenggara Timur	99,59	0,24	0,53	-	18,35	-	80,43	0,45
Kalimantan Barat	99,86	1,94	58,23	0,18	2,53	-	37,12	-
Kalimantan Tengah	99,57	0,29	9,47	-	42,73	-	47,51	-
Kalimantan Selatan	99,14	1,09	32,67	0,25	25,54	0,04	40,42	-
Kalimantan Timur	97,85	1,35	74,59	0,07	11,34	0,09	12,56	-
Sulawesi Utara	98,10	1,03	31,29	0,15	21,66	0,02	45,85	-
Sulawesi Tengah	99,47	0,30	3,43	0,11	27,78	5,40	62,98	-
Sulawesi Selatan	99,56	0,95	65,46	-	1,36	0,93	31,24	0,07
Sulawesi Tenggara	99,28	0,24	7,12	-	31,31	5,13	56,05	0,15
Gorontalo	99,93	0,57	30,94	-	15,84	-	52,64	-
Sulawesi Barat	99,69	0,69	39,46	-	2,40	0,60	56,74	0,11
Maluku	98,67	0,00	0,67	-	40,81	-	58,51	-
Maluku Utara	99,44	0,42	0,28	-	31,43	-	67,87	-
Papua Barat	98,40	0,57	2,05	0,05	48,03	-	49,31	-
Papua	99,54	0,16	0,56	0,02	25,35	-	73,67	0,24
<b>Indonesia</b>	<b>98,18</b>	<b>0,87</b>	<b>58,68</b>	<b>0,06</b>	<b>5,75</b>	<b>0,38</b>	<b>34,22</b>	<b>0,04</b>

**Tabel 3.2.12. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perilaku Menutup Panci Ketika Memasak**

Provinsi	Perilaku Menutup Panci Ketika Memasak		
	Tidak Pernah	Kadang-kadang	Sering
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6,17	42,96	50,87
Sumatera Utara	6,22	32,18	61,60
Sumatera Barat	11,16	51,67	37,17
Riau	8,08	39,57	52,35
Jambi	5,65	34,12	60,23
Sumatera Selatan	2,47	21,22	76,31
Bengkulu	5,08	37,87	57,05
Lampung	1,99	17,16	80,85
Kep. Bangka Belitung	6,80	28,13	65,07
Kepulauan Riau	8,21	26,94	64,85
DKI Jakarta	10,15	33,43	56,42
Jawa Barat	4,06	30,21	65,73
Jawa Tengah	2,72	17,71	79,57
DI Yogyakarta	5,01	31,18	63,81
Jawa Timur	2,55	16,09	81,36
Banten	6,07	32,09	61,84
Bali	1,89	24,02	74,10
Nusa Tenggara Barat	1,90	14,99	83,11
Nusa Tenggara Timur	2,57	9,89	87,53
Kalimantan Barat	3,91	25,49	70,60
Kalimantan Tengah	1,53	24,75	73,72
Kalimantan Selatan	4,74	39,24	56,02
Kalimantan Timur	4,80	35,18	60,02
Sulawesi Utara	2,65	23,37	73,97
Sulawesi Tengah	1,72	8,39	89,89
Sulawesi Selatan	3,87	22,25	73,88
Sulawesi Tenggara	3,79	17,86	78,35
Gorontalo	4,11	22,35	73,54
Sulawesi Barat	1,40	35,69	62,91
Maluku	3,96	16,61	79,43
Maluku Utara	5,39	22,64	71,97
Papua Barat	4,94	24,17	70,90
Papua	9,93	31,20	58,87
<b>Indonesia</b>	<b>4,21</b>	<b>25,26</b>	<b>70,53</b>

Ketersediaan sumber daya air di permukaan bumi terbatas jumlahnya. Pada musim kemarau misalnya, di beberapa daerah akan kekurangan air atau bahkan mengalami kelangkaan air. Hal ini berarti bahwa cadangan sumber daya air semakin menurun. Bertambahnya jumlah penduduk juga akan mengakibatkan cadangan sumber daya air akan menurun jika tidak dibarengi dengan revitalisasi sumber daya air.

Meski lebih dari 70 persen permukaan bumi adalah air, tetapi hanya sekitar 2,5 persen yang merupakan air tawar dan hanya 1 persen dari air tawar tersebut yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Ketersediaan air yang sangat terbatas tersebut mengharuskan pemanfaatan air secara efisien dan bijaksana. Rumah tangga sebagai salah satu konsumen air sangat membutuhkan air untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Kekurangan air akan berdampak buruk terhadap aktivitas manusia sehari-hari bahkan mengancam kehidupan manusia. Persentase rumah tangga menurut sumber air utama yang digunakan untuk keperluan sehari-hari rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 3.3.1.

Kebutuhan air oleh rumah tangga untuk keperluan sehari-hari terutama digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Dari Tabel 3.3.1 memperlihatkan bahwa dalam memenuhi keperluan sehari-hari tersebut, sebagian besar rumah tangga di Indonesia telah menggunakan air bersih (air yang bersumber dari air kemasan/air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung). Untuk keperluan minum, sebanyak 86,49 persen rumah tangga telah menggunakan air bersih dan jenis air yang paling banyak dikonsumsi adalah air kemasan/air isi ulang yang mencapai 29,98 persen rumah tangga. Sementara untuk keperluan memasak, sebanyak 84,47 persen rumah tangga menggunakan air bersih dan sumber air yang paling banyak digunakan adalah sumur terlindung (25,84 persen). Sementara sumber air yang digunakan untuk kebutuhan mandi, cuci baju, dan cuci kendaraan, sebagian besar rumah tangga menggunakan air yang bersumber dari sumur bor/pompa dan sumur terlindung.

**Tabel 3.3.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Keperluan Sehari-hari Rumah Tangga**

Sumber Air Utama	Jenis Keperluan Sehari-hari (%)				
	Minum	Masak	Mandi	Cuci Baju	Cuci Kendaraan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Air bersih</b>	<b>86,49</b>	<b>84,47</b>	<b>81,58</b>	<b>80,10</b>	<b>78,48</b>
a. Air kemasan/air isi ulang	29,98	5,45	-	-	-
b. Leding	10,22	17,63	16,34	15,81	14,87
c. Sumur bor/pompa	15,46	24,82	28,51	28,29	30,00
d. Sumur terlindung	20,70	25,84	27,07	26,45	25,80
e. Mata air terlindung	10,12	10,73	9,66	9,55	7,81
<b>Air tidak bersih</b>	<b>13,51</b>	<b>15,53</b>	<b>18,42</b>	<b>19,90</b>	<b>21,52</b>
f. Sumur tidak terlindung	5,73	6,75	7,64	7,43	6,34
g. Mata air tidak terlindung	2,84	2,98	2,84	2,89	2,18
h. Air sungai	1,99	2,37	6,72	8,27	11,09
i. Waduk/danau	0,08	0,11	0,23	0,23	0,63
j. Air hujan	2,87	3,31	0,99	1,08	1,28

Kebutuhan rumah tangga terhadap air cukup banyak, maka rumah tangga juga perlu melakukan konservasi pada sumber daya air. Salah satu bentuk kepedulian terhadap sumber daya air yang dapat dilakukan dalam skala kecil oleh rumah tangga adalah dengan menyediakan area resapan air. Area resapan air memiliki fungsi sebagai penampung dan penahan air hujan baik yang melalui atap rumah maupun yang langsung ke tanah, sehingga air hujan tidak langsung terbuang, namun meresap kembali ke tanah sebagai sumber air bersih. Hasil SPPLH 2013 mencatat bahwa persentase rumah tangga yang memiliki area resapan (sumur resapan, lubang resapan biopori, atau taman/tanah berumput) hanya sebesar 29,58 persen. Terbatasnya lahan pekarangan dan kurangnya pengetahuan responden tentang manfaat area resapan air menjadi penyebab kecilnya persentase rumah tangga yang mempunyai area resapan air. Persentase rumah tangga dengan keberadaan area resapan air di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tinggal di perkotaan yaitu sebesar 33,64 persen berbanding 25,45 persen (Grafik 3.3.1). Hal tersebut dimungkinkan karena rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan pada umumnya memiliki lahan pekarangan yang masih luas dan wilayah perumahan tidak sepadat di wilayah perkotaan.

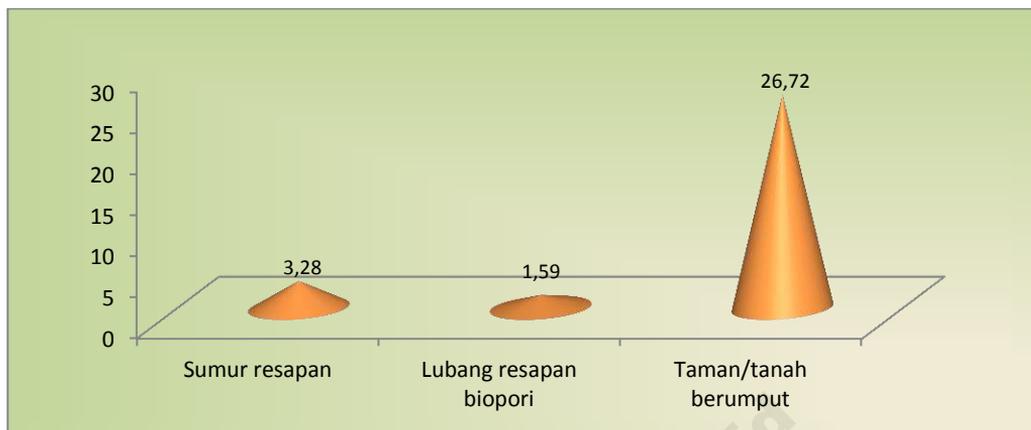
**Grafik 3.3.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Area Resapan dan Daerah Tempat Tinggal**



Pada umumnya perencanaan rancangan bangunan kurang memperhatikan aspek lingkungan khususnya resapan air. Lahan-lahan yang tidak terpakai untuk bangunan, khususnya di wilayah perkotaan, biasanya diperkeras dengan diiplester atau *paving block*, sehingga ketika musim hujan banyak lahan-lahan yang tergenang air atau bahkan terjadi banjir akibat berkurangnya lahan yang dapat menyerap air ke dalam tanah. Sedangkan pada musim kemarau cadangan air di dalam tanah semakin berkurang karena tidak ada air yang meresap ke dalam tanah, sehingga menyebabkan kekeringan atau kekurangan sumber air khususnya air tanah. Sumur resapan dan lubang resapan biopori merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Biopori adalah metode resapan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Peningkatan daya resap air pada tanah dilakukan dengan membuat lubang pada tanah dan menimbunnya dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Sampah organik yang ditimbunkan pada lubang ini kemudian dapat menghidupi fauna tanah, yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori dalam tanah.

Jenis area resapan air yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga adalah taman/tanah berumput yaitu sekitar 26,72 persen. Keberadaan taman/tanah berumput selain berguna untuk memperindah rumah/pekarangan, namun juga dapat menjadi area resapan air. Sementara rumah tangga yang memiliki sumur resapan dan lubang biopori masing-masing hanya sekitar 3,28 persen dan 1,59 persen (Grafik 3.3.2). Masih terbatasnya persentase rumah tangga yang memiliki sumur resapan dan lubang resapan biopori dimungkinkan karena rumah tangga belum menyadari pentingnya keberadaan sumur resapan dan lubang resapan biopori dimaksud. Disamping itu masih banyak juga rumah tangga yang tidak mengetahui apa itu lubang resapan biopori.

**Grafik 3.3.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Area Resapan Air Menurut Jenis Area Resapan Air**



Pada Tabel 3.3.6 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki sumur resapan masih sedikit persentasenya yaitu hanya sebesar 3,28 persen, dimana persentase tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (12,29 persen), diikuti Jawa Timur (5,38 persen), Sulawesi Utara (4,99 persen), dan Kalimantan Timur (4,16 persen). Sementara persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki lubang resapan biopori terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,66 persen, diikuti Provinsi DI Yogyakarta sebesar 4,27 persen. Untuk provinsi yang lain, persentase rumah tangga yang memiliki lubang resapan biopori masih dibawah angka 3 persen.

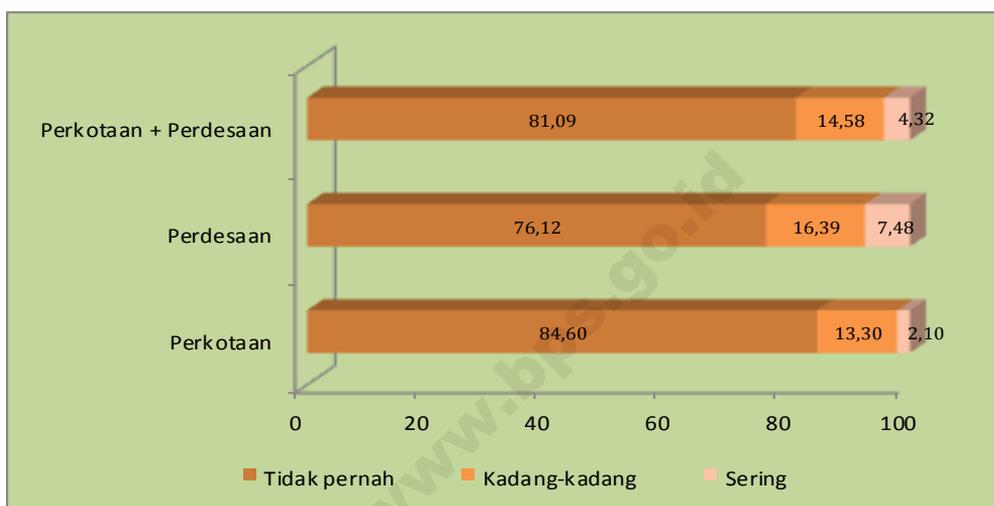
Selain menyediakan area resapan air, bentuk kepedulian rumah tangga terhadap sumber daya air adalah dengan melakukan perilaku hemat air. Implementasi perilaku hemat air diantaranya adalah dengan tidak membiarkan air mengalir tanpa digunakan sehingga air tidak terbuang percuma, mencuci peralatan tidak dengan air mengalir, memanfaatkan air bekas, dan menginvestasikan peralatan yang dapat menghemat air. Setitik air yang terbuang tiap detiknya akan menyebabkan hilangnya air sebanyak 2.400 galon (9.000 liter) per tahunnya<sup>1</sup>. Oleh karena itu, membiarkan air mengalir tanpa digunakan merupakan salah satu bentuk pemborosan terhadap air.

Dari Grafik 3.3.3 terlihat bahwa persentase rumah tangga yang tidak pernah membiarkan air mengalir tanpa digunakan tercatat sebanyak 81,09 persen. Rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan lebih berperilaku hemat air dalam hal tidak pernah membiarkan air mengalir tanpa digunakan yaitu sebesar 84,6 persen, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 76,12 persen.

<sup>1</sup> <http://yayasanhijau.wordpress.com/2008/03/24/untukmu-air/AIR>

Adapun rumah tangga yang menyatakan kadang-kadang membiarkan air mengalir tanpa digunakan tercatat sekitar 14,58 persen, dan sisanya sebesar 4,32 persen menyatakan sering membiarkan air mengalir tanpa digunakan. Rumah tangga di Provinsi Bali lebih ramah dalam hal tidak pernah membiarkan air mengalir tanpa digunakan yaitu mencapai 91,85 persen, diikuti Provinsi DKI Jakarta sebesar 89,62 persen, dan Sulawesi Utara sebesar 87,75 persen (Tabel 3.3.7).

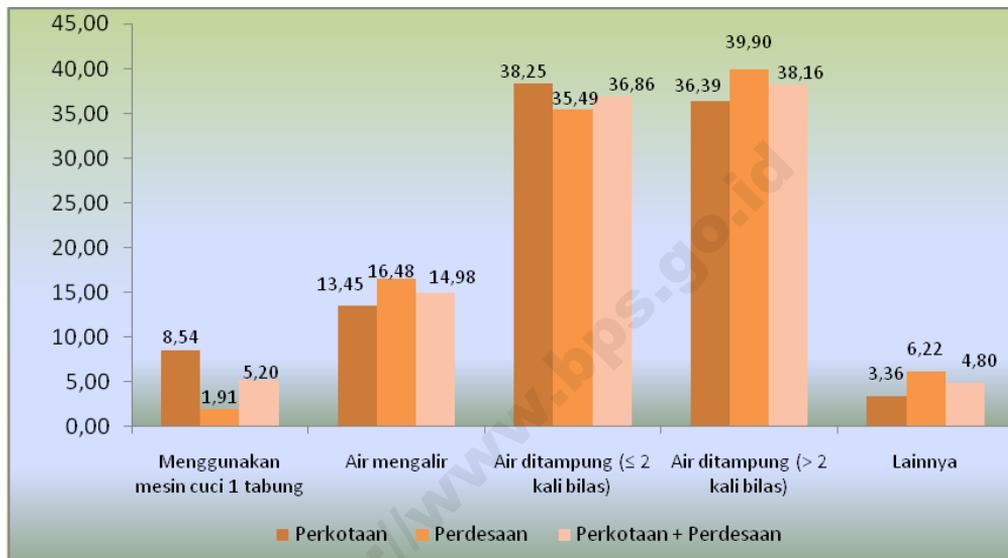
**Grafik 3.3.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Perilaku Membiarkan Air Kran Mengalir Meski Sedang Tidak Digunakan Menurut Daerah Tempat Tinggal**



Perilaku penghematan penggunaan air juga dapat dilakukan pada waktu mencuci pakaian, mencuci alat makan/minum ataupun mencuci sayuran/buah. Perilaku mencuci pakaian dilihat dari kebiasaan rumah tangga dalam cara membilas cucian pakaian. Mencuci dengan menggunakan mesin cuci satu tabung akan lebih menghemat penggunaan air, dimana mesin cuci satu tabung merupakan salah satu investasi peralatan yang dapat menghemat air. Hasil survei menunjukkan sebanyak 38,16 persen rumah tangga membilas cucian pakaian dengan menggunakan air ditampung dengan lebih dari dua kali bilas, 36,86 persen rumah tangga menggunakan air ditampung dengan maksimal dua kali bilas, 14,98 persen rumah tangga membilas dengan air mengalir dari kran/selang air, 5,2 persen rumah tangga menggunakan mesin cuci satu tabung, dan sisanya sebesar 4,8 persen membilas dengan cara lainnya (Grafik 3.3.4). Persentase terbesar rumah tangga yang menggunakan mesin cuci satu tabung terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 18,73 persen, diikuti Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,73 persen. Sementara untuk provinsi yang lain, persentasenya masih dibawah sepuluh persen (Tabel 3.3.8).

Untuk mencuci alat makan/minum dan mencuci sayuran/buah, persentase rumah tangga yang menggunakan air ditampung lebih tinggi daripada yang menggunakan air mengalir dari kran/selang yaitu masing-masing sebesar 63,10 persen dan 60,67 persen (Tabel 3.3.9). Cara mencuci dengan menggunakan air yang ditampung terlebih dahulu dalam suatu tempat relatif lebih menghemat air, karena volume air yang digunakan akan lebih terkontrol daripada menggunakan air mengalir dari kran/selang.

**Grafik 3.3.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Alat/Cara Membilas Cucian Pakaian dan Daerah Tempat Tinggal**



Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2011 tentang pedoman penggunaan sumber daya air, diantaranya mengatur mengenai pemanfaatan air bekas pakai (*greywater*). *Greywater* merupakan sisa air pembuangan yang biasanya berasal dari air bekas cucian, mandi, atau cuci piring. Contoh penggunaan air bekas adalah air bekas cucian bahan makanan/sayuran/buah untuk menyiram tanaman dan lainnya. Setidaknya 50-80 persen air yang dibuang adalah air yang berasal dari bekas cucian (pakaian dan piring) dan air bekas mandi, sehingga jika air tersebut bisa digunakan kembali, merupakan suatu bentuk penghematan penggunaan air sekaligus juga penghematan dalam pembayaran biaya penggunaan air ([www.keiben.co.cc](http://www.keiben.co.cc)).

Grafik 3.3.5 menunjukkan bahwa sebanyak 87,01 persen rumah tangga menyatakan tidak pernah sama sekali memanfaatkan air bekas, 8,98 persen rumah tangga menyatakan kadang-kadang, dan hanya 4 persen rumah tangga yang sering memanfaatkan air bekas untuk keperluan lain. Ternyata di daerah perkotaan maupun perdesaan kebiasaan rumah tangga dalam

memanfaatkan air bekas masih sangat kurang, dimana rumah tangga yang menyatakan kadang-kadang atau sering memanfaatkan air bekas untuk keperluan lain tercatat sebesar 14,66 persen di perkotaan dan 11,43 persen di pedesaan. Jika dilihat menurut provinsi, persentase tertinggi rumah tangga yang sering memanfaatkan air bekas untuk keperluan lain terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 29,28 persen (Tabel 3.3.10). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat di provinsi tersebut sudah lebih ramah terhadap penggunaan air, walaupun tidak diketahui apakah karena alasan perilaku peduli lingkungan atau karena keterbatasan pasokan air sehingga terpaksa menggunakan air bekas.

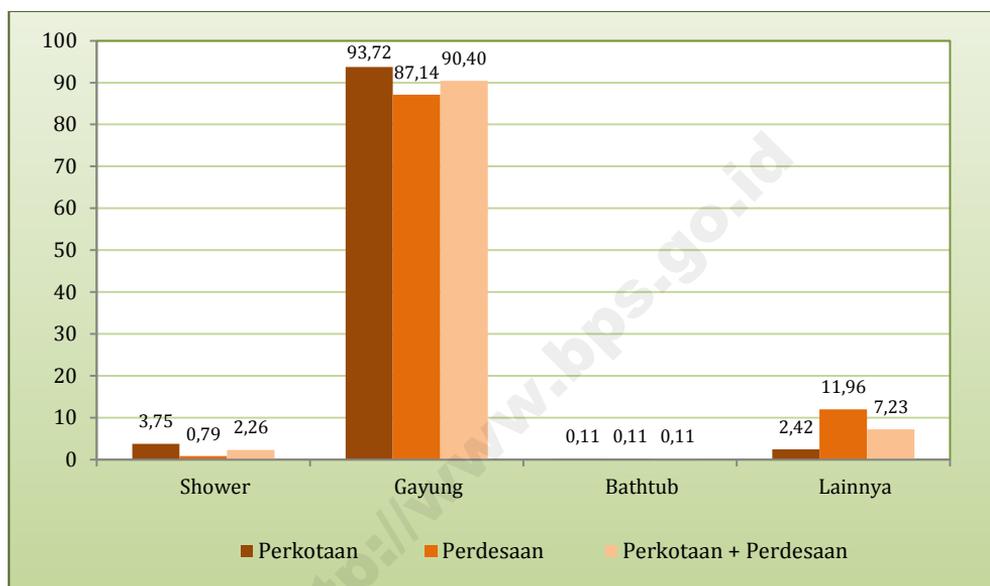
**Grafik 3.3.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Kebiasaan Memanfaatkan Air Bekas dan Daerah Tempat Tinggal**



Selain dari sisi penggunaan air, kepedulian rumah tangga terhadap lingkungan dalam hal pemanfaatan air juga dapat ditunjukkan dengan menginvestasikan peralatan yang dapat menghemat air, seperti penggunaan *shower* untuk mandi dan penggunaan *flush* untuk sistem penyiraman air pada kloset. Untuk fasilitas mandi yang digunakan, rumah tangga belum banyak yang memiliki peralatan mandi yang menghemat air. Sebagian besar rumah tangga masih menggunakan gayung untuk fasilitas mandi yaitu sebesar 90,40 persen, dimana rumah tangga yang tinggal di perkotaan lebih banyak yang menggunakan gayung daripada di pedesaan yaitu 93,72 persen berbanding 87,14 persen (Grafik 3.3.6). Sedangkan rumah tangga yang menggunakan *shower* untuk fasilitas mandi hanya sebesar 2,26 persen. Penggunaan *shower* oleh rumah tangga yang tinggal di perkotaan lebih besar dibandingkan rumah tangga yang tinggal di pedesaan yaitu 3,75 persen di perkotaan dan 0,79 persen di pedesaan. Mandi menggunakan *shower* akan lebih hemat air daripada menggunakan gayung, atau bahkan *bathtub*.

Di Provinsi DKI Jakarta, Bali dan Kepulauan Riau, persentase rumah tangga yang menggunakan shower sebagai fasilitas mandi lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain, yaitu berturut-turut sebesar 8,44 persen, 7,57 persen, dan 7,11 persen (Tabel 3.3.11). Sementara di provinsi yang lain penggunaan *shower* oleh rumah tangga masih dibawah angka 5 persen, bahkan di beberapa provinsi penggunaannya belum mencapai 1 persen rumah tangga seperti di Provinsi Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua.

**Grafik 3.3.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Mandi yang Digunakan dan Derah Tempat Tinggal**

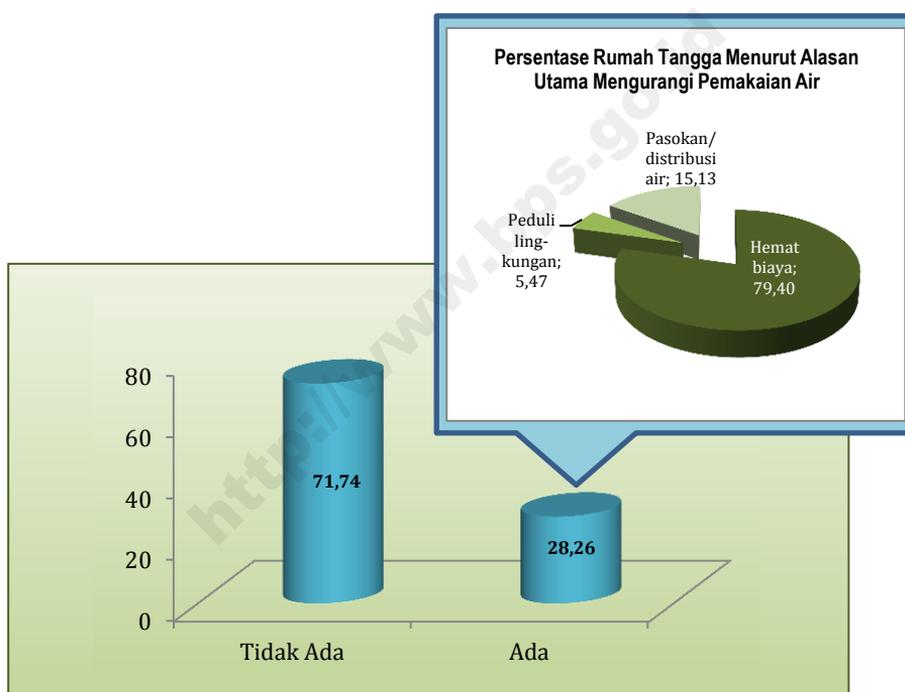


Terkait sistem penyiraman/pembilasan air pada kloset, penggunaan *flush* lebih menghemat air daripada penyiraman dengan cara manual. Namun rumah tangga yang menggunakan *flush* masih tergolong sedikit, yaitu diantara 63,68 persen rumah tangga yang pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik/SPAL, tercatat hanya 13,85 persen rumah tangga yang menggunakan *flush* (Tabel 3.3.12). Bahkan di beberapa provinsi penggunaan *flush* pada kloset yang digunakan masih dibawah 5 persen seperti di Provinsi Sulawesi Barat (1,40 persen), Maluku (4,64 persen), dan Provinsi Jambi (4,93 persen).

Kesadaran rumah tangga dalam rangka usaha mengurangi pemakaian air masih sangat kurang. Dari hasil survei tercatat sebesar 28,26 persen rumah tangga yang berusaha mengurangi pemakaian air selama setahun terakhir. Usaha mengurangi pemakaian air yang dimaksud tidak termasuk jika rumah tangga mengganti/mensubstitusi satu jenis sumber air dengan jenis sumber air

lainnya, seperti mengurangi pemakaian air leding dengan jalan menggunakan air pompa/air sumur. Diantara rumah tangga yang melakukan usaha mengurangi pemakaian air tersebut, masih sedikit rumah tangga yang mengurangi pemakaian air atau melakukan penghematan air atas dasar kepedulian terhadap lingkungan yaitu hanya sebesar 5,47 persen. Alasan utama rumah tangga mengurangi pemakaian air atau melakukan penghematan air tersebut cenderung disebabkan karena alasan/motif ekonomi atau penghematan biaya yaitu mencapai 79,40 persen, dan sisanya sebanyak 15,13 persen rumah tangga termotivasi mengurangi pemakaian air dengan alasan selain kedua motif di atas seperti keterbatasan pasokan air (Grafik 3.3.7).

**Grafik 3.3.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Usaha Mengurangi Pemakaian Air dan Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Air**



Secara aplikatif konservasi air dalam rumah tangga memerlukan komitmen masyarakat selaku konsumen atau pemakai air untuk mengubah perilaku pemakaian air yang tidak efisien menjadi perilaku pemakaian air yang efisien. Dalam konteks ini, faktor internal yang mendorong perubahan perilaku individu untuk mau melakukan efisiensi pemakaian air dalam rumah tangga adalah pertimbangan rasional tentang keuntungan yang akan diperoleh. Efisiensi pemakaian air dalam rumah tangga secara ekonomi akan menghemat biaya, waktu dan energi yang harus dikeluarkan untuk

memenuhi kebutuhan terhadap air. Sementara itu secara ekologis, konversi air akan menjaga keberlanjutan air dan keberlanjutan lingkungan pada umumnya. Namun seringkali tidak sejalan antara pengetahuan yang dimiliki dengan perilaku individu. Mengubah suatu kebiasaan/perilaku individu yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun atau bahkan sudah mendarah daging membutuhkan waktu yang sangat lama, motivasi yang kuat dan kedisiplinan tinggi. Oleh sebab itu dibutuhkan faktor pendorong yang sangat kuat, misalnya intervensi dari pemerintah, disamping itu juga dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung efisiensi pemakaian air.

<http://www.bps.go.id>

**Tabel 3.3.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum**

Provinsi	Sumber Air Minum				
	Air Kemasan/ Air Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tidak Terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	38,70	6,63	3,89	28,55	11,05
Sumatera Utara	35,42	11,33	17,54	11,72	6,59
Sumatera Barat	37,21	11,75	7,12	14,95	8,54
Riau	46,80	0,36	8,77	14,07	8,59
Jambi	29,75	6,60	3,50	27,91	12,22
Sumatera Selatan	23,46	13,37	6,79	33,77	8,88
Bengkulu	22,98	10,27	2,91	17,16	36,85
Lampung	16,74	2,86	6,67	41,57	23,01
Kep. Bangka Belitung	59,75	1,11	5,46	21,99	9,68
Kepulauan Riau	69,40	6,66	1,15	11,92	4,26
DKI Jakarta	70,72	13,44	15,06	0,60	0,11
Jawa Barat	36,13	6,27	19,80	18,18	5,15
Jawa Tengah	15,95	13,89	16,19	30,23	4,59
DI Yogyakarta	20,33	8,26	16,73	39,58	8,23
Jawa Timur	20,96	10,66	24,30	27,10	1,97
Banten	48,61	3,97	23,01	11,30	6,54
Bali	39,65	21,19	3,74	6,93	0,30
Nusa Tenggara Barat	16,87	13,46	9,98	39,48	2,22
Nusa Tenggara Timur	5,85	16,14	4,13	19,64	7,98
Kalimantan Barat	18,77	2,45	3,16	3,84	6,05
Kalimantan Tengah	29,44	8,46	12,18	9,44	4,85
Kalimantan Selatan	23,10	25,58	16,68	8,22	8,25
Kalimantan Timur	58,36	16,92	2,55	5,10	3,99
Sulawesi Utara	42,23	9,35	6,59	17,05	3,16
Sulawesi Tengah	19,40	11,66	10,82	13,70	6,21
Sulawesi Selatan	26,32	12,23	18,71	18,51	5,29
Sulawesi Tenggara	20,04	11,59	7,55	23,49	4,41
Gorontalo	21,11	17,96	9,94	29,79	6,64
Sulawesi Barat	17,58	11,40	7,46	21,47	9,70
Maluku	15,40	10,32	7,99	25,90	4,13
Maluku Utara	15,85	17,85	1,92	34,71	8,68
Papua Barat	23,91	9,73	4,64	11,56	3,82
Papua	17,59	3,64	2,86	3,57	5,02
<b>Indonesia</b>	<b>29,73</b>	<b>10,02</b>	<b>15,47</b>	<b>21,23</b>	<b>5,74</b>

Lanjutan Tabel 3.3.2

Provinsi	Sumber Air Minum				
	Mata Air Terlindung	Mata Air Tidak Terlindung	Air Sungai	Waduk/Danau	Air Hujan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	6,22	1,52	2,39	0,08	0,97
Sumatera Utara	7,95	3,38	3,09	0,19	2,78
Sumatera Barat	10,35	5,78	2,50	0,07	1,74
Riau	1,56	0,88	0,65	-	18,32
Jambi	1,67	1,13	6,01	-	11,20
Sumatera Selatan	2,71	1,14	4,56	-	5,31
Bengkulu	5,11	2,04	2,56	-	0,14
Lampung	4,93	3,27	0,57	-	0,38
Kep. Bangka Belitung	1,00	0,66			0,35
Kepulauan Riau	2,43	3,93	0,05	-	0,19
DKI Jakarta					0,08
Jawa Barat	9,63	4,22	0,56	-	0,06
Jawa Tengah	16,66	1,91	0,13	-	0,46
DI Yogyakarta	1,94	0,15			4,79
Jawa Timur	12,26	1,50	0,30	0,32	0,62
Banten	2,07	3,91	0,34	0,16	0,08
Bali	21,05	1,77	0,41	-	4,96
Nusa Tenggara Barat	14,45	0,85	2,68	-	
Nusa Tenggara Timur	30,70	7,87	4,73	0,16	2,81
Kalimantan Barat	7,95	3,60	13,67	0,06	40,46
Kalimantan Tengah	4,86	0,83	17,44	0,47	12,04
Kalimantan Selatan	1,34	1,02	13,45	0,36	2,00
Kalimantan Timur	2,06	0,83	4,45	0,10	5,64
Sulawesi Utara	18,66	1,43	0,73	0,23	0,57
Sulawesi Tengah	26,53	4,11	5,95	0,07	1,57
Sulawesi Selatan	11,35	4,48	1,17	-	1,93
Sulawesi Tenggara	20,86	6,17	0,58	-	5,31
Gorontalo	8,65	1,25	4,65	-	
Sulawesi Barat	10,69	8,46	11,65	-	1,59
Maluku	25,63	4,31	3,57	0,11	2,63
Maluku Utara	8,91	3,18	4,10	-	4,80
Papua Barat	7,42	0,61	17,02	-	21,30
Papua	7,90	25,61	10,68	0,12	23,01
<b>Indonesia</b>	<b>10,09</b>	<b>2,94</b>	<b>1,92</b>	<b>0,09</b>	<b>2,75</b>

**Tabel 3.3.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Memasak**

Provinsi	Sumber Air Memasak				
	Air Kemasan/ Air Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tidak Terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5,17	13,88	7,58	45,12	12,45
Sumatera Utara	5,33	20,26	26,94	19,44	7,91
Sumatera Barat	4,21	23,41	12,25	22,95	11,03
Riau	14,10	1,85	21,91	24,39	12,23
Jambi	5,25	13,87	4,94	36,38	15,47
Sumatera Selatan	5,48	20,26	8,30	39,99	9,90
Bengkulu	3,91	14,95	5,55	21,77	42,11
Lampung	1,53	3,93	11,12	47,91	25,32
Kep. Bangka Belitung	11,30	3,26	16,91	46,03	17,15
Kepulauan Riau	23,27	33,94	2,34	20,24	5,76
DKI Jakarta	13,04	39,93	40,54	1,31	0,11
Jawa Barat	6,78	11,30	35,75	22,44	5,81
Jawa Tengah	2,82	16,68	20,11	33,67	5,22
DI Yogyakarta	2,80	11,75	18,00	44,51	8,23
Jawa Timur	2,57	17,06	30,36	29,82	2,17
Banten	13,67	8,59	45,98	15,11	7,63
Bali	5,47	39,75	13,48	11,82	0,52
Nusa Tenggara Barat	0,57	17,55	12,77	47,42	2,55
Nusa Tenggara Timur	0,57	18,66	4,85	21,14	8,05
Kalimantan Barat	5,73	3,91	5,39	5,36	6,80
Kalimantan Tengah	3,78	16,71	20,35	13,77	6,29
Kalimantan Selatan	2,66	34,32	19,77	10,32	10,05
Kalimantan Timur	11,39	48,39	6,63	7,71	5,45
Sulawesi Utara	3,13	18,97	22,15	26,19	3,96
Sulawesi Tengah	4,19	15,73	16,33	16,76	6,62
Sulawesi Selatan	3,87	21,01	25,61	22,64	5,76
Sulawesi Tenggara	3,28	16,84	11,94	27,05	5,64
Gorontalo	2,31	23,26	15,65	36,05	7,54
Sulawesi Barat	3,85	16,35	10,27	25,26	10,23
Maluku	2,76	16,00	11,61	28,43	4,58
Maluku Utara	0,33	25,46	4,29	38,21	9,67
Papua Barat	8,56	14,81	6,16	15,32	3,96
Papua	7,13	5,76	5,28	5,38	5,41
<b>Indonesia</b>	<b>5,41</b>	<b>16,88</b>	<b>24,28</b>	<b>25,81</b>	<b>6,63</b>

Lanjutan Tabel 3.3.3

Provinsi	Sumber Air Memasak				
	Mata Air Terlindung	Mata Air Tidak Terlindung	Air Sungai	Waduk/Danau	Air Hujan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	7,97	1,78	2,55	0,49	1,24
Sumatera Utara	8,89	3,49	3,55	0,21	3,22
Sumatera Barat	12,37	6,60	3,24	0,12	2,51
Riau	1,66	0,83	0,81	0,09	21,40
Jambi	1,88	1,15	7,59	-	12,52
Sumatera Selatan	2,64	1,16	6,69	-	5,31
Bengkulu	5,27	2,43	2,69	-	0,51
Lampung	4,90	3,31	0,57	-	0,78
Kep. Bangka Belitung	2,27	1,03	-	0,17	1,25
Kepulauan Riau	2,67	5,42	0,09	-	1,08
DKI Jakarta					0,08
Jawa Barat	10,93	4,30	0,77	-	0,06
Jawa Tengah	16,86	1,90	0,13	0,02	0,58
DI Yogyakarta	1,94	0,15	-	-	4,79
Jawa Timur	12,80	1,48	0,43	0,26	0,94
Banten	2,25	3,91	0,44	0,34	0,08
Bali	16,64	1,54	0,41	-	5,33
Nusa Tenggara Barat	14,95	0,45	2,84	-	-
Nusa Tenggara Timur	30,97	7,95	4,73	0,16	2,50
Kalimantan Barat	8,18	3,84	14,40	0,06	46,19
Kalimantan Tengah	4,62	1,06	20,59	0,89	11,50
Kalimantan Selatan	1,46	1,53	16,09	0,67	2,27
Kalimantan Timur	2,23	0,89	6,13	0,18	8,84
Sulawesi Utara	20,48	1,41	0,77	0,42	0,62
Sulawesi Tengah	27,08	4,64	6,54	-	1,57
Sulawesi Selatan	12,20	4,94	1,49	-	2,04
Sulawesi Tenggara	22,78	6,62	0,58	-	4,56
Gorontalo	8,34	1,25	5,52	-	-
Sulawesi Barat	11,03	9,90	11,32	-	1,48
Maluku	25,03	3,78	3,64	0,11	2,75
Maluku Utara	9,65	3,99	4,10	-	3,73
Papua Barat	8,69	0,70	16,94	-	23,28
Papua	9,01	25,41	11,87	0,16	24,11
<b>Indonesia</b>	<b>10,62</b>	<b>3,03</b>	<b>2,26</b>	<b>0,12</b>	<b>3,14</b>

**Tabel 3.3.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Mandi**

Provinsi	Sumber Air Mandi				
	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tidak Terlindung	Mata Air Terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	12,73	8,63	50,02	13,54	7,52
Sumatera Utara	20,08	28,75	20,10	8,24	7,32
Sumatera Barat	23,46	13,20	22,67	11,38	11,13
Riau	5,16	27,92	32,60	20,48	1,23
Jambi	15,13	9,69	35,78	19,32	0,76
Sumatera Selatan	18,92	8,41	37,74	10,92	2,52
Bengkulu	15,99	5,72	21,76	40,51	4,56
Lampung	3,19	11,39	49,03	25,64	4,39
Kep. Bangka Belitung	4,94	17,17	41,84	19,22	2,54
Kepulauan Riau	57,09	2,47	23,33	6,80	2,78
DKI Jakarta	37,56	59,62	2,72	0,11	
Jawa Barat	10,92	42,09	23,08	5,85	10,71
Jawa Tengah	14,00	22,37	37,78	5,38	16,07
DI Yogyakarta	15,06	22,25	47,18	7,80	2,33
Jawa Timur	15,05	34,03	31,58	2,31	10,45
Banten	7,34	60,43	16,58	7,40	2,01
Bali	41,03	18,29	12,32	0,49	15,83
Nusa Tenggara Barat	14,49	12,20	45,74	2,71	12,28
Nusa Tenggara Timur	16,99	5,16	20,67	7,80	28,26
Kalimantan Barat	11,50	6,83	7,64	23,84	5,10
Kalimantan Tengah	15,28	22,03	12,67	8,80	3,07
Kalimantan Selatan	29,25	16,99	10,46	11,02	1,03
Kalimantan Timur	53,07	10,01	9,49	7,27	2,74
Sulawesi Utara	18,82	25,08	27,10	5,17	18,79
Sulawesi Tengah	16,25	18,06	16,59	6,76	26,38
Sulawesi Selatan	18,43	28,35	25,15	7,40	11,95
Sulawesi Tenggara	17,08	14,80	27,29	6,73	22,05
Gorontalo	19,00	16,68	38,84	6,11	7,63
Sulawesi Barat	12,63	12,05	27,67	15,70	10,99
Maluku	15,28	14,27	28,40	6,74	23,17
Maluku Utara	23,26	4,38	40,54	10,55	7,08
Papua Barat	14,04	13,07	19,95	13,30	10,53
Papua	5,31	7,43	10,70	9,72	5,76
<b>Indonesia</b>	<b>16,13</b>	<b>28,53</b>	<b>27,46</b>	<b>7,54</b>	<b>9,64</b>

Lanjutan Tabel 3.3.4

Provinsi	Sumber Air Mandi			
	Mata Air Tidak Terlindung	Air Sungai	Waduk/Danau	Air Hujan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1,16	5,43	0,52	0,45
Sumatera Utara	2,71	10,82	0,24	1,74
Sumatera Barat	6,08	9,97	0,20	1,92
Riau	1,76	9,38	0,46	1,01
Jambi	1,28	17,09	0,26	0,70
Sumatera Selatan	0,98	19,76	0,10	0,64
Bengkulu	2,21	8,97	-	0,28
Lampung	3,85	2,48	-	0,02
Kep. Bangka Belitung	4,78	8,57	0,93	-
Kepulauan Riau	6,29	0,23	-	1,01
DKI Jakarta				
Jawa Barat	4,27	2,80	0,22	0,06
Jawa Tengah	2,41	1,50	0,02	0,47
DI Yogyakarta	0,15	0,28	-	4,96
Jawa Timur	1,34	4,22	0,16	0,85
Banten	3,51	1,99	0,64	0,08
Bali	1,56	5,16	-	5,33
Nusa Tenggara Barat	0,72	11,61	0,09	0,16
Nusa Tenggara Timur	5,94	12,27	0,37	2,54
Kalimantan Barat	4,39	38,22	0,07	2,42
Kalimantan Tengah	0,52	36,22	1,10	0,31
Kalimantan Selatan	1,01	28,32	1,27	0,65
Kalimantan Timur	0,83	10,74	0,64	5,21
Sulawesi Utara	1,51	1,90	0,97	0,68
Sulawesi Tengah	5,56	9,60	0,73	0,07
Sulawesi Selatan	4,83	3,08	0,13	0,68
Sulawesi Tenggara	6,49	1,38	-	4,17
Gorontalo	2,04	9,71	-	-
Sulawesi Barat	9,86	11,11	-	-
Maluku	2,98	6,06	0,11	2,98
Maluku Utara	3,42	7,54	-	3,22
Papua Barat	1,92	20,69	0,17	6,33
Papua	19,71	33,77	0,86	6,74
<b>Indonesia</b>	<b>2,95</b>	<b>6,56</b>	<b>0,23</b>	<b>0,96</b>

**Tabel 3.3.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Cuci Baju**

Provinsi	Sumber Air Cuci Baju				
	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tidak Terlindung	Mata Air Terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	12,21	8,78	48,63	13,21	7,37
Sumatera Utara	19,63	28,51	19,48	7,85	7,28
Sumatera Barat	22,98	12,87	22,22	10,97	10,73
Riau	5,16	27,17	31,51	19,46	1,19
Jambi	14,71	9,91	35,59	18,82	0,76
Sumatera Selatan	18,55	8,46	37,20	10,70	2,58
Bengkulu	15,69	5,82	21,84	39,97	4,72
Lampung	3,19	10,96	48,29	25,34	4,37
Kep. Bangka Belitung	4,84	16,70	39,98	17,92	2,26
Kepulauan Riau	57,15	2,47	23,41	6,60	2,78
DKI Jakarta	36,24	60,62	2,72	0,11	
Jawa Barat	10,58	41,52	22,36	5,52	10,81
Jawa Tengah	13,18	21,89	37,06	5,26	15,96
DI Yogyakarta	14,63	21,18	45,00	7,76	2,46
Jawa Timur	14,26	33,66	30,58	2,26	10,22
Banten	7,21	60,20	15,12	7,46	1,85
Bali	37,53	17,66	11,41	0,45	15,11
Nusa Tenggara Barat	13,88	11,82	45,08	2,71	11,82
Nusa Tenggara Timur	16,40	5,08	20,05	7,61	28,02
Kalimantan Barat	11,38	6,65	7,46	23,43	4,46
Kalimantan Tengah	15,36	21,60	12,29	8,85	3,03
Kalimantan Selatan	28,76	16,85	10,50	10,89	1,39
Kalimantan Timur	52,57	9,29	9,41	7,25	2,64
Sulawesi Utara	18,38	24,94	26,48	5,03	18,26
Sulawesi Tengah	15,71	17,48	16,46	6,87	25,94
Sulawesi Selatan	17,48	28,50	25,47	7,45	11,86
Sulawesi Tenggara	16,54	14,93	26,90	6,69	22,68
Gorontalo	18,06	16,83	38,12	5,85	7,05
Sulawesi Barat	12,40	11,93	27,67	15,11	10,68
Maluku	14,95	13,70	26,93	6,78	18,40
Maluku Utara	20,34	4,17	38,68	10,37	7,00
Papua Barat	13,98	12,93	20,34	13,34	10,76
Papua	5,22	7,52	10,53	9,36	5,39
<b>Indonesia</b>	<b>15,53</b>	<b>28,22</b>	<b>26,75</b>	<b>7,34</b>	<b>9,52</b>

Lanjutan Tabel 3.3.5

Provinsi	Sumber Air Cuci Baju			
	Mata Air Tidak Terlindung	Air Sungai	Waduk/Danau	Air Hujan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1,21	7,40	0,52	0,39
Sumatera Utara	2,74	12,42	0,24	1,75
Sumatera Barat	5,88	12,21	0,23	1,86
Riau	1,11	8,50	0,46	4,89
Jambi	1,11	17,40	0,23	1,29
Sumatera Selatan	1,10	20,78	0,11	0,39
Bengkulu	2,21	9,36	-	0,37
Lampung	3,90	3,80	-	0,04
Kep. Bangka Belitung	5,69	10,82	1,51	-
Kepulauan Riau	6,08	0,22	-	1,09
DKI Jakarta				0,00
Jawa Barat	4,64	4,10	0,22	0,14
Jawa Tengah	2,48	3,36	0,02	0,47
DI Yogyakarta	0,15	0,95	-	4,85
Jawa Timur	1,37	6,34	0,18	0,90
Banten	3,56	3,88	0,64	0,08
Bali	1,14	9,61	-	5,47
Nusa Tenggara Barat	0,79	13,70	-	0,16
Nusa Tenggara Timur	5,99	13,78	0,40	2,55
Kalimantan Barat	4,12	40,24	0,07	1,80
Kalimantan Tengah	0,52	36,58	1,10	0,39
Kalimantan Selatan	1,01	28,58	1,31	0,65
Kalimantan Timur	0,83	11,01	0,64	6,37
Sulawesi Utara	1,57	3,53	0,97	0,74
Sulawesi Tengah	5,56	11,00	0,73	-
Sulawesi Selatan	4,86	3,63	0,16	0,58
Sulawesi Tenggara	6,51	1,88	-	3,81
Gorontalo	2,12	11,40	-	-
Sulawesi Barat	9,55	12,46	-	-
Maluku	3,20	13,15	0,11	2,78
Maluku Utara	3,66	12,39	0,18	3,22
Papua Barat	1,96	20,64	0,17	5,87
Papua	19,05	36,55	0,99	5,39
<b>Indonesia</b>	<b>3,01</b>	<b>8,08</b>	<b>0,24</b>	<b>1,06</b>

**Tabel 3.3.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Area Resapan Air**

Provinsi	Jenis Area Resapan Air		
	Sumur resapan	Lubang resapan biopori	Taman/tanah berumput
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2,39	1,34	35,98
Sumatera Utara	2,45	1,87	24,68
Sumatera Barat	3,83	0,65	31,36
Riau	2,58	0,69	31,81
Jambi	3,56	0,90	32,85
Sumatera Selatan	2,96	1,30	37,20
Bengkulu	1,22	0,43	50,90
Lampung	3,34	0,98	30,02
Kep. Bangka Belitung	4,10	2,79	28,88
Kepulauan Riau	0,37	0,74	17,91
DKI Jakarta	2,41	4,66	8,09
Jawa Barat	3,19	1,18	21,88
Jawa Tengah	2,54	1,36	25,96
DI Yogyakarta	12,29	4,27	24,22
Jawa Timur	5,38	1,73	20,89
Banten	1,85	2,31	24,74
Bali	1,40	1,59	66,30
Nusa Tenggara Barat	1,04	1,01	40,16
Nusa Tenggara Timur	2,50	0,79	35,68
Kalimantan Barat	3,72	1,65	45,62
Kalimantan Tengah	3,64	2,47	40,53
Kalimantan Selatan	1,98	1,20	23,37
Kalimantan Timur	4,16	2,88	27,20
Sulawesi Utara	4,99	2,77	30,12
Sulawesi Tengah	1,83	1,73	42,36
Sulawesi Selatan	2,04	1,23	27,66
Sulawesi Tenggara	4,02	0,67	33,85
Gorontalo	2,48	1,55	46,15
Sulawesi Barat	0,46	0,44	54,78
Maluku	1,01	1,05	18,74
Maluku Utara	0,42	1,10	24,76
Papua Barat	1,94	0,07	26,00
Papua	2,12	1,20	31,44
<b>Indonesia</b>	<b>3,28</b>	<b>1,59</b>	<b>26,72</b>

**Tabel 3.3.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Keberadaan Instalasi Air di Dalam Rumah dan Perilaku Membiarkan Air Kran Mengalir Meski Sedang Tidak Digunakan**

Provinsi	Persentase rumahtangga yang menggunakan instalasi air di dalam rumah	Perilaku membiarkan air kran mengalir meski sedang tidak digunakan		
		Tidak pernah	Kadang-kadang	Sering
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	49,87	69,36	25,37	5,26
Sumatera Utara	62,80	83,24	13,39	3,37
Sumatera Barat	58,95	77,83	15,62	6,54
Riau	50,31	85,78	12,72	1,49
Jambi	62,98	85,02	12,87	2,11
Sumatera Selatan	53,35	82,26	15,04	2,70
Bengkulu	47,31	82,20	12,97	4,83
Lampung	45,85	81,05	11,35	7,60
Kep. Bangka Belitung	70,52	63,36	34,81	1,83
Kepulauan Riau	83,14	88,60	9,83	1,57
DKI Jakarta	86,61	89,62	8,96	1,42
Jawa Barat	72,88	77,65	15,26	7,09
Jawa Tengah	71,79	80,17	14,64	5,19
DI Yogyakarta	79,84	80,67	17,26	2,07
Jawa Timur	69,60	83,45	14,00	2,56
Banten	72,12	79,70	17,65	2,65
Bali	85,58	91,85	6,87	1,27
Nusa Tenggara Barat	46,96	86,47	12,02	1,50
Nusa Tenggara Timur	28,82	79,80	16,15	4,05
Kalimantan Barat	51,68	78,29	18,87	2,84
Kalimantan Tengah	64,74	85,59	13,24	1,16
Kalimantan Selatan	76,95	76,49	20,89	2,62
Kalimantan Timur	76,97	81,17	16,55	2,27
Sulawesi Utara	65,51	87,75	9,55	2,70
Sulawesi Tengah	67,30	82,83	12,93	4,24
Sulawesi Selatan	77,16	79,01	13,58	7,40
Sulawesi Tenggara	54,64	82,28	11,29	6,43
Gorontalo	51,57	84,88	12,97	2,15
Sulawesi Barat	61,28	67,74	18,16	14,11
Maluku	46,65	74,96	21,06	3,98
Maluku Utara	49,36	70,63	25,79	3,58
Papua Barat	45,77	80,99	11,49	7,52
Papua	27,92	66,17	22,93	10,90
<b>Indonesia</b>	<b>66,89</b>	<b>81,09</b>	<b>14,58</b>	<b>4,32</b>

**Tabel 3.3.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Alat/Cara Membilas Cucian pakaian**

Provinsi	Mesin cuci 1 tabung	Air mengalir	Air ditampung ( $\leq 2$ kali bilas)	Air ditampung ( $> 2$ kali bilas)	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5,10	14,03	27,74	44,87	8,26
Sumatera Utara	5,08	11,35	38,16	37,19	8,23
Sumatera Barat	3,33	13,47	35,55	40,91	6,73
Riau	6,99	7,90	40,70	40,82	3,59
Jambi	6,23	8,20	32,84	44,18	8,55
Sumatera Selatan	3,77	10,97	33,78	41,81	9,68
Bengkulu	4,78	8,16	37,71	43,94	5,42
Lampung	3,70	7,82	38,10	48,79	1,59
Kep. Bangka Belitung	5,58	9,85	43,29	30,92	10,36
Kepulauan Riau	18,73	2,74	31,84	45,08	1,61
DKI Jakarta	10,73	20,25	47,44	20,27	1,31
Jawa Barat	5,73	18,45	38,67	34,66	2,48
Jawa Tengah	3,71	17,35	37,87	38,70	2,37
DI Yogyakarta	8,88	7,10	31,95	46,84	5,23
Jawa Timur	3,72	17,36	35,18	38,79	4,94
Banten	7,70	10,67	44,73	35,02	1,89
Bali	7,95	6,88	37,67	36,14	11,35
Nusa Tenggara Barat	1,98	18,01	34,71	42,92	2,38
Nusa Tenggara Timur	0,49	16,55	23,67	53,18	6,10
Kalimantan Barat	2,53	16,45	39,04	25,36	16,62
Kalimantan Tengah	4,45	10,98	34,38	28,25	21,93
Kalimantan Selatan	6,58	13,71	39,35	26,51	13,85
Kalimantan Timur	11,31	7,69	39,10	37,87	4,03
Sulawesi Utara	7,18	15,26	31,00	44,38	2,19
Sulawesi Tengah	5,19	15,35	32,99	43,18	3,29
Sulawesi Selatan	7,07	7,25	34,70	49,37	1,61
Sulawesi Tenggara	2,60	5,43	43,01	46,40	2,56
Gorontalo	5,76	9,83	33,13	47,95	3,33
Sulawesi Barat	3,88	15,00	17,08	60,96	3,08
Maluku	2,61	12,01	18,64	58,92	7,81
Maluku Utara	4,30	9,11	20,69	57,97	7,94
Papua Barat	2,19	14,36	27,64	46,80	9,00
Papua	1,43	35,98	23,84	17,32	21,43
<b>Indonesia</b>	<b>5,20</b>	<b>14,98</b>	<b>36,86</b>	<b>38,16</b>	<b>4,80</b>

**Tabel 3.3.9. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Cara Penggunaan Air Untuk Mencuci Alat Makan/Minum dan Sayuran/Buah**

Provinsi	Alat makan/minum		Sayuran/buah	
	Air mengalir	Air ditampung	Air mengalir	Air ditampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	20,60	79,40	25,53	74,03
Sumatera Utara	20,95	79,05	21,04	78,96
Sumatera Barat	25,57	74,43	26,21	73,79
Riau	35,29	64,71	35,00	65,00
Jambi	16,10	83,90	16,13	83,87
Sumatera Selatan	18,78	81,22	18,28	80,69
Bengkulu	17,03	82,97	18,08	81,92
Lampung	29,37	70,63	32,88	67,12
Kep. Bangka Belitung	21,72	78,28	21,38	78,62
Kepulauan Riau	55,96	44,04	49,29	48,56
DKI Jakarta	47,88	52,12	50,67	49,26
Jawa Barat	48,81	51,19	49,64	50,34
Jawa Tengah	41,43	58,57	44,58	55,29
DI Yogyakarta	47,24	52,76	48,29	51,71
Jawa Timur	36,80	63,20	43,16	56,80
Banten	47,26	52,74	48,52	51,48
Bali	41,41	58,59	39,08	60,75
Nusa Tenggara Barat	32,43	67,57	35,14	64,84
Nusa Tenggara Timur	12,53	87,47	14,04	85,86
Kalimantan Barat	12,46	87,54	13,60	86,31
Kalimantan Tengah	18,54	81,46	19,23	80,77
Kalimantan Selatan	32,13	67,87	39,86	60,14
Kalimantan Timur	28,01	71,99	32,29	67,71
Sulawesi Utara	22,83	77,17	22,37	77,63
Sulawesi Tengah	23,23	76,77	24,51	75,49
Sulawesi Selatan	16,69	83,31	17,11	82,82
Sulawesi Tenggara	9,01	90,99	6,06	93,94
Gorontalo	18,01	81,99	18,85	81,15
Sulawesi Barat	22,55	77,45	23,39	76,61
Maluku	13,28	86,72	12,99	87,01
Maluku Utara	11,91	88,09	21,34	78,66
Papua Barat	22,06	77,94	22,23	77,65
Papua	35,59	64,41	39,39	60,61
<b>Indonesia</b>	<b>36,90</b>	<b>63,10</b>	<b>39,23</b>	<b>60,67</b>

**Tabel 3.3.10. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kebiasaan Memanfaatkan Air Bekas untuk Keperluan Lain**

Provinsi (1)	Tidak Pernah (2)	Kadang-kadang (3)	Sering (4)
Aceh	91,13	7,31	1,56
Sumatera Utara	83,33	11,39	5,29
Sumatera Barat	91,47	6,86	1,67
Riau	85,42	10,12	4,46
Jambi	89,93	8,05	2,02
Sumatera Selatan	91,46	6,86	1,69
Bengkulu	92,80	4,96	2,25
Lampung	89,28	8,16	2,57
Kep. Bangka Belitung	79,77	12,96	7,27
Kepulauan Riau	81,19	11,79	7,02
DKI Jakarta	82,48	12,80	4,73
Jawa Barat	85,48	10,97	3,55
Jawa Tengah	88,97	7,99	3,04
DI Yogyakarta	83,45	8,72	7,83
Jawa Timur	90,92	7,07	2,01
Banten	89,42	7,95	2,63
Bali	65,15	10,04	24,81
Nusa Tenggara Barat	86,24	10,97	2,80
Nusa Tenggara Timur	51,32	19,40	29,28
Kalimantan Barat	89,69	7,93	2,38
Kalimantan Tengah	94,12	4,43	1,45
Kalimantan Selatan	91,95	6,85	1,20
Kalimantan Timur	86,77	10,66	2,56
Sulawesi Utara	85,24	7,61	7,15
Sulawesi Tengah	90,49	5,76	3,75
Sulawesi Selatan	89,46	6,73	3,81
Sulawesi Tenggara	91,93	6,55	1,52
Gorontalo	89,32	7,49	3,19
Sulawesi Barat	87,71	7,19	5,10
Maluku	84,94	9,68	5,38
Maluku Utara	87,95	9,77	2,28
Papua Barat	88,45	6,74	4,81
Papua	88,25	7,47	4,28
<b>Indonesia</b>	<b>87,01</b>	<b>8,98</b>	<b>4,00</b>

**Tabel 3.3.11. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Alat yang Digunakan Untuk Mandi**

Provinsi	<i>Shower</i>	Gayung	<i>Bath tub</i>	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1,31	74,42	0,02	24,25
Sumatera Utara	1,11	88,15	0,06	10,68
Sumatera Barat	1,47	84,25	0,11	14,17
Riau	2,22	89,91	0,14	7,73
Jambi	1,00	83,98	0,15	14,87
Sumatera Selatan	1,55	86,25	-	12,2
Bengkulu	0,89	88,60	0,08	10,43
Lampung	0,82	97,63	0,18	1,37
Kep. Bangka Belitung	2,34	84,29	-	13,37
Kepulauan Riau	7,11	91,61	-	1,28
DKI Jakarta	8,44	91,23	0,08	0,25
Jawa Barat	2,62	93,33	0,08	3,97
Jawa Tengah	1,83	94,64	0,19	3,34
DI Yogyakarta	2,65	97,27	-	0,08
Jawa Timur	1,41	92,33	0,12	6,14
Banten	4,79	93,81	0,05	1,35
Bali	7,57	85,66	0,29	6,48
Nusa Tenggara Barat	1,54	75,31	0,18	22,97
Nusa Tenggara Timur	0,59	85,09	0,21	14,11
Kalimantan Barat	1,19	77,90	-	20,91
Kalimantan Tengah	1,27	88,57	0,27	9,89
Kalimantan Selatan	2,21	81,72	0,29	15,78
Kalimantan Timur	1,93	95,20	0,17	2,7
Sulawesi Utara	2,02	95,43	0,22	2,33
Sulawesi Tengah	1,06	91,09	0,04	7,81
Sulawesi Selatan	1,38	90,67	0,01	7,94
Sulawesi Tenggara	2,11	91,49	-	6,4
Gorontalo	1,61	90,24	-	8,15
Sulawesi Barat	0,96	92,71	0,02	6,31
Maluku	1,18	91,39	0,09	7,34
Maluku Utara	0,64	93,58	-	5,78
Papua Barat	1,31	83,00	0,28	15,41
Papua	0,14	51,17	0,04	48,65
<b>Indonesia</b>	<b>2,26</b>	<b>90,40</b>	<b>0,11</b>	<b>7,23</b>

**Tabel 3.3.12. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Fasilitas Sistem Penyiraman *Flush* pada Toilet yang Digunakan**

Provinsi	Ada	Tidak ada
(1)	(2)	(3)
Aceh	13,72	86,28
Sumatera Utara	14,32	85,68
Sumatera Barat	6,48	93,52
Riau	13,27	86,73
Jambi	4,93	95,07
Sumatera Selatan	11,89	88,11
Bengkulu	10,68	89,32
Lampung	24,40	75,60
Kep. Bangka Belitung	9,12	90,88
Kepulauan Riau	15,83	84,17
DKI Jakarta	23,91	76,09
Jawa Barat	13,06	86,94
Jawa Tengah	13,49	86,51
DI Yogyakarta	6,82	93,18
Jawa Timur	16,84	83,16
Banten	12,29	87,71
Bali	9,93	90,07
Nusa Tenggara Barat	14,07	85,93
Nusa Tenggara Timur	6,75	93,25
Kalimantan Barat	9,51	90,49
Kalimantan Tengah	10,46	89,54
Kalimantan Selatan	7,54	92,46
Kalimantan Timur	16,21	83,79
Sulawesi Utara	15,53	84,47
Sulawesi Tengah	9,18	90,82
Sulawesi Selatan	10,76	89,24
Sulawesi Tenggara	16,61	83,39
Gorontalo	7,35	92,65
Sulawesi Barat	1,40	98,60
Maluku	4,64	95,36
Maluku Utara	10,14	89,86
Papua Barat	17,08	82,92
Papua	10,81	89,19
<b>Indonesia</b>	<b>13,85</b>	<b>86,15</b>

**Tabel 3.3.13. Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Pemakaian Air Selama Setahun Terakhir dan Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Air**

Provinsi	Persentase rumahtangga yang mengurangi pemakaian air	Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Air		
		Penghematan Biaya	Peduli Lingkungan	Pasokan/ Distribusi Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	31,47	80,61	7,77	11,62
Sumatera Utara	34,07	81,23	3,03	15,74
Sumatera Barat	22,86	83,51	6,29	10,20
Riau	31,23	54,59	6,44	38,98
Jambi	24,51	57,24	6,19	36,57
Sumatera Selatan	30,89	75,83	4,80	19,37
Bengkulu	17,07	61,39	1,57	37,03
Lampung	19,12	70,13	4,64	25,23
Kep. Bangka Belitung	31,54	49,84	5,42	44,74
Kepulauan Riau	41,82	86,69	2,41	10,89
DKI Jakarta	45,51	90,21	5,37	4,42
Jawa Barat	31,71	73,23	6,71	20,05
Jawa Tengah	24,85	86,83	5,87	7,30
DI Yogyakarta	21,39	66,51	9,11	24,38
Jawa Timur	22,79	87,87	5,81	6,32
Banten	24,37	84,60	5,78	9,61
Bali	28,01	86,81	2,00	11,19
Nusa Tenggara Barat	31,25	61,57	3,82	34,60
Nusa Tenggara Timur	37,79	62,88	4,29	32,83
Kalimantan Barat	21,29	73,55	3,32	23,13
Kalimantan Tengah	30,28	76,49	2,67	20,85
Kalimantan Selatan	28,47	85,33	3,89	10,78
Kalimantan Timur	28,10	80,84	2,67	16,49
Sulawesi Utara	34,52	82,19	2,44	15,36
Sulawesi Tengah	21,62	80,18	7,03	12,78
Sulawesi Selatan	27,82	69,57	4,46	25,97
Sulawesi Tenggara	23,65	68,61	3,05	28,34
Gorontalo	58,23	89,29	3,32	7,39
Sulawesi Barat	13,23	72,55	4,23	23,22
Maluku	30,43	57,66	8,29	34,04
Maluku Utara	28,84	86,04	3,90	10,06
Papua Barat	20,49	42,73	14,98	42,29
Papua	26,47	63,48	8,06	28,45
<b>Indonesia</b>	<b>28,26</b>	<b>79,40</b>	<b>5,47</b>	<b>15,13</b>

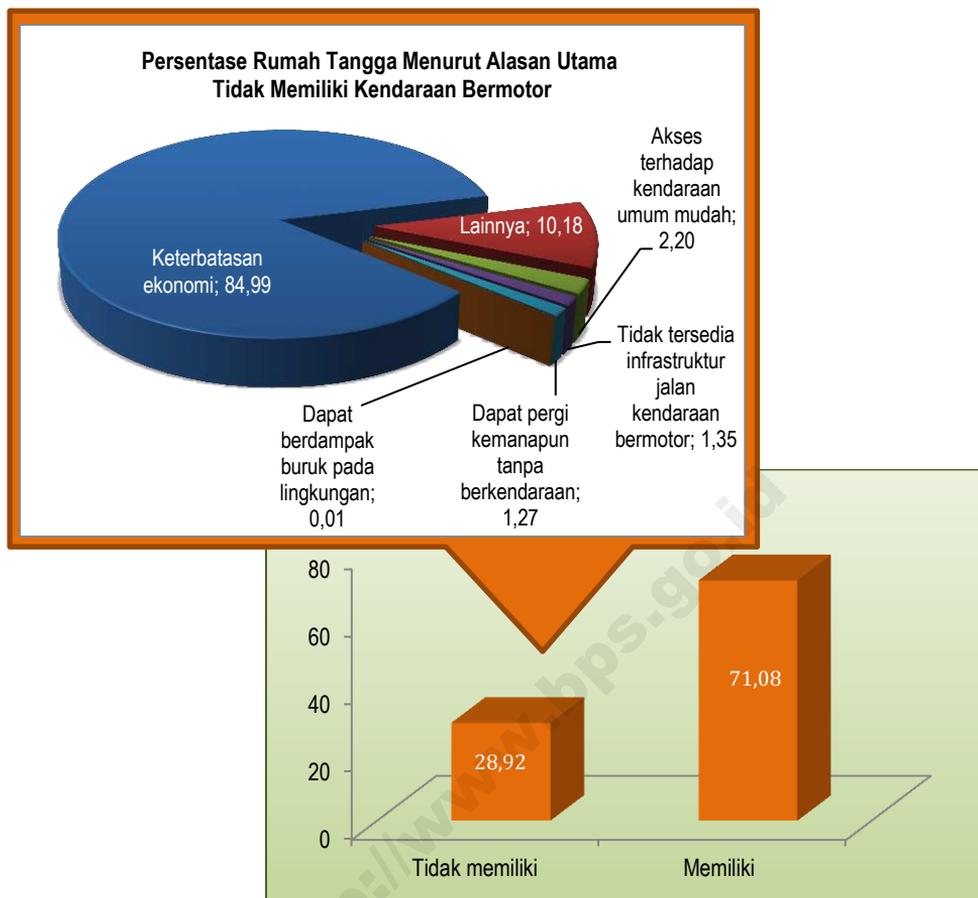
## Penggunaan Transportasi

# 3.4

Di era pembangunan yang semakin maju, sarana transportasi sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang aktivitasnya. Pada dasarnya sistem transportasi terdiri dari sistem angkutan penumpang dan barang. Menurut penggunaan dan cara pengoperasiannya, transportasi penumpang dibedakan menjadi transportasi umum dan transportasi pribadi. Sekarang ini, transportasi terkait erat dengan permasalahan lingkungan khususnya dalam hal penyediaan bahan bakar yang digunakan dan pencemaran yang ditimbulkan. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang selalu meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, rumah tangga sebagai pengguna transportasi sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan penggunaan transportasi hanya dari sisi ekonomis, tetapi juga dari sisi kepedulian terhadap lingkungan.

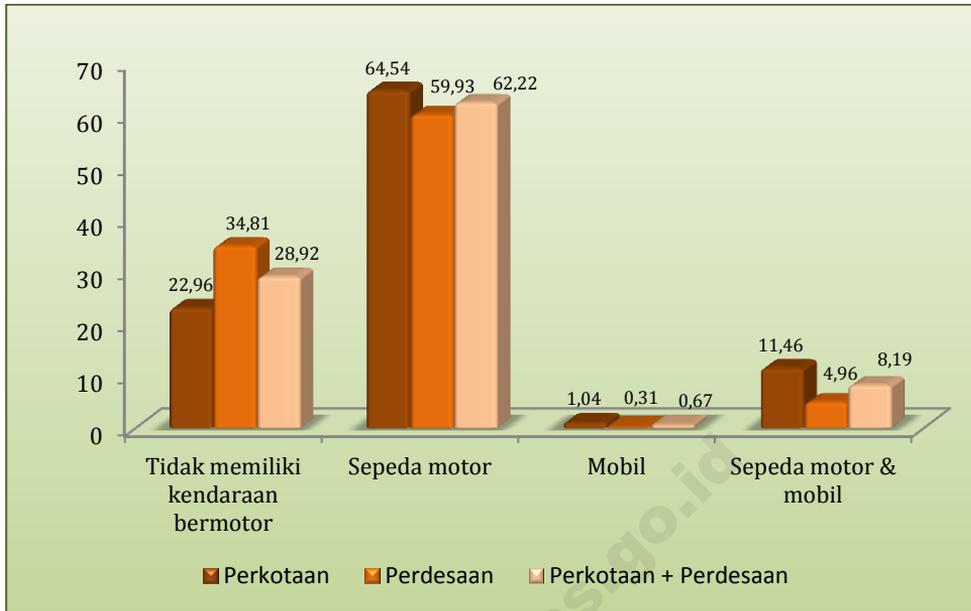
Hasil SPPLH 2013 menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga rumah tangga memiliki kendaraan bermotor yaitu mencapai sekitar 71,08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan pokok, apalagi bagi rumah tangga dengan perekonomian menengah keatas. Persentase kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi juga tidak terlepas dari sarana angkutan umum di berbagai daerah di Indonesia yang belum memadai. Adapun rumah tangga yang tidak memiliki kendaraan bermotor tercatat hanya sekitar 28,92 persen. Alasan utama rumah tangga tidak memiliki kendaraan bermotor adalah karena keterbatasan ekonomi yaitu mencapai 84,99 persen. Alasan lain adalah karena akses terhadap kendaraan umum mudah (2,20 persen), tidak tersedia infrastruktur jalan kendaraan bermotor (1,35 persen), dapat pergi kemanapun tanpa kendaraan (1,27 persen), alasan lainnya (10,18 persen), dan hanya 0,01 persen alasan karena dapat berdampak buruk pada lingkungan (Grafik 3.4.1).

**Grafik 3.4.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Kendaraan Bermotor**



Dari sejumlah rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor, tercatat sebanyak 62,22 persen rumah tangga yang hanya memiliki sepeda motor, 0,67 persen rumah tangga yang hanya memiliki mobil, dan 8,19 persen rumah tangga yang memiliki kedua jenis kendaraan bermotor tersebut. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan, seperti rumah tangga yang memiliki sepeda motor dan mobil di daerah perkotaan tercatat sebesar 11,46 persen, sedangkan di daerah pedesaan tercatat sebesar 4,96 persen (Grafik 3.4.2). Sedangkan jika dilihat menurut provinsi, persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (91,89 persen), diikuti Provinsi Kalimantan Timur (90,56 persen), dan Kepulauan Riau (89,34 persen) (Tabel 3.4.2).

**Grafik 3.4.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Daerah Tempat Tinggal**

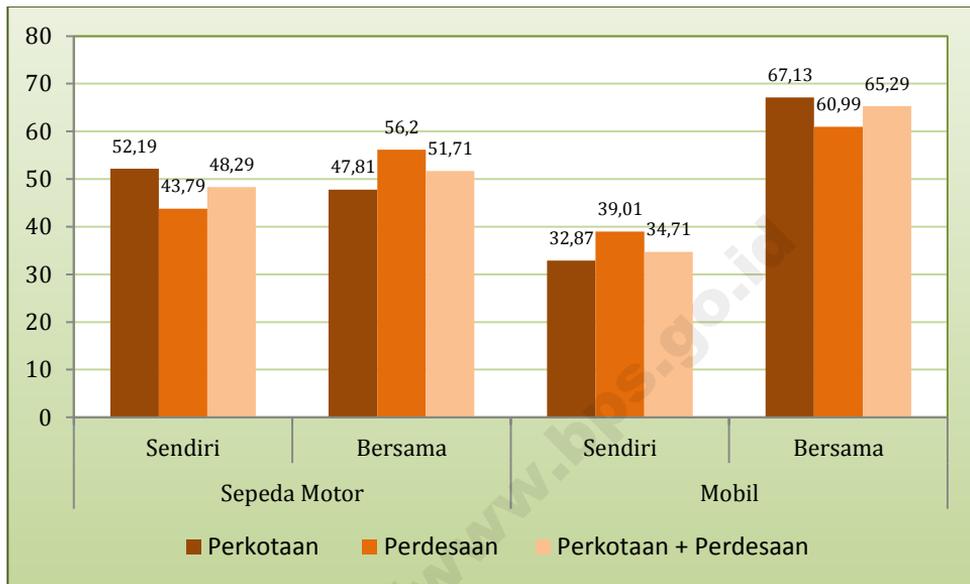


Dari sisi penggunaannya, sepeda motor dan mobil lebih sering digunakan secara bersama (*car pooling*). Tercatat sebanyak 51,71 persen rumah tangga pemilik sepeda motor lebih sering menggunakan sepeda motornya secara bersama (berboncengan) dibandingkan menggunakannya secara sendiri (48,29 persen). Sementara untuk penggunaan mobil, tercatat sebanyak 65,29 persen rumah tangga pemilik mobil menggunakan mobilnya lebih sering secara bersama (*car pooling*) dan sisanya sebesar 34,71 persen rumah tangga lebih sering menggunakannya secara sendiri (Grafik 3.4.3). Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, rumah tangga di daerah perkotaan yang menggunakan mobilnya secara bersama lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Sebaliknya untuk penggunaan sepeda motor, penggunaan sepeda motor secara bersama lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Penggunaan kendaraan bermotor secara sendiri akan membutuhkan lebih banyak bahan bakar yang pada akhirnya menghabiskan bahan bakar dan menimbulkan lebih banyak polusi. Arif, dkk (2009) menyebutkan bahwa emisi karbon yang ditimbulkan oleh penggunaan sepeda motor seorang diri lebih tinggi daripada emisi karbon yang ditimbulkan oleh penggunaan mobil pribadi yang mengangkut tiga orang. Sementara penggunaan mobil pribadi seorang diri menimbulkan emisi karbon tiga kali lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh penggunaan sepeda motor seorang diri.

Jika dilihat menurut provinsi, persentase tertinggi rumah tangga pemilik sepeda motor yang menggunakan sepeda motornya lebih sering secara bersama terdapat di Provinsi Maluku Utara

(71,59 persen), diikuti Sulawesi Tengah (71,29 persen), Papua Barat (69,27 persen), dan Jambi (66,14 persen) (Tabel 3.4.3). Seperti halnya penggunaan sepeda motor, persentase tertinggi pemilik mobil yang menggunakan mobilnya lebih sering secara bersama terdapat di Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 80,27 persen (Tabel 3.4.5).

**Grafikl 3.4.3 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Kendaraan Bermotor dan Daerah Tempat Tinggal**



Dari sisi penggunaan alat transportasi sebagai penunjang kegiatan bekerja penduduk berumur 10 tahun ke atas, sebanyak 43,52 persen berjalan kaki/bersepeda dan 43,28 persen menggunakan sepeda motor pribadi. Begitu juga untuk kegiatan sekolah, sebagian besar penduduk berumur 10 tahun keatas berjalan kaki/bersepeda untuk bersekolah. Jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh penduduk berumur 10 tahun keatas untuk menunjang kegiatan bekerja di perkotaan adalah sepeda motor pribadi, sedangkan untuk daerah perdesaan adalah berjalan kaki/bersepeda (Tabel 3.4.1). Hal ini dimungkinkan karena infrastruktur seperti jalan, tentu lebih baik di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan, disamping juga karena faktor perekonomian penduduknya. Penggunaan sepeda motor, mobil, dan kendaraan umum terlihat jauh lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan.

**Tabel 3.4.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Bekerja dan Sekolah Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Alat Transportasi yang Digunakan**

Alat Transportasi	Bekerja			Sekolah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jalan kaki / Sepeda	31,09	55,46	43,52	43,00	65,10	53,26
Becak / Dokar	0,98	0,43	0,70	1,01	0,71	0,87
Sepeda motor pribadi	50,61	36,23	43,28	30,12	22,33	26,50
Mobil pribadi	4,65	1,43	3,01	1,57	0,13	0,90
Kendaraan umum bermotor	11,31	4,85	8,02	22,74	10,23	16,93
Lainnya	1,35	1,60	1,48	1,55	1,51	1,53

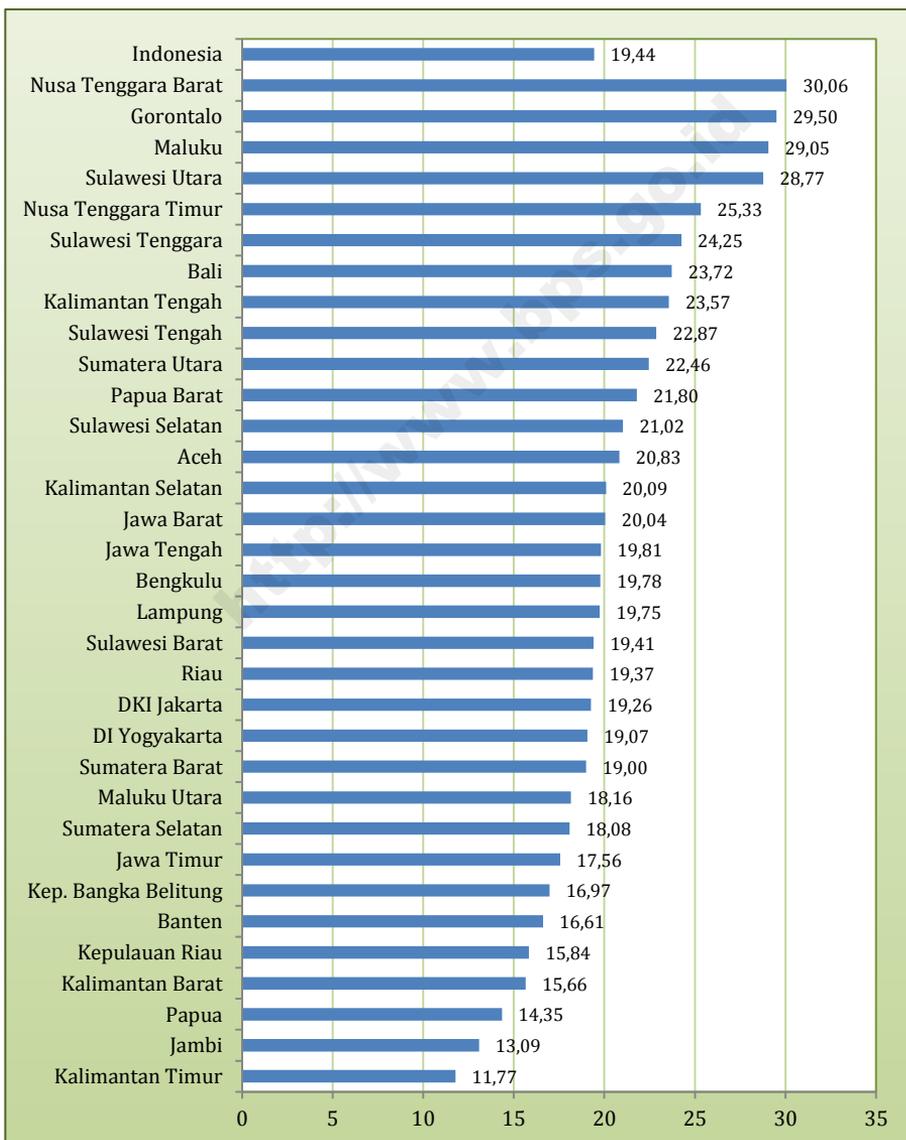
Tabel 3.4.5 dan Tabel 3.4.6 menyajikan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut provinsi dan alat transportasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan bekerja dan kegiatan sekolah. Pada umumnya di sebagian besar provinsi terlihat bahwa alat transportasi untuk menunjang kegiatan bekerja penduduk, persentase tertinggi adalah menggunakan sepeda motor pribadi, diikuti dengan bersepeda atau jalan kaki. Akan tetapi untuk provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur, persentase tertinggi alat transportasi untuk menunjang kegiatan bekerja penduduk adalah dengan bersepeda atau berjalan kaki.

Terkait penggunaan kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan bekerja dan sekolah, penggunaan kendaraan umum sebagai alat transportasi oleh penduduk 10 tahun ke atas lebih rendah dibandingkan kendaraan pribadi. Menurut Arif dkk (2009), penggunaan kendaraan umum seperti bus dapat menghemat 10 persen bahan bakar yang digunakan kendaraan pribadi. Sementara emisi karbon yang ditimbulkan bus per orang per kilometer perjalanan hanya 13 persen dari emisi sepeda motor dan 6 persen dari mobil pribadi. Penggunaan kendaraan umum (kendaraan umum rute tertentu dan kendaraan umum tanpa rute tertentu) sebagai alat transportasi penunjang kegiatan bekerja penduduk berumur 10 tahun keatas hanya 8,02 persen, sementara 46,29 persen menggunakan kendaraan bermotor pribadi (sepeda motor dan mobil pribadi). Sedangkan untuk menunjang kegiatan sekolah, penggunaan kendaraan umum relatif lebih banyak meskipun masih lebih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi, yaitu sebesar 16,93 persen yang menggunakan kendaraan umum dan 27,40 persen yang menggunakan kendaraan pribadi.

Dari sisi penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang digunakan, sebagian besar penduduk yang menggunakan sepeda motor dan mobil masih memakai bahan bakar minyak jenis premium yaitu sebanyak 98,29 persen untuk pengguna sepeda motor dan sebanyak 76,67 persen

untuk pengguna mobil. Penggunaan pertamax sebagai bahan bakar masih sangat jarang, yaitu hanya digunakan oleh 1,05 persen dari penduduk yang menggunakan sepeda motor dan 10,55 persen dari penduduk yang menggunakan mobil atau secara total sebesar 1,62 persen dari rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor (Tabel 3.4.7). Persentase penduduk yang menggunakan pertamax sebagai bahan bakar sepeda motornya terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Demikian juga untuk bahan bakar mobil, persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar jenis pertamax terdapat di Provinsi DKI Jakarta.

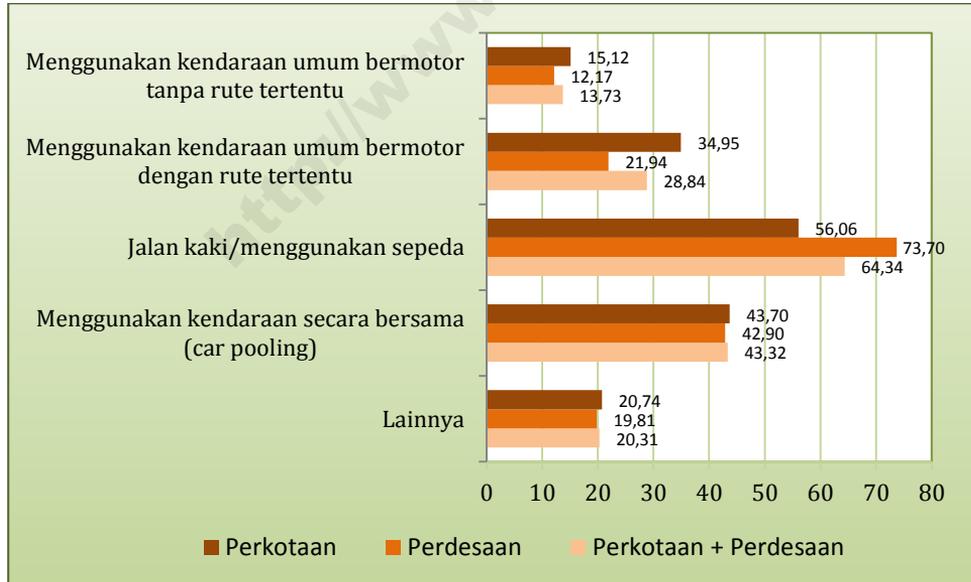
**Grafik 3.4.4 Persentase Rumah Tangga yang Ada Usaha Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi Menurut Provinsi**



Dalam hal penghematan bahan bakar kendaraan bermotor, hanya 19,44 persen rumah tangga yang melakukan usaha mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi (Grafik 3.4.4). Jika dilihat menurut provinsi, persentase tertinggi rumah tangga yang mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (30,06 persen), diikuti Provinsi Gorontalo (29,50 persen), Maluku (29,05 persen), dan Sulawesi Utara (28,77 persen).

Dalam satu rumah tangga, usaha yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dapat ditempuh dengan lebih dari satu jenis usaha. Jenis usaha yang paling banyak dilakukan oleh rumah tangga untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi adalah dengan cara berjalan kaki/bersepeda sebesar 64,34 persen, menggunakan kendaraan secara bersama (*car pooling*) sebesar 43,32 persen, menggunakan kendaraan umum rute tertentu sebesar 28,84 persen (Grafik 3.4.5). Khusus usaha mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan berjalan kaki/bersepeda, banyak dilakukan oleh rumah tangga pemilik kendaraan bermotor di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Sementara untuk jenis usaha mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang lain, ternyata banyak dilakukan di perkotaan dibandingkan di perdesaan.

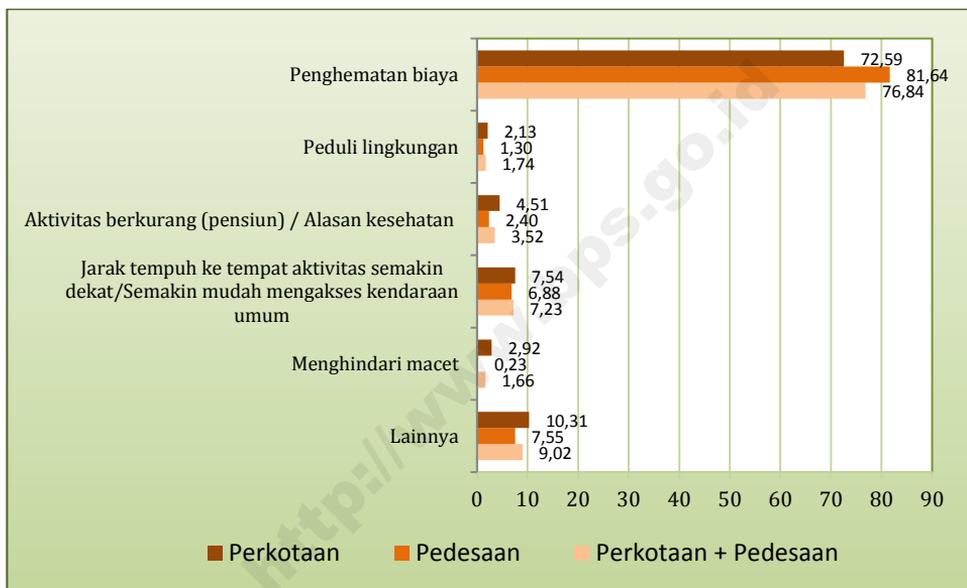
**Grafik 3.4.5 Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Usaha yang Dilakukan**



Usaha mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang dilakukan oleh rumah tangga tersebut tidak semuanya dilakukan atas dasar kepedulian terhadap lingkungan. Grafik 3.4.6 menggambarkan persentase rumah tangga menurut alasan utama mengurangi penggunaan

kendaraan bermotor dan daerah tempat tinggal. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa upaya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh rumah tangga lebih disebabkan oleh motif ekonomi (penghematan biaya), dan hanya 1,74 persen rumah tangga yang memiliki motif peduli lingkungan. Dilihat dari daerah tempat tinggal, rumah tangga di perkotaan lebih banyak yang mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi karena peduli lingkungan dibandingkan rumah tangga di pedesaan. Demikian juga untuk alasan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang lain, kecuali untuk alasan penghematan biaya dimana rumah tangga di pedesaan lebih banyak dibandingkan rumah tangga di perkotaan.

**Grafik 3.4.6 Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi Menurut Alasan Utama Pengurangan dan Daerah Tempat Tinggal**



Perilaku peduli lingkungan melalui transportasi tidak hanya dilihat dari sisi rumah tangga memaksimalkan kapasitas kendaraan dan penggunaan bahan bakar saja, akan tetapi dapat juga dilihat dari sisi perawatan kendaraan. Perawatan kendaraan secara rutin selain bermanfaat untuk mencegah rusaknya mesin, juga berhubungan dengan penghematan bahan bakar dan mengurangi polusi yang ditimbulkan. Tidak semua rumah tangga pemilik kendaraan bermotor pribadi merawat kendaraannya secara rutin. Dari Grafik 3.4.7 terlihat bahwa sebanyak 81,67 persen rumah tangga melakukan perawatan mesin secara rutin. Dilihat dari daerah tempat tinggal, rumah tangga di perkotaan lebih banyak yang melakukan perawatan mesin secara rutin dibanding di pedesaan yaitu sebesar 85,67 persen di perkotaan dan 77,02 persen di pedesaan.

Jika dilihat menurut provinsi, persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor dan melakukan perawatan mesin secara rutin terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur

sebesar 90,79 persen, diikuti Provinsi DKI Jakarta sebesar 90,72 persen. Bagi rumah tangga yang hanya memiliki mobil, terlihat bahwa di sepuluh provinsi sudah semua rumah tangga (100 persen) yang melakukan perawatan mesin secara rutin (Tabel 3.4.8).

**Grafik 3.4.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Ada Tidaknya Perawatan Mesin Secara Rutin dan Daerah Tempat Tinggal**



**Tabel 3.4.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kendaraan Bermotor**

Provinsi	Tidak Memiliki Kendaraan Bermotor	Memiliki Kendaraan Bermotor			Total
		Sepeda motor	Mobil	Sepeda motor & Mobil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	23,35	68,79	0,34	7,52	76,65
Sumatera Utara	29,24	63,65	0,58	6,54	70,76
Sumatera Barat	25,88	62,60	0,97	10,55	74,12
Riau	13,08	75,75	0,72	10,45	86,92
Jambi	14,11	75,05	0,31	10,53	85,89
Sumatera Selatan	23,64	66,02	0,71	9,63	76,36
Bengkulu	17,86	70,88	0,25	11,01	82,14
Lampung	20,63	71,99	0,71	6,67	79,37
Kep. Bangka Belitung	8,11	74,72	0,82	16,36	91,89
Kepulauan Riau	10,66	67,96	4,20	17,17	89,34
DKI Jakarta	18,82	65,41	3,22	12,54	81,18
Jawa Barat	37,02	54,94	0,56	7,48	62,98
Jawa Tengah	28,83	63,13	0,26	7,78	71,17
DI Yogyakarta	19,21	67,94	0,26	12,59	80,79
Jawa Timur	24,28	68,18	0,24	7,30	75,72
Banten	25,19	64,43	1,52	8,85	74,81
Bali	11,10	71,95	0,47	16,49	88,90
Nusa Tenggara Barat	51,97	43,39	0,13	4,51	48,03
Nusa Tenggara Timur	66,08	29,90	0,71	3,31	33,92
Kalimantan Barat	21,63	72,31	0,28	5,78	78,37
Kalimantan Tengah	22,39	69,73	0,40	7,48	77,61
Kalimantan Selatan	15,43	76,37	0,20	8,00	84,57
Kalimantan Timur	9,44	77,95	0,48	12,12	90,56
Sulawesi Utara	44,55	42,24	3,64	9,58	55,45
Sulawesi Tengah	29,85	63,09	0,16	6,89	70,15
Sulawesi Selatan	32,49	56,15	1,02	10,34	67,51
Sulawesi Tenggara	35,21	57,65	0,36	6,77	64,79
Gorontalo	44,04	50,45	0,61	4,90	55,96
Sulawesi Barat	37,44	56,82	0,51	5,24	62,56
Maluku	61,78	34,07	1,89	2,27	38,22
Maluku Utara	52,88	43,98	0,23	2,90	47,12
Papua Barat	43,24	49,49	1,07	6,20	56,76
Papua	74,97	20,71	0,63	3,68	25,03
<b>Indonesia</b>	<b>28,92</b>	<b>62,22</b>	<b>0,67</b>	<b>8,19</b>	<b>71,08</b>

**Tabel 3.4.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sepeda Motor Menurut Provinsi dan Cara Penggunaan Sepeda Motor yang Lebih Sering Dilakukan Selama Sebulan Terakhir**

Provinsi	Sendiri	Bersama
(1)	(2)	(3)
Aceh	37,58	62,42
Sumatera Utara	40,92	59,08
Sumatera Barat	42,33	57,67
Riau	42,55	57,45
Jambi	33,86	66,14
Sumatera Selatan	39,31	60,69
Bengkulu	34,86	65,14
Lampung	38,94	61,06
Kep. Bangka Belitung	48,93	51,07
Kepulauan Riau	62,13	37,87
DKI Jakarta	61,92	38,08
Jawa Barat	51,47	48,53
Jawa Tengah	52,01	47,99
DI Yogyakarta	60,23	39,77
Jawa Timur	51,35	48,65
Banten	50,09	49,91
Bali	60,95	39,05
Nusa Tenggara Barat	41,79	58,21
Nusa Tenggara Timur	42,11	57,89
Kalimantan Barat	42,16	57,84
Kalimantan Tengah	40,50	59,50
Kalimantan Selatan	45,42	54,58
Kalimantan Timur	52,54	47,46
Sulawesi Utara	35,51	64,49
Sulawesi Tengah	28,71	71,29
Sulawesi Selatan	39,15	60,85
Sulawesi Tenggara	38,14	61,86
Gorontalo	45,26	54,74
Sulawesi Barat	51,49	48,51
Maluku	36,95	63,05
Maluku Utara	28,41	71,59
Papua Barat	30,73	69,27
Papua	37,89	62,11
<b>Indonesia</b>	<b>48,29</b>	<b>51,71</b>

**Tabel 3.4.4 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Mobil Menurut Provinsi dan Cara Penggunaan Mobil yang Lebih Sering Dilakukan Selama Sebulan Terakhir**

Provinsi	Sendiri	Bersama
(1)	(2)	(3)
Aceh	40,44	59,56
Sumatera Utara	30,75	69,25
Sumatera Barat	44,07	55,93
Riau	53,26	46,74
Jambi	31,86	68,14
Sumatera Selatan	37,28	62,72
Bengkulu	46,14	53,86
Lampung	32,05	67,95
Kep. Bangka Belitung	43,35	56,65
Kepulauan Riau	41,11	58,89
DKI Jakarta	35,97	64,03
Jawa Barat	36,72	63,28
Jawa Tengah	35,56	64,44
DI Yogyakarta	26,26	73,74
Jawa Timur	34,87	65,13
Banten	22,16	77,84
Bali	21,79	78,21
Nusa Tenggara Barat	22,60	77,40
Nusa Tenggara Timur	36,36	63,64
Kalimantan Barat	37,72	62,28
Kalimantan Tengah	33,08	66,92
Kalimantan Selatan	40,96	59,04
Kalimantan Timur	46,45	53,55
Sulawesi Utara	23,57	76,43
Sulawesi Tengah	30,01	69,99
Sulawesi Selatan	28,06	71,94
Sulawesi Tenggara	29,84	70,16
Gorontalo	34,36	65,64
Sulawesi Barat	48,45	51,55
Maluku	21,02	78,98
Maluku Utara	19,73	80,27
Papua Barat	36,77	63,23
Papua	22,47	77,53
<b>Indonesia</b>	<b>34,71</b>	<b>65,29</b>

**Tabel 3.4.5 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Provinsi dan Alat Transportasi yang Digunakan untuk Menunjang Kegiatan Bekerja**

Provinsi	Jalan kaki/ Sepeda	Becak/ dokar	Sepeda motor pribadi	Mobil pribadi	Kendaraan Umum bermotor	Kereta api	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	38,33	0,95	52,77	2,73	3,64	-	1,57
Sumatera Utara	42,42	1,43	44,58	2,60	8,35	-	0,63
Sumatera Barat	43,95	0,47	41,98	4,22	8,33	-	1,06
Riau	27,07	0,76	61,78	4,16	4,08	-	2,15
Jambi	29,83	0,37	60,84	3,29	3,61	-	2,07
Sumatera Selatan	35,23	0,67	51,18	2,96	6,65	-	3,32
Bengkulu	37,77	0,30	50,23	3,80	4,69	-	3,22
Lampung	44,79	0,55	46,13	2,30	5,32	-	0,92
Kep. Bangka Belitung	17,75	0,06	73,81	5,49	0,61	-	2,27
Kepulauan Riau	16,34	0,78	61,33	11,15	8,09	-	2,31
DKI Jakarta	24,14	0,19	48,60	8,83	16,69	0,25	1,30
Jawa Barat	39,44	0,59	39,33	3,20	16,14	0,56	0,75
Jawa Tengah	52,13	0,93	37,24	1,95	6,74	-	1,02
DI Yogyakarta	41,49	0,42	50,88	2,73	2,30	-	2,18
Jawa Timur	49,94	1,08	43,90	1,48	2,91	0,00	0,69
Banten	33,98	0,37	46,67	3,79	13,88	0,33	0,97
Bali	32,30	0,07	62,17	3,30	1,52	-	0,65
Nusa Tenggara Barat	56,61	1,15	31,13	1,55	7,83	-	1,73
Nusa Tenggara Timur	77,29	0,09	15,62	1,23	5,15	-	0,62
Kalimantan Barat	51,86	0,32	40,44	2,06	1,56	-	3,76
Kalimantan Tengah	32,67	0,43	55,47	3,61	2,98	-	4,85
Kalimantan Selatan	31,17	0,40	61,84	2,52	2,15	0,03	1,90
Kalimantan Timur	19,90	0,08	65,52	5,40	5,66	-	3,44
Sulawesi Utara	42,54	0,20	27,46	7,52	20,34	-	1,94
Sulawesi Tengah	43,38	0,38	46,61	2,73	4,78	-	2,12
Sulawesi Selatan	48,74	0,63	37,46	4,48	7,04	-	1,65
Sulawesi Tenggara	45,40	0,22	41,10	2,93	7,34	-	3,01
Gorontalo	49,03	0,49	28,46	3,21	17,15	-	1,66
Sulawesi Barat	59,43	1,21	31,45	2,20	2,62	-	3,10
Maluku	55,85	0,54	21,64	2,55	16,29	-	3,13
Maluku Utara	61,60	0,73	25,13	1,08	8,88	-	2,59
Papua Barat	49,06	0,20	32,38	3,42	9,65	-	5,29
Papua	74,31	0,42	14,69	1,18	5,90	-	3,50
<b>Indonesia</b>	<b>43,51</b>	<b>0,70</b>	<b>43,28</b>	<b>3,01</b>	<b>8,02</b>	<b>0,12</b>	<b>1,36</b>

**Tabel 3.4.6 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Provinsi dan Alat Transportasi yang Digunakan untuk Menunjang Kegiatan Sekolah**

Provinsi	Jalan kaki/ Sepeda	Becak/ dokar	Sepeda motor pribadi	Mobil pribadi	Kendaraan Umum bermotor	Kereta api	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	50,99	1,42	33,25	0,55	12,14	-	1,64
Sumatera Utara	48,01	2,30	21,92	1,38	25,95	-	0,44
Sumatera Barat	47,04	0,77	21,02	0,80	28,55	-	1,82
Riau	37,67	0,87	45,83	1,84	8,50	-	5,27
Jambi	37,61	0,58	48,55	0,80	9,58	-	2,89
Sumatera Selatan	48,40	0,09	30,51	1,01	17,87	-	2,11
Bengkulu	35,77	0,21	39,47	0,53	20,13	-	3,88
Lampung	58,40	0,47	29,11	0,36	10,62	-	1,04
Kep. Bangka Belitung	42,69	0,39	48,42	0,29	5,86	-	2,34
Kepulauan Riau	28,73	1,19	43,14	4,46	19,22	-	3,27
DKI Jakarta	34,57	0,34	21,43	5,69	35,33	0,56	2,09
Jawa Barat	54,83	1,13	17,53	0,71	25,04	-	0,77
Jawa Tengah	56,98	1,04	26,55	0,52	14,20	-	0,72
DI Yogyakarta	36,70	0,15	57,03	1,66	2,07	-	2,38
Jawa Timur	62,13	0,74	29,71	0,23	5,89	0,01	1,31
Banten	53,22	0,69	17,02	0,59	27,35	-	1,14
Bali	36,81	-	58,98	0,63	2,46	-	1,11
Nusa Tenggara Barat	63,69	1,99	21,49	0,60	9,46	-	2,77
Nusa Tenggara Timur	77,55	0,05	7,17	0,55	14,15	-	0,52
Kalimantan Barat	69,92	0,48	23,50	0,12	3,49	-	2,49
Kalimantan Tengah	60,11	0,81	32,79	0,10	2,20	-	3,99
Kalimantan Selatan	49,04	0,74	46,97	0,58	1,68	-	0,99
Kalimantan Timur	34,03	0,44	54,70	0,76	7,19	-	2,89
Sulawesi Utara	47,67	0,54	13,64	3,47	32,14	-	2,53
Sulawesi Tengah	53,62	0,33	34,50	0,77	8,33	-	2,47
Sulawesi Selatan	49,27	0,56	28,05	0,74	18,79	-	2,59
Sulawesi Tenggara	55,93	0,35	26,49	0,17	16,42	-	0,64
Gorontalo	51,34	0,34	12,89	1,49	32,70	-	1,23
Sulawesi Barat	50,42	2,27	28,58		14,15	-	4,59
Maluku	54,72	0,11	8,38	0,54	35,87	-	0,37
Maluku Utara	65,95	1,96	6,80	0,33	24,96	-	
Papua Barat	48,67	0,23	23,14	0,98	25,87	-	1,11
Papua	64,19	0,09	12,81	0,43	18,52	-	3,97
<b>Indonesia</b>	<b>53,26</b>	<b>0,87</b>	<b>26,50</b>	<b>0,90</b>	<b>16,93</b>	<b>0,02</b>	<b>1,51</b>

**Tabel 3.4.7 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Menggunakan Kendaraan Pribadi Menurut Jenis Kendaraan dan Bahan Bakar yang Digunakan**

Provinsi	Sepeda Motor *)				Mobil			
	Solar	Premium	Pertamax	Lainnya	Solar	Premium	Pertamax	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,32	99,21	0,46	0,02	16,81	82,35	0,84	-
Sumatera Utara	0,33	99,08	0,49	0,10	9,09	89,54	1,37	-
Sumatera Barat	0,97	97,99	0,75	0,29	25,99	72,05	1,80	0,15
Riau	1,15	98,49	0,32	0,04	12,91	80,45	6,64	-
Jambi	0,81	98,97	0,14	0,08	20,38	67,00	12,62	-
Sumatera Selatan	1,05	98,57	0,38	-	17,12	81,57	1,30	-
Bengkulu	0,60	98,00	1,40	-	9,36	90,64	-	-
Lampung	0,22	98,65	1,13	-	10,07	89,84	-	0,08
Kep. Bangka Belitung	0,49	99,14	0,37	-	33,57	63,08	3,34	-
Kepulauan Riau	1,78	97,32	0,91	-	15,05	76,21	8,73	-
DKI Jakarta	0,46	96,66	2,87	-	8,19	52,34	34,47	5,00
Jawa Barat	0,57	97,69	1,66	0,09	10,77	75,84	13,39	-
Jawa Tengah	0,63	98,25	1,04	0,08	12,73	78,02	9,24	-
DI Yogyakarta	-	99,52	0,48	-	4,84	93,60	1,56	-
Jawa Timur	0,60	98,24	1,04	0,12	18,29	77,22	4,49	-
Banten	0,36	97,98	1,66	-	2,20	88,08	9,73	-
Bali	0,07	99,68	0,25	-	11,63	85,43	2,94	-
Nusa Tenggara Barat	0,50	98,92	0,58	-	7,66	92,34	-	-
Nusa Tenggara Timur	0,46	98,76	0,63	0,15	28,41	70,02	-	1,57
Kalimantan Barat	0,46	98,59	0,94	-	36,45	59,02	-	4,54
Kalimantan Tengah	0,28	98,88	0,79	0,05	13,16	86,84	-	-
Kalimantan Selatan	0,94	98,72	0,34	-	7,80	89,99	2,22	-
Kalimantan Timur	0,76	96,73	2,52	-	10,99	84,62	4,39	-
Sulawesi Utara	0,22	97,06	1,17	1,54	4,64	90,58	3,57	1,21
Sulawesi Tengah	0,08	99,15	0,77	-	16,14	79,83	4,03	-
Sulawesi Selatan	0,81	98,80	0,38	-	7,77	85,61	6,29	0,33
Sulawesi Tenggara	1,45	98,31	-	0,23	6,47	93,53	-	-
Gorontalo	0,17	99,83	-	-	16,18	78,10	5,72	-
Sulawesi Barat	0,25	99,69	0,06	-	22,71	77,29	-	-
Maluku	0,22	97,52	0,18	2,09	2,24	92,06	-	5,70
Maluku Utara	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-
Papua Barat	0,37	98,78	0,84	-	15,03	83,91	1,06	-
Papua	0,78	97,94	1,28	-	9,39	90,61	-	-
<b>Indonesia</b>	<b>0,58</b>	<b>98,29</b>	<b>1,05</b>	<b>0,08</b>	<b>11,91</b>	<b>76,67</b>	<b>10,55</b>	<b>0,87</b>

Catatan : \*) Termasuk perahu motor

Lanjutan Tabel 3.4.7

Provinsi	Total			
	Solar	Premium	Pertamax	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1,01	98,51	0,47	0,01
Sumatera Utara	0,81	98,56	0,54	0,09
Sumatera Barat	3,00	95,89	0,84	0,28
Riau	1,83	97,45	0,68	0,04
Jambi	1,61	97,67	0,65	0,08
Sumatera Selatan	1,87	97,71	0,43	-
Bengkulu	1,09	97,59	1,32	-
Lampung	0,62	98,29	1,08	0,00
Kep. Bangka Belitung	2,25	97,22	0,53	-
Kepulauan Riau	3,74	94,19	2,06	-
DKI Jakarta	1,76	89,22	8,18	0,84
Jawa Barat	1,27	96,18	2,46	0,08
Jawa Tengah	1,17	97,34	1,41	0,08
DI Yogyakarta	0,22	99,25	0,53	-
Jawa Timur	1,09	97,66	1,14	0,12
Banten	0,50	97,27	2,23	-
Bali	0,57	99,06	0,37	-
Nusa Tenggara Barat	0,80	98,64	0,56	-
Nusa Tenggara Timur	2,46	96,71	0,59	0,25
Kalimantan Barat	1,97	96,93	0,90	0,19
Kalimantan Tengah	0,92	98,28	0,75	0,05
Kalimantan Selatan	1,16	98,44	0,40	-
Kalimantan Timur	1,37	96,01	2,63	-
Sulawesi Utara	1,13	95,73	1,66	1,47
Sulawesi Tengah	0,83	98,25	0,92	-
Sulawesi Selatan	1,42	97,66	0,90	0,03
Sulawesi Tenggara	1,74	98,04	-	0,22
Gorontalo	1,73	97,71	0,56	-
Sulawesi Barat	1,30	98,64	0,06	-
Maluku	0,44	96,91	0,16	2,49
Maluku Utara	-	100,00	-	-
Papua Barat	1,57	97,57	0,86	-
Papua	1,36	97,45	1,19	-
<b>Indonesia</b>	<b>1,26</b>	<b>97,01</b>	<b>1,62</b>	<b>0,12</b>

**Tabel 3.4.8 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Kendaraan Bermotor dan Merawat Mesin Kendaraannya Secara Rutin Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan Bermotor**

Provinsi	Sepeda motor	Mobil	Sepeda motor & Mobil	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	72,40	81,86	91,62	74,33
Sumatera Utara	77,19	93,73	87,16	78,25
Sumatera Barat	79,66	94,56	93,00	81,75
Riau	78,59	82,86	94,82	80,57
Jambi	70,79	100,00	93,66	73,70
Sumatera Selatan	76,52	85,60	95,02	78,94
Bengkulu	76,38	100,00	94,56	78,88
Lampung	78,44	89,76	89,83	79,50
Kep. Bangka Belitung	76,91	80,37	91,87	79,60
Kepulauan Riau	83,95	85,67	95,41	86,23
DKI Jakarta	88,68	99,11	99,25	90,72
Jawa Barat	82,31	97,33	91,80	83,57
Jawa Tengah	80,58	87,00	90,79	81,72
DI Yogyakarta	71,36	100,00	87,98	74,04
Jawa Timur	76,91	74,58	93,47	78,50
Banten	80,42	93,41	93,86	82,27
Bali	90,06	57,45	89,08	89,71
Nusa Tenggara Barat	80,17	41,89	95,08	81,47
Nusa Tenggara Timur	90,04	100,00	95,56	90,79
Kalimantan Barat	80,17	100,00	86,97	80,74
Kalimantan Tengah	83,98	100,00	97,32	85,35
Kalimantan Selatan	84,05	100,00	95,54	85,17
Kalimantan Timur	85,40	98,54	97,49	87,08
Sulawesi Utara	87,12	94,79	93,39	88,71
Sulawesi Tengah	81,80	100,00	88,94	82,54
Sulawesi Selatan	81,00	91,80	93,65	83,10
Sulawesi Tenggara	76,74	65,61	88,63	77,92
Gorontalo	87,84	78,32	91,38	88,04
Sulawesi Barat	72,13	100,00	73,38	72,46
Maluku	87,07	89,61	100,00	87,97
Maluku Utara	84,47	100,00	98,34	85,40
Papua Barat	88,38	99,28	91,24	88,89
Papua	90,59	86,54	76,25	88,38
<b>Indonesia</b>	<b>80,13</b>	<b>91,95</b>	<b>92,54</b>	<b>81,67</b>

**Tabel 3.4.9 Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi Menurut Provinsi dan Jenis Usaha yang Dilakukan**

Provinsi	Persentase rumah tangga yang mengurangi penggunaan kendaraan bermotor	Jenis Usaha				
		Menggunakan kendaraan umum tanpa rute tertentu	Menggunakan kendaraan umum rute tertentu	Jalan kaki/ sepeda	Menggunakan kendaraan secara bersama	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	20,83	7,41	23,72	60,63	67,39	23,63
Sumatera Utara	22,46	10,28	35,09	66,21	43,59	27,68
Sumatera Barat	19,00	19,55	32,67	65,21	38,87	14,00
Riau	19,37	6,50	11,55	63,59	47,36	27,27
Jambi	13,09	12,82	15,20	54,77	56,76	25,53
Sumatera Selatan	18,08	19,73	31,95	65,95	33,81	26,60
Bengkulu	19,78	10,55	5,34	72,84	46,39	31,89
Lampung	19,75	12,32	16,05	70,28	44,56	17,18
Kep. Bangka Belitung	16,97	1,05	14,44	54,03	63,56	31,69
Kepulauan Riau	15,84	11,11	18,70	43,96	48,15	26,95
DKI Jakarta	19,26	19,12	55,46	53,97	54,16	29,66
Jawa Barat	20,04	20,18	39,55	55,69	36,90	18,36
Jawa Tengah	19,81	9,47	32,36	70,60	40,70	17,10
DI Yogyakarta	19,07	1,84	8,85	64,53	19,56	22,90
Jawa Timur	17,56	9,16	20,50	76,70	46,89	18,96
Banten	16,61	24,64	49,35	58,80	24,24	13,30
Bali	23,72	0,49	9,89	57,75	58,77	17,27
Nusa Tenggara Barat	30,06	17,65	29,91	63,54	65,52	29,84
Nusa Tenggara Timur	25,33	29,76	27,69	62,98	22,11	15,24
Kalimantan Barat	15,66	4,87	18,98	57,05	59,76	21,98
Kalimantan Tengah	23,57	9,59	10,27	71,06	37,93	26,00
Kalimantan Selatan	20,09	7,94	9,97	60,68	65,56	18,39
Kalimantan Timur	11,77	10,14	13,40	49,01	52,30	26,69
Sulawesi Utara	28,77	37,61	52,39	54,86	27,06	6,13
Sulawesi Tengah	22,87	13,93	6,34	62,31	43,23	19,51
Sulawesi Selatan	21,02	20,68	25,93	61,26	43,63	20,99
Sulawesi Tenggara	24,25	20,89	15,70	74,30	33,46	16,70
Gorontalo	29,50	21,14	15,87	53,57	42,66	5,82
Sulawesi Barat	19,41	10,06	32,10	78,20	33,47	13,26
Maluku	29,05	17,81	43,19	56,27	41,32	28,19
Maluku Utara	18,16	24,34	8,88	77,11	30,15	16,84
Papua Barat	21,80	25,90	26,60	53,64	24,90	23,32
Papua	14,35	13,27	58,96	38,01	33,95	6,96
<b>Indonesia</b>	<b>19,44</b>	<b>13,73</b>	<b>28,84</b>	<b>64,34</b>	<b>43,32</b>	<b>20,31</b>

**Tabel 3.4.10 Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi Menurut Provinsi dan Alasan Utama Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor**

Provinsi	Alasan Utama Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor					
	Penghematan Biaya	Peduli Lingkungan	Aktivitas berkurang	Semakin mudah mengakses kendaraan umum	Menghindari macet	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	85,73	2,06	2,08	3,53	0,47	6,14
Sumatera Utara	85,69	1,85	3,03	2,94	0,46	6,03
Sumatera Barat	82,57	0,22	3,27	4,90	0,83	8,21
Riau	83,19	1,09	3,60	4,04	1,05	7,03
Jambi	67,57	1,61	3,82	16,64	1,19	9,17
Sumatera Selatan	85,73	0,91	2,00	2,76	0,89	7,71
Bengkulu	84,12	1,26	6,10	2,29	-	6,23
Lampung	85,13	-	1,76	7,66	1,20	4,24
Kep. Bangka Belitung	87,05	0,91	5,85	1,82	-	4,37
Kepulauan Riau	62,41	1,24	1,72	4,22	0,66	29,75
DKI Jakarta	65,76	5,17	3,42	9,37	9,33	6,94
Jawa Barat	62,43	3,29	4,58	10,11	3,45	16,14
Jawa Tengah	78,69	0,55	4,41	7,45	1,17	7,73
DI Yogyakarta	69,12	1,42	4,71	8,19	-	16,56
Jawa Timur	86,33	1,04	3,31	4,73	0,18	4,41
Banten	62,49	2,19	5,26	14,27	3,78	12,01
Bali	74,76	2,39	2,90	7,30	0,94	11,71
Nusa Tenggara Barat	83,77	0,95	1,24	5,86	0,91	7,26
Nusa Tenggara Timur	71,05	1,76	7,41	7,79	-	11,99
Kalimantan Barat	88,37	2,59	0,68	3,51	-	4,85
Kalimantan Tengah	83,21	1,01	0,81	7,80	-	7,18
Kalimantan Selatan	79,52	1,69	1,57	12,13	0,89	4,20
Kalimantan Timur	81,25	3,53	1,19	4,65	-	9,39
Sulawesi Utara	76,90	1,01	1,42	10,42	-	10,26
Sulawesi Tengah	86,77	0,94	2,90	3,61	-	5,79
Sulawesi Selatan	78,16	1,18	2,88	6,27	2,17	9,34
Sulawesi Tenggara	78,90	1,81	2,21	8,67	1,04	7,37
Gorontalo	80,87	2,27	1,71	11,07	-	4,09
Sulawesi Barat	74,08	0,88	4,47	11,40	-	9,17
Maluku	62,59	2,87	6,01	4,46	-	24,07
Maluku Utara	74,69	-	3,92	16,43	-	4,96
Papua Barat	65,76	1,57	6,83	14,58	-	11,25
Papua	68,63	1,35	1,87	11,38	0,52	16,25
<b>Indonesia</b>	<b>76,84</b>	<b>1,74</b>	<b>3,52</b>	<b>7,23</b>	<b>1,66</b>	<b>9,02</b>

## Pengelolaan Sampah

3.5

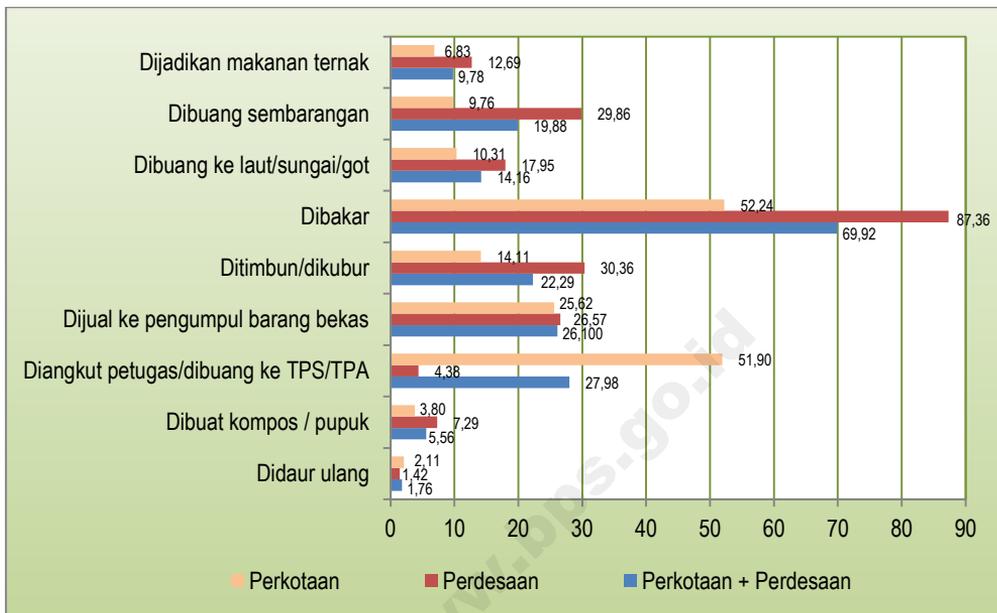
Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari masalah sampah karena setiap hari manusia menghasilkan sampah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas penduduk, maka jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya juga ikut bertambah. Peningkatan jumlah sampah ini harus disertai dengan pengelolaan sampah yang baik dan kontinyu yang dimulai dari skala rumah tangga, dimana rumah tangga merupakan sumber penghasil sampah yang utama. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan seluruh Indonesia yang dirangkum dalam publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2013 tentang produksi dan volume sampah yang terangkut di kota-kota besar, menunjukkan bahwa sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga belum bisa terangkut sepenuhnya oleh petugas kebersihan. Untuk itu diperlukan peran serta dari masyarakat dalam mengatasi masalah sampah dengan berperilaku pro lingkungan, seperti mengurangi volume sampah yang dihasilkan atau mendaur ulang sampah.

### 3.5.1 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Berdasarkan data yang dihasilkan dari SPPLH 2013 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga (61,41 persen) mengelola sampahnya dengan beberapa cara pembuangan sampah (lebih dari satu jenis perlakuan) dan sisanya sebesar 38,59 persen rumah tangga mengelola sampah hanya dengan satu jenis perlakuan saja. Cara pembuangan sampah yang paling banyak dilakukan oleh rumah tangga adalah dengan cara dibakar sebesar 69,92 persen (Grafik 3.5.1). Bahkan untuk rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan, persentase rumah tangga yang membakar sampah mencapai sekitar 87,36 persen. Angka tersebut mencerminkan bahwa perilaku masyarakat Indonesia dalam mengelola sampah masih kurang ramah lingkungan. Pembakaran sampah yang dilakukan mungkin memang menyelesaikan masalah penumpukan sampah, namun pembakaran sampah juga akan menimbulkan masalah baru yaitu polusi udara dan meningkatnya konsentrasi CO<sub>2</sub> di atmosfer. Asap atau gas CO<sub>2</sub> yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah tersebut akan menyebabkan semakin bertambahnya konsentrasi CO<sub>2</sub> yang ada di atmosfer, yang pada akhirnya akan

menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer sehingga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global.

**Grafik 3.5.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Perlakuan Terhadap Sampah dan Daerah Tempat Tinggal**



Jika dilihat menurut provinsi, persentase tertinggi rumah tangga yang membakar sampah terdapat di Provinsi Aceh yaitu sebesar 86,07 persen, diikuti Provinsi Gorontalo (86,07 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (84,04 persen), dan Provinsi Lampung (82,79 persen). Sementara provinsi dengan persentase terkecil rumah tangga yang membakar sampah tercatat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 12,65 persen (Tabel 3.5.1).

Selain membuang sampah dengan cara dibakar, perlakuan sampah yang juga kurang baik terhadap lingkungan adalah menimbun/mengubur sampah, membuang sampah ke got/sungai/laut, dan membuang sampah sembarangan. Perlakuan menimbun/mengubur sampah ternyata masih cukup banyak dilakukan oleh rumah tangga yaitu mencapai sekitar 22,29 persen. Sedangkan rumah tangga yang membuang sampah ke saluran got/sungai/laut tercatat sebesar 14,16 persen dan rumah tangga yang membuang sampah secara sembarangan sebesar 19,88 persen. Perlakuan terhadap sampah seperti ini tentunya dapat memperburuk kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal, karena selain menimbulkan polusi udara seperti bau, juga dapat menimbulkan banjir akibat tertutupnya saluran got atau aliran sungai. Di beberapa provinsi, persentase rumah tangga yang membuang sampah sembarangan bahkan mencapai lebih lima puluh persen yaitu tercatat di Provinsi Nusa

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Tabel 3.5.1 )

Sampah sepertinya tampak tidak berguna, namun sesungguhnya sampah masih memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, misalnya sampah plastik didaur ulang menjadi barang kerajinan, sampah dedaunan, sayur dan buah atau sampah sisa makanan bisa diolah kembali menjadi pupuk/kompos atau dimanfaatkan kembali menjadi makanan ternak. Data yang disajikan dalam Grafik 3.5.1 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang melakukan daur ulang sampah dan membuat sampah menjadi pupuk atau kompos masih sedikit yaitu berturut-turut sebesar 1,76 persen dan 5,56 persen. Sementara rumah tangga yang memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkan sebagai makanan ternak tercatat ada sekitar 9,78 persen. Rumah tangga yang tinggal di daerah pedesaan tercatat lebih banyak yang memanfaatkan kembali sampah sebagai makanan ternak dibandingkan daerah perkotaan yaitu 12,69 persen berbanding dengan 6,83 persen.

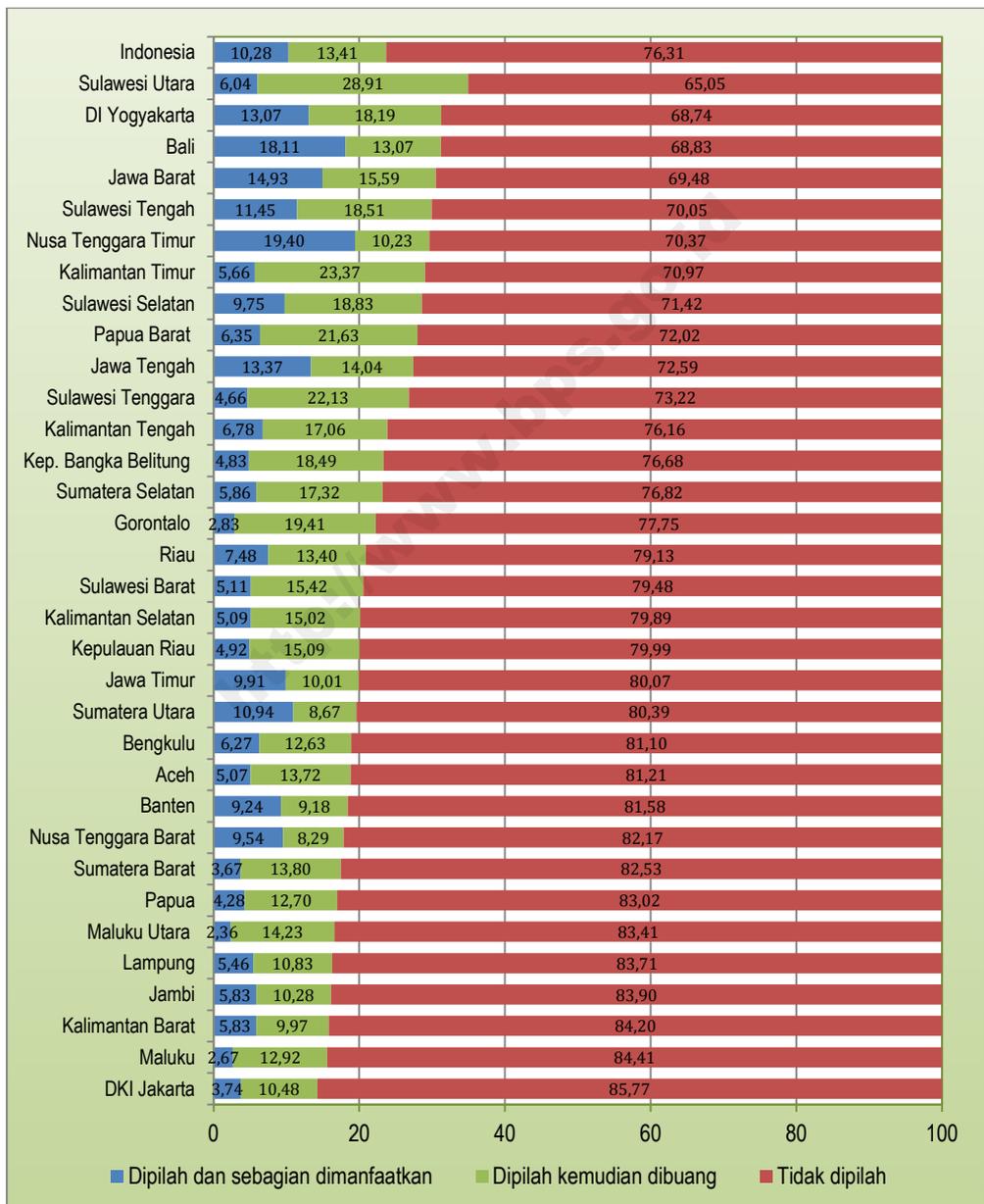
Sementara rumah tangga yang sampahnya diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA dan rumah tangga yang sampahnya dijual ke pengumpul barang bekas, persentasenya masih relatif rendah yaitu berturut-turut sebesar 27,98 persen dan 26,10 persen. Rumah tangga yang tinggal di perkotaan lebih banyak membuang sampahnya dengan cara diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA yaitu sebesar 51,90 persen dibandingkan dengan rumah tangga yang tinggal di pedesaan yaitu hanya 4,38 persen. Hal ini disebabkan adanya perbedaan fasilitas yang ada di perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan, seperti keberadaan TPS/TPA serta petugas pengangkut sampah.

Jika dilihat menurut perlakuan utama terhadap sampah, tercatat bahwa membuang sampah dengan cara dibakar merupakan perlakuan utama terhadap sampah yang paling banyak dilakukan oleh rumah tangga yaitu mencapai 53,06 persen (Tabel 3.5.2), diikuti cara membuang sampah dengan cara diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA (25,61 persen), dan dibuang ke got/sungai/laut sebesar 7,82 persen. Sebagian besar provinsi di Indonesia terlihat bahwa persentase terbesar cara membuang sampah yang utama oleh rumah tangga adalah dengan cara dibakar, kecuali untuk Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Timur, persentase terbesar cara membuang sampah adalah dengan cara diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA, dan untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara, persentase terbesar cara membuang sampah adalah dengan cara dibuang ke got/sungai/laut.

Pengelolaan sampah dalam rumah tangga idealnya harus dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang yaitu antara sampah yang mudah membusuk dan tidak mudah membusuk, karena hal ini akan memudahkan proses pengolahan sampah pada tahapan berikutnya. Data hasil SPPLH 2013 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan tingginya persentase rumah tangga yang menyatakan tidak memilah sampah yaitu sebesar 76,31 persen (Grafik 3.5.2). Sebanyak 13,41 persen rumah tangga menyatakan sudah memilah sampah namun semuanya dibuang (tidak ada yang dimanfaatkan

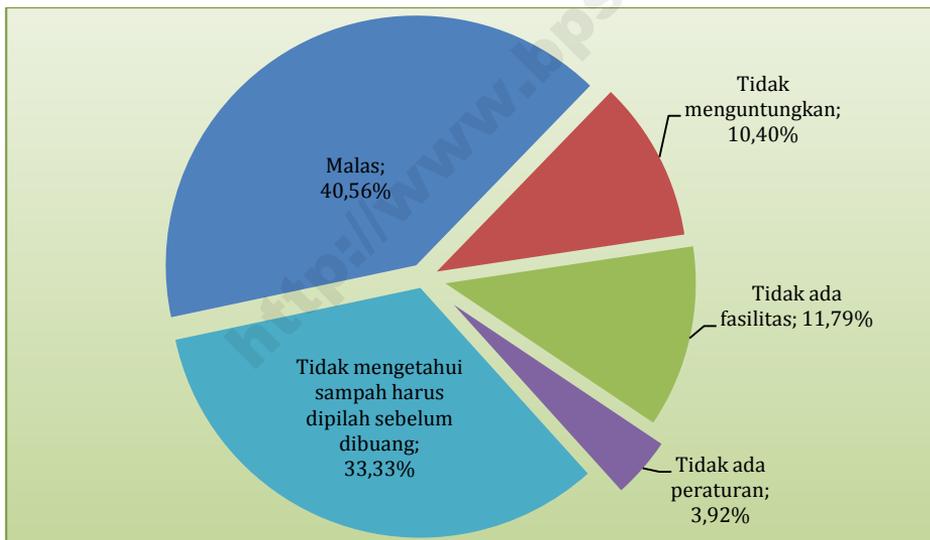
kembali) dan sebesar 10,28 persen rumah tangga sudah melakukan pemilahan sampah dan sebagian yang dipilah dimanfaatkan kembali seperti dibuat kompos, diberikan kepada pihak lain, dijual, didaur ulang dan dijadikan makanan ternak. Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah yaitu mencapai 34,95 persen, diikuti Provinsi DI Yogyakarta (31,26 persen) dan Bali (31,17 persen).

**Grafik 3.5.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perilaku Pemilahan Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk**



Rumah tangga yang tidak melakukan pemilahan sampah mudah membusuk dan tidak mudah membusuk tentunya memiliki alasan tertentu mengapa mereka tidak melakukan hal tersebut. Grafik 3.5.3 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga (40,56 persen) menyatakan malas untuk melakukan pemilahan sampah. Hal ini dimungkinkan karena rumah tangga merasa capek atau tidak ada waktu untuk melakukan pemilahan. Selebihnya sebesar 33,33 persen rumah tangga menyatakan tidak melakukan pemilahan sampah karena tidak mengetahui bahwa sampah harus dipilah sebelum dibuang. Sementara rumah tangga yang tidak melakukan pemilahan sampah karena alasan tidak ada fasilitas, tidak menguntungkan, dan tidak ada peraturan berturut-turut sebesar 11,79 persen; 10,40 persen; dan 3,92 persen. Masih banyaknya rumah tangga yang tidak mengetahui bahwa sampah harus dipilah sebelum dibuang, maka pemerintah perlu mengedukasi dan memberikan dukungan baik dari sisi infrastruktur dan perangkat hukum agar rumah tangga terbiasa melakukan pemilahan sampah.

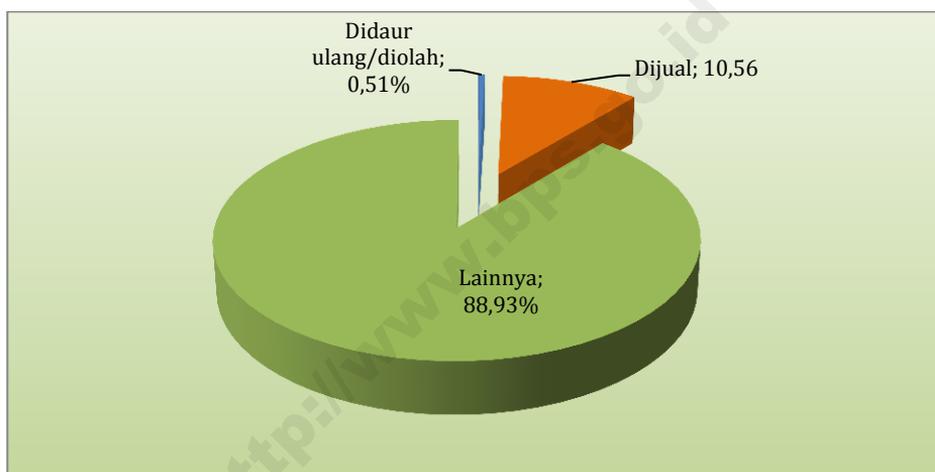
**Grafik 3.5.3 Persentase Rumah Tangga yang Tidak Melakukan Pemilahan Sampah Menurut Alasan Utama Tidak Melakukan Pemilahan Sampah**



Dilihat menurut Provinsi, sebagian besar rumah tangga di masing-masing provinsi menyatakan malas sebagai alasan utama mengapa tidak melakukan pemilahan sampah, dengan persentase tertinggi terdapat di Provinsi Bali yaitu mencapai 60,60 persen, diikuti Kepulauan Riau (47,00 persen) dan Jambi (46,76 persen). Sementara untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua, sebagian besar rumah tangganya menyatakan tidak mengetahui kalau sampah harus dipilah sebelum dibuang yaitu masing-masing mencapai 62,37 persen dan 58,91 persen (Tabel 3.5.4).

Sampah yang dihasilkan rumah tangga tidak hanya terbatas pada sampah sisa makanan saja, tapi juga terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah yang mengandung B3 baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Untuk itu pemilahan dan penanganan khusus sampah rumah tangga yang mengandung B3 sangat penting dilakukan untuk mengurangi efek samping yang ditimbulkan akibat pembuangan sampah B3 yang tidak dikelola dengan baik. Beberapa jenis sampah B3 rumah tangga seperti batu baterai bekas, neon dan bohlam bekas, kaleng bekas cat, kaleng bekas obat nyamuk, kosmetik atau pelumas kendaraan yang umumnya mengandung bahan-bahan yang menyebabkan iritasi atau gangguan kesehatan.

**Grafik 3.5.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Perlakuan Utama terhadap Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**



Grafik 3.5.4 menunjukkan bahwa sebanyak 0,51 persen rumah tangga membuang sampah B3 dengan cara di daur ulang/diolah dan sebanyak 10,56 persen rumah tangga menjual sampah B3 tersebut. Sementara sebagian sebesar (88,93 persen) rumah tangga menyatakan membuang sampah B3 dengan cara lainnya, seperti dibuang ke TPS/TPA, ditimbun/dikubur, dibakar, dibuang ke got/sungai/laut, dibuang sembarangan dan lain-lain. Cara pembuangan sampah seperti ini tentunya sangat tidak baik, karena akan berefek pada kerusakan lingkungan sekitar dan berakibat pada kesehatan manusia. Tabel 3.5.5 menunjukkan persentase rumah tangga menurut provinsi dan perlakuan utama terhadap sampah B3.

Barang bekas layak pakai seperti baju bekas, sepatu bekas, perkakas, dll bagi sebagian orang dianggap sebagai sampah dan hanya dibuang tanpa dimanfaatkan kembali, tapi bagi sebagian yang lain dianggap sebagai barang yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, bahkan dijual.

Sebagian besar rumah tangga memperlakukan barang bekas layak pakai untuk diberikan kepada orang lain dan dimanfaatkan untuk keperluan lain yaitu berturut-turut sebesar 41,41 persen dan 39,09 persen. Sedangkan rumah tangga yang tidak memanfaatkan barang bekas layak pakai dan hanya membuangnya tercatat sebesar 14,86 persen, dan sisanya sebesar 4,64 persen rumah tangga menjual barang bekas layak pakainya (Tabel 3.5.6).

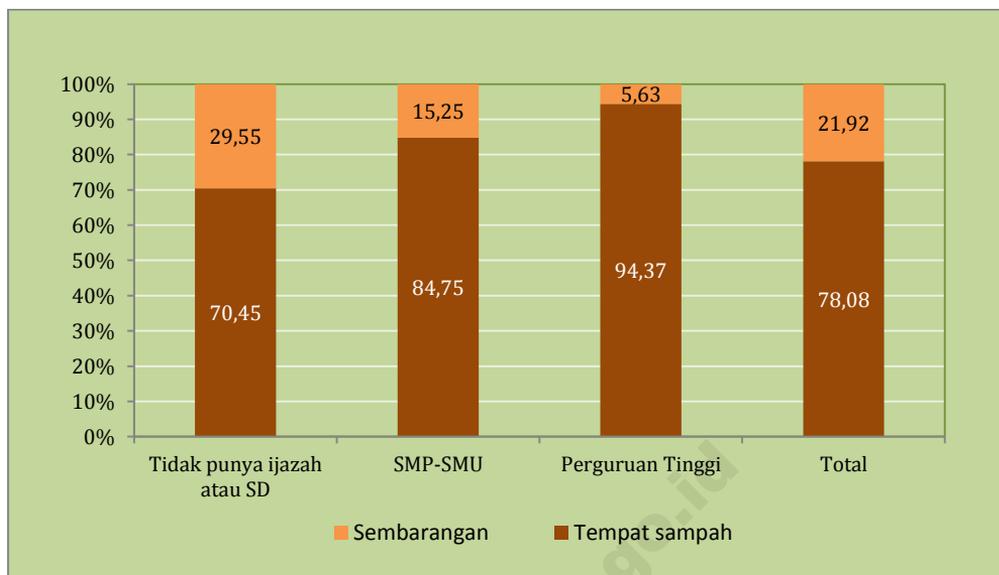
Selain mengelola sampah yang dihasilkan dengan perilaku yang ramah lingkungan, setiap rumah tangga hendaknya juga mengurangi sampah yang dihasilkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan rumah tangga dalam mengurangi sampah kantong plastik yaitu dengan cara membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja. Tabel 3.5.7 menunjukkan bahwa sebagian kecil rumah tangga yang sering membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja yaitu sekitar 10,07 persen. Di beberapa provinsi, persentase rumah tangga yang sering membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja sudah mencapai di atas 20 persen yaitu terjadi di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara.

### **3.5.2 Perilaku Membuang Sampah**

Pada SPPLH 2013, selain ditanyakan bagaimana pengelolaan sampah yang dihasilkan rumah tangga, ditanyakan pula bagaimana perilaku membuang sampah di dalam rumah untuk setiap penduduk yang telah berumur 10 tahun ke atas. Perlu disampaikan bahwa terdapat keterbatasan dalam data ini, sebab pertanyaan tersebut tidak ditanyakan secara langsung pada setiap penduduk berumur 10 tahun ke atas jika yang bersangkutan tidak berada di rumah pada saat wawancara, tetapi berdasarkan sepengetahuan responden yang mewakili rumah tangga tersebut.

Perilaku disiplin membuang sampah pada tempatnya oleh penduduk berumur 10 tahun ke atas dijadikan tolok ukur kepeduliannya terhadap terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat di dalam rumah. Yang dimaksud membuang sampah pada tempatnya adalah jika penduduk berumur 10 tahun ke atas membuang sampah seperti sampah bungkus makanan atau minuman, tissue bekas, kertas bekas, dll ke tempat sampah sementara (seperti kantong plastik/kantong kresek, tong, atau ember) yang disediakan di rumahnya sebelum rumah tangga membuangnya ke tempat pembuangan akhir.

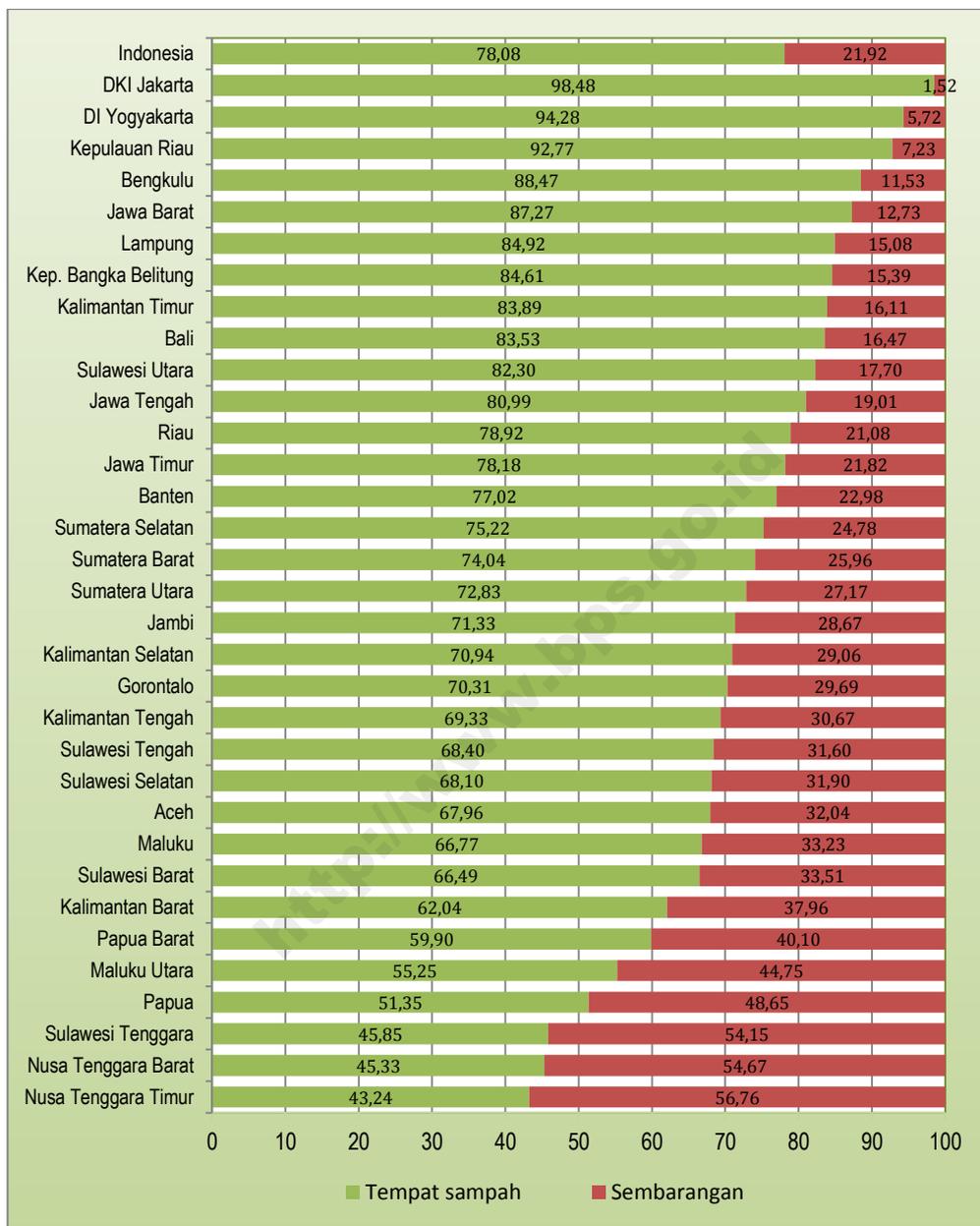
**Grafik 3.5.5 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Kebiasaan Membuang Sampah di Rumah**



Secara umum terlihat bahwa penduduk berumur 10 tahun ke atas yang selalu membuang sampah pada tempatnya tercatat sebesar 78,08 persen. Apabila perilaku membuang sampah pada tempatnya diamati berdasarkan tingkat pendidikannya, terlihat sebanyak 70,45 persen penduduk yang berpendidikan rendah (tidak punya ijazah atau hanya berijazah SD) membuang sampah pada tempatnya (Grafik 3.5.5). Penduduk yang berpendidikan SMP atau SMA yang membuang sampah pada tempatnya tercatat sebesar 84,75 persen dan penduduk yang berpendidikan perguruan tinggi tercatat sebanyak 94,37 persen yang membuang sampah pada tempatnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, maka cenderung berperilaku positif yaitu membuang sampah pada tempatnya.

Dilihat menurut provinsi, persentase tertinggi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang membuang sampah pada tempatnya terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu mencapai 98,48 persen, diikuti Provinsi DI Yogyakarta (94,28 persen) dan Kepulauan Riau (92,77 persen). Sementara di tiga provinsi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang membuang sampah pada tempatnya masih kurang dari separoh jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yaitu masing-masing baru mencapai 43,24 persen, 45,33 persen, dan 45,85 persen (Grafik 3.5.6).

**Grafik 3.5.6 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Kebiasaan Membuang Sampah di Rumah**



**Tabel 3.5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perlakuan Terhadap Sampah**

Provinsi	Didaur ulang	Dibuat kompos	Diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA	Dijual ke pengumpul barang bekas	Ditimbun/dikubur	Dibakar	Dibuang ke laut/sungai/got	Dibuang sembarangan	Dijadikan makanan ternak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	0,94	1,84	15,71	21,28	24,78	87,37	17,16	25,72	7,91
Sumatera Utara	1,84	7,36	24,09	25,07	16,76	77,63	10,68	18,28	11,05
Sumatera Barat	1,56	4,77	20,79	16,19	15,34	80,46	15,33	19,65	9,25
Riau	1,10	3,72	21,31	18,26	21,58	81,29	8,54	14,60	5,28
Jambi	1,19	4,01	22,31	17,09	18,69	78,23	20,17	23,38	7,65
Sumatera Selatan	0,91	3,14	22,40	17,07	19,35	74,70	21,64	23,62	8,65
Bengkulu	1,01	4,11	23,31	18,52	22,52	79,60	15,07	14,79	12,64
Lampung	1,15	7,33	16,29	25,45	28,22	82,79	4,41	11,97	5,45
Kep. Bangka Belitung	1,16	4,01	31,13	11,24	20,73	77,39	8,51	25,71	9,38
Kepulauan Riau	2,79	5,09	75,22	10,48	8,88	43,70	10,29	6,36	2,98
DKI Jakarta	2,05	1,51	93,99	15,12	1,15	12,65	0,99	1,26	1,01
Jawa Barat	1,76	5,96	31,57	31,37	17,92	68,50	14,74	16,77	10,01
Jawa Tengah	2,43	8,77	17,95	37,33	31,20	76,00	15,11	16,32	10,17
DI Yogyakarta	0,37	11,94	33,32	41,92	33,93	71,30	6,12	4,04	13,42
Jawa Timur	1,93	6,25	22,04	36,35	30,63	72,46	11,37	14,48	4,50
Banten	3,20	3,89	41,96	24,72	14,25	56,55	7,86	30,04	4,48
Bali	0,47	4,66	42,04	43,91	14,92	55,39	4,99	24,43	12,72
Nusa Tenggara Barat	0,85	2,60	14,55	13,81	21,44	63,04	33,83	51,42	5,43
Nusa Tenggara Timur	1,91	8,61	7,37	4,49	20,75	84,04	6,86	54,32	43,83
Kalimantan Barat	0,72	3,53	16,09	12,09	18,12	81,24	19,77	33,41	9,25
Kalimantan Tengah	3,85	5,76	26,11	10,15	29,52	77,76	35,28	30,34	14,87
Kalimantan Selatan	2,71	2,51	31,47	10,17	21,18	67,82	25,41	27,38	11,58
Kalimantan Timur	1,20	3,66	58,95	8,07	12,85	47,61	14,94	9,36	11,49
Sulawesi Utara	1,43	2,35	38,75	6,17	26,32	70,50	17,21	13,04	13,06
Sulawesi Tengah	0,55	1,46	14,07	7,51	24,97	82,08	20,49	25,48	20,79
Sulawesi Selatan	1,61	2,11	23,64	15,50	19,29	72,02	18,78	32,59	25,10
Sulawesi Tenggara	0,93	3,54	23,89	5,61	22,54	69,05	16,17	51,65	12,91
Gorontalo	0,86	0,75	13,19	1,66	8,78	86,07	18,63	16,42	8,99
Sulawesi Barat	0,92	0,68	12,93	6,02	20,39	74,65	20,10	52,60	50,37
Maluku	1,85	4,09	24,05	4,13	17,33	63,69	47,25	24,43	14,52
Maluku Utara	0,05	0,71	22,48	2,03	23,15	62,32	52,32	33,58	10,66
Papua Barat	0,71	2,74	22,18	5,32	20,77	75,05	29,82	29,93	16,79
Papua	0,30	4,40	16,10	2,73	26,63	78,57	26,08	47,96	19,90
<b>Indonesia</b>	<b>1,76</b>	<b>5,56</b>	<b>27,98</b>	<b>26,10</b>	<b>22,29</b>	<b>69,92</b>	<b>14,16</b>	<b>19,88</b>	<b>9,78</b>

**Tabel 3.5.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perlakuan Utama Terhadap Sampah**

Provinsi	Didaur ulang	Dibuat kompos	Diangkut petugas/ dibuang ke TPS/TPA	Dijual ke pengumpul barang bekas	Ditimbun/ dikubur	Dibakar	Dibuang ke laut/ sungai/ got	Dibuang sembarangan	Dijadikan makanan ternak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	0,08	0,47	13,52	0,07	3,40	71,38	4,78	6,30	0,01
Sumatera Utara	0,11	1,12	20,67	0,18	2,06	64,76	5,56	5,48	0,06
Sumatera Barat	0,22	0,08	18,43	0,09	2,38	65,74	6,60	6,45	-
Riau	0,29	0,08	19,17	0,02	3,39	68,74	3,51	4,49	0,29
Jambi	0,03	0,39	18,36	0,13	2,06	62,07	10,76	6,16	0,05
Sumatera Selatan	-	0,32	19,96	0,25	2,31	57,31	13,12	6,54	0,20
Bengkulu	0,11	0,29	17,75	0,38	1,71	68,55	7,78	3,43	-
Lampung	0,04	1,25	14,23	0,34	2,48	75,31	3,23	2,98	0,13
Kep. Bangka Belitung	0,28	0,58	25,46	-	1,79	55,37	4,95	11,57	-
Kepulauan Riau	0,07	0,22	69,26	-	0,09	23,22	6,24	0,91	-
DKI Jakarta	0,04	0,14	92,43	0,63	-	5,88	0,71	0,16	-
Jawa Barat	0,26	0,68	28,57	0,62	3,34	52,55	8,16	5,66	0,16
Jawa Tengah	0,37	2,26	16,65	0,52	8,80	58,66	7,94	4,71	0,09
DI Yogyakarta	0,09	2,34	30,86	0,10	6,58	57,12	1,20	1,69	-
Jawa Timur	0,40	0,80	20,78	0,66	7,92	57,85	6,93	4,49	0,17
Banten	0,97	0,13	38,71	1,13	2,13	41,04	3,71	12,17	-
Bali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bali	0,14	1,59	40,06	1,54	4,99	32,23	2,29	17,17	-
Nusa Tenggara Barat	0,08	1,09	13,44	0,36	3,12	35,32	22,96	23,65	-
Nusa Tenggara Timur	0,03	1,58	5,47	-	3,90	56,50	2,35	28,48	1,69
Kalimantan Barat	-	0,45	13,80	-	2,33	63,20	7,82	12,33	0,07
Kalimantan Tengah	0,11	0,88	22,48	0,02	2,90	46,38	19,27	6,66	1,32
Kalimantan Selatan	0,17	0,19	28,81	0,13	2,86	45,52	14,13	7,95	0,23
Kalimantan Timur	0,05	0,15	55,25	0,07	0,53	31,43	9,82	2,41	0,29
Sulawesi Utara	0,23	0,23	33,64	0,08	4,95	45,52	10,60	4,74	-
Sulawesi Tengah	0,25	0,32	10,68	-	4,65	62,30	13,70	7,93	0,17
Sulawesi Selatan	0,15	0,31	20,84	0,44	5,07	48,93	10,96	12,53	0,77
Sulawesi Tenggara	0,09	1,68	20,31	-	5,84	34,40	11,50	25,75	0,43
Gorontalo	-	-	9,62	0,11	0,62	71,78	10,63	7,24	-
Sulawesi Barat	-	0,19	9,63	-	5,63	47,71	12,81	23,58	0,45
Maluku	-	0,39	22,51	-	3,33	31,28	36,29	6,05	0,16
Maluku Utara	-	-	19,29	-	4,73	25,75	40,38	9,86	-
Papua Barat	-	0,47	18,26	0,36	1,92	49,55	14,71	14,12	0,61
Papua	0,02	0,62	12,61	-	4,11	46,95	7,42	28,12	0,14
<b>Indonesia</b>	<b>0,25</b>	<b>0,89</b>	<b>25,61</b>	<b>0,46</b>	<b>4,61</b>	<b>53,06</b>	<b>7,82</b>	<b>7,12</b>	<b>0,18</b>

**Tabel 3.5.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perlakuan Memilah Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk**

Provinsi	Sampah dipilah			Sampah Tidak dipilah
	Dipilah dan sebagian dimanfaatkan	Dipilah kemudian dibuang	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	5,07	13,72	18,79	81,21
Sumatera Utara	10,94	8,67	19,61	80,39
Sumatera Barat	3,67	13,80	17,47	82,53
Riau	7,48	13,40	20,87	79,13
Jambi	5,83	10,28	16,10	83,90
Sumatera Selatan	5,86	17,32	23,18	76,82
Bengkulu	6,27	12,63	18,90	81,10
Lampung	5,46	10,83	16,29	83,71
Kep. Bangka Belitung	4,83	18,49	23,32	76,68
Kepulauan Riau	4,92	15,09	20,01	79,99
DKI Jakarta	3,74	10,48	14,23	85,77
Jawa Barat	14,93	15,59	30,52	69,48
Jawa Tengah	13,37	14,04	27,41	72,59
DI Yogyakarta	13,07	18,19	31,26	68,74
Jawa Timur	9,91	10,01	19,93	80,07
Banten	9,24	9,18	18,42	81,58
Bali	18,11	13,07	31,17	68,83
Nusa Tenggara Barat	9,54	8,29	17,83	82,17
Nusa Tenggara Timur	19,40	10,23	29,63	70,37
Kalimantan Barat	5,83	9,97	15,80	84,20
Kalimantan Tengah	6,78	17,06	23,84	76,16
Kalimantan Selatan	5,09	15,02	20,11	79,89
Kalimantan Timur	5,66	23,37	29,03	70,97
Sulawesi Utara	6,04	28,91	34,95	65,05
Sulawesi Tengah	11,45	18,51	29,95	70,05
Sulawesi Selatan	9,75	18,83	28,58	71,42
Sulawesi Tenggara	4,66	22,13	26,78	73,22
Gorontalo	2,83	19,41	22,25	77,75
Sulawesi Barat	5,11	15,42	20,52	79,48
Maluku	2,67	12,92	15,59	84,41
Maluku Utara	2,36	14,23	16,59	83,41
Papua Barat	6,35	21,63	27,98	72,02
Papua	4,28	12,70	16,98	83,02
<b>Indonesia</b>	<b>10,28</b>	<b>13,41</b>	<b>23,69</b>	<b>76,31</b>

**Tabel 3.5.4. Persentase Rumah Tangga yang Tidak Melakukan Pemilahan Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk Menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Melakukan Pemilahan Sampah**

Provinsi	Malas	Tidak menguntungkan	Tidak ada fasilitas	Tidak ada peraturan	Tidak mengetahui sampah harus dipilah sebelum dibuang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	34,13	15,22	11,66	4,44	34,56
Sumatera Utara	41,90	16,64	8,52	4,31	28,64
Sumatera Barat	41,01	16,41	10,97	2,86	28,75
Riau	36,55	14,08	10,68	3,84	34,85
Jambi	46,76	14,01	11,02	3,53	24,67
Sumatera Selatan	44,17	21,98	7,46	4,26	22,14
Bengkulu	40,59	12,72	15,07	1,83	29,79
Lampung	44,62	6,59	7,90	2,29	38,60
Kep. Bangka Belitung	46,87	13,96	14,24	3,31	21,62
Kepulauan Riau	47,00	12,80	19,69	3,88	16,63
DKI Jakarta	37,73	2,39	30,09	6,41	23,38
Jawa Barat	45,01	6,39	14,20	4,57	29,83
Jawa Tengah	44,32	11,92	7,75	2,64	33,37
DI Yogyakarta	41,30	9,17	14,96	3,07	31,50
Jawa Timur	35,15	10,69	10,58	4,67	38,91
Banten	45,48	7,71	12,96	3,76	30,09
Bali	60,60	10,99	13,26	1,22	13,92
Nusa Tenggara Barat	36,43	8,89	5,06	2,67	46,95
Nusa Tenggara Timur	16,45	14,89	4,56	1,74	62,37
Kalimantan Barat	43,22	7,53	9,03	4,10	36,11
Kalimantan Tengah	42,27	5,97	16,29	4,49	30,98
Kalimantan Selatan	38,07	8,16	16,73	3,33	33,72
Kalimantan Timur	44,25	7,50	16,25	4,89	27,11
Sulawesi Utara	28,26	15,92	8,66	13,23	33,92
Sulawesi Tengah	33,62	6,82	13,82	2,56	43,19
Sulawesi Selatan	42,42	7,92	11,37	2,99	35,30
Sulawesi Tenggara	27,85	16,39	13,56	2,30	39,89
Gorontalo	30,09	13,94	11,96	1,07	42,94
Sulawesi Barat	45,91	9,30	6,94	1,54	36,30
Maluku	26,77	21,94	12,46	3,79	35,03
Maluku Utara	31,06	17,65	13,67	7,42	30,21
Papua Barat	44,48	13,88	8,32	4,37	28,95
Papua	21,16	10,31	7,25	2,36	58,91
<b>Indonesia</b>	<b>40,56</b>	<b>10,40</b>	<b>11,79</b>	<b>3,92</b>	<b>33,33</b>

**Tabel 3.5.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perlakuan Terhadap Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Provinsi	Didaur ulang	Diolah	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,30	9,10	90,60
Sumatera Utara	0,62	10,31	89,08
Sumatera Barat	0,76	4,49	94,75
Riau	0,26	7,63	92,12
Jambi	0,48	7,48	92,04
Sumatera Selatan	0,37	7,33	92,31
Bengkulu	0,29	2,23	97,48
Lampung	0,19	11,22	88,60
Kep. Bangka Belitung	-	4,44	95,56
Kepulauan Riau	0,97	2,58	96,46
DKI Jakarta	1,33	3,22	95,44
Jawa Barat	0,44	12,78	86,78
Jawa Tengah	0,52	16,13	83,34
DI Yogyakarta	-	14,04	85,96
Jawa Timur	0,75	16,53	82,72
Banten	0,92	9,04	90,03
Bali	0,12	20,74	79,14
Nusa Tenggara Barat	0,29	2,18	97,53
Nusa Tenggara Timur	0,01	0,57	99,42
Kalimantan Barat	0,62	3,84	95,54
Kalimantan Tengah	0,96	1,69	97,35
Kalimantan Selatan	0,09	1,64	98,27
Kalimantan Timur	0,40	1,76	97,84
Sulawesi Utara	0,64	0,45	98,91
Sulawesi Tengah	0,09	1,80	98,11
Sulawesi Selatan	0,13	5,18	94,69
Sulawesi Tenggara	0,03	1,53	98,44
Gorontalo	0,14	0,41	99,45
Sulawesi Barat	0,08	0,40	99,51
Maluku	0,27	0,05	99,68
Maluku Utara	0,05	0,47	99,48
Papua Barat	-	1,43	98,57
Papua	0,11	-	99,89
<b>Indonesia</b>	<b>0,51</b>	<b>10,56</b>	<b>88,93</b>

**Tabel 3.5.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perlakuan Utama Terhadap Barang Bekas Layak Pakai**

Provinsi	Dibuang	Dijual	Diberikan kepada orang lain	Dimanfaatkan untuk keperluan lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	11,34	1,75	30,95	55,95
Sumatera Utara	11,58	4,35	35,11	48,95
Sumatera Barat	12,76	4,11	33,03	50,10
Riau	12,91	2,54	33,28	51,27
Jambi	12,16	2,98	36,43	48,43
Sumatera Selatan	15,08	2,76	33,14	49,02
Bengkulu	15,33	2,90	36,97	44,80
Lampung	21,19	3,58	34,67	40,57
Kep. Bangka Belitung	14,89	1,02	41,85	42,23
Kepulauan Riau	13,53	1,25	55,24	29,98
DKI Jakarta	6,94	5,17	73,29	14,60
Jawa Barat	9,59	3,33	51,13	35,95
Jawa Tengah	21,84	10,24	32,05	35,88
DI Yogyakarta	19,82	4,83	46,98	28,37
Jawa Timur	17,21	7,72	40,83	34,25
Banten	9,74	4,30	52,82	33,13
Bali	27,03	1,52	40,82	30,63
Nusa Tenggara Barat	16,58	0,53	27,44	55,45
Nusa Tenggara Timur	35,91	0,16	25,65	38,28
Kalimantan Barat	17,61	2,36	32,23	47,80
Kalimantan Tengah	11,10	1,55	41,31	46,05
Kalimantan Selatan	9,64	1,54	52,34	36,48
Kalimantan Timur	11,89	0,97	50,10	37,04
Sulawesi Utara	10,74	0,77	54,63	33,86
Sulawesi Tengah	7,75	0,51	37,03	54,72
Sulawesi Selatan	7,53	0,79	37,52	54,16
Sulawesi Tenggara	6,86	0,27	21,70	71,17
Gorontalo	7,84	0,23	45,35	46,58
Sulawesi Barat	3,58	0,12	35,38	60,91
Maluku	13,95	0,16	38,68	47,21
Maluku Utara	16,34	0,56	18,08	65,03
Papua Barat	17,41	0,08	31,64	50,87
Papua	32,22	1,02	22,96	43,80
<b>Indonesia</b>	<b>14,86</b>	<b>4,64</b>	<b>41,41</b>	<b>39,09</b>

**Tabel 3.5.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Frekuensi Membawa Tas Belanja Sendiri Ketika Berbelanja**

Provinsi	Tidak pernah	Kadang-kadang	Sering
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	80,29	16,17	3,53
Sumatera Utara	67,54	21,98	10,47
Sumatera Barat	69,23	18,62	12,15
Riau	57,86	20,38	21,77
Jambi	79,57	16,87	3,56
Sumatera Selatan	55,27	22,21	22,52
Bengkulu	70,65	13,53	15,81
Lampung	64,00	24,16	11,85
Kep. Bangka Belitung	83,91	13,06	3,03
Kepulauan Riau	91,89	4,97	3,14
DKI Jakarta	91,44	4,93	3,63
Jawa Barat	85,71	11,36	2,92
Jawa Tengah	60,09	26,56	13,35
DI Yogyakarta	59,91	16,39	23,70
Jawa Timur	59,92	29,29	10,78
Banten	80,09	16,80	3,11
Bali	71,49	15,90	12,60
Nusa Tenggara Barat	64,64	20,41	14,96
Nusa Tenggara Timur	51,41	23,49	25,11
Kalimantan Barat	85,11	12,37	2,52
Kalimantan Tengah	62,01	24,97	13,02
Kalimantan Selatan	58,46	28,30	13,24
Kalimantan Timur	78,59	16,60	4,81
Sulawesi Utara	58,77	23,55	17,68
Sulawesi Tengah	62,23	19,54	18,23
Sulawesi Selatan	64,57	18,65	16,77
Sulawesi Tenggara	49,00	21,69	29,31
Gorontalo	65,79	15,15	19,06
Sulawesi Barat	80,93	11,08	8,00
Maluku	81,41	11,98	6,62
Maluku Utara	62,24	24,14	13,62
Papua Barat	63,79	26,15	10,06
Papua	72,00	20,07	7,93
<b>Indonesia</b>	<b>70,20</b>	<b>19,74</b>	<b>10,07</b>

## Peduli Lingkungan Sekitar

3.6

Perilaku peduli lingkungan hidup ditunjukkan salah satunya dengan kepedulian rumah tangga terhadap lingkungan sekitar. Perilaku yang ditanyakan dalam SPPLH 2013 untuk menyatakan kepedulian lingkungan sekitar diantaranya adalah kebiasaan merokok anggota rumah tangga, partisipasi dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah, dan upaya responden ketika terjadi pencemaran di lingkungan sekitar rumahnya.

### 3.6.1 Perilaku Merokok

Merokok dapat menyebabkan penurunan kualitas kesehatan pada perokok. Kebiasaan merokok tidak hanya merugikan kesehatan bagi si perokok saja, tetapi juga orang lain di sekitar lingkungannya (perokok pasif). Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran napas dan jaringan paru-paru yang menyebabkan kanker paru-paru, bronkitis kronis dan asma (Tandra, H. 2003).

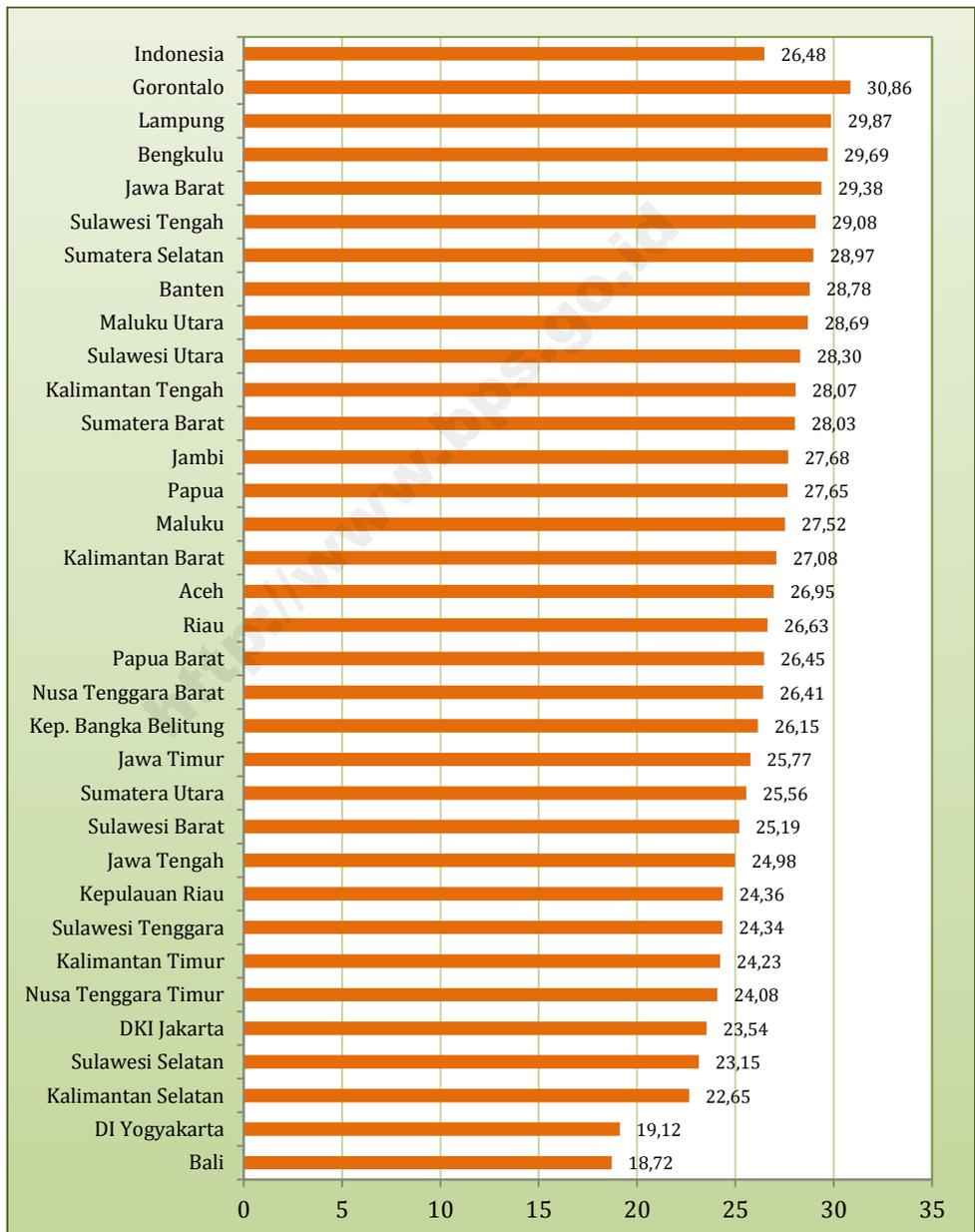
Selain menimbulkan dampak diatas, kebiasaan merokok juga berdampak pada lingkungan hidup, yaitu menyebabkan pencemaran udara dan pencemaran tanah. Pencemaran udara diantaranya dari kandungan kimia tembakau yang siap dijadikan rokok yang terdiri dari 2.500 komponen. Dari sejumlah komponen tersebut, 1.100 komponen diturunkan langsung menjadi asap rokok tanpa perubahan saat proses pembakaran. Sisanya 1.400 komponen bereaksi dengan komponen lain membentuk 4.800 komponen kimia dalam asap rokok (Rodgman dan Perfetti, 2006 dalam Tirtosastro, S dan A. S. Murdiyati. 2010).

Kerusakan lainnya adalah dari filter rokok yang dibuang ke tanah karena filter tersebut terbuat dari bahan yang sulit terurai. Dalam suatu penelitian diketahui puntung rokok yang dibuang kedalam tanah baru bisa terurai dalam kurun waktu 10 hingga 12 tahun.

Dari hasil SPPLH 2013, diperoleh sebanyak 26,48 persen penduduk 10 tahun keatas yang merokok selama seminggu yang lalu (Grafik 3.6.1). Seseorang dikategorikan merokok jika selama seminggu yang lalu merokok minimal satu batang rokok. Persentase tertinggi penduduk 10 tahun keatas yang merokok terdapat di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 30,86 persen, diikuti Provinsi

Lampung (29,87 persen), Bengkulu (29,69 persen), dan Jawa Barat (29,38 persen). Sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Bali yaitu sebesar 18,72 persen. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk 10 tahun keatas yang merokok di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan yaitu 28,31 persen di perdesaan dan 24,69 persen di perkotaan (Tabel 3.6.1).

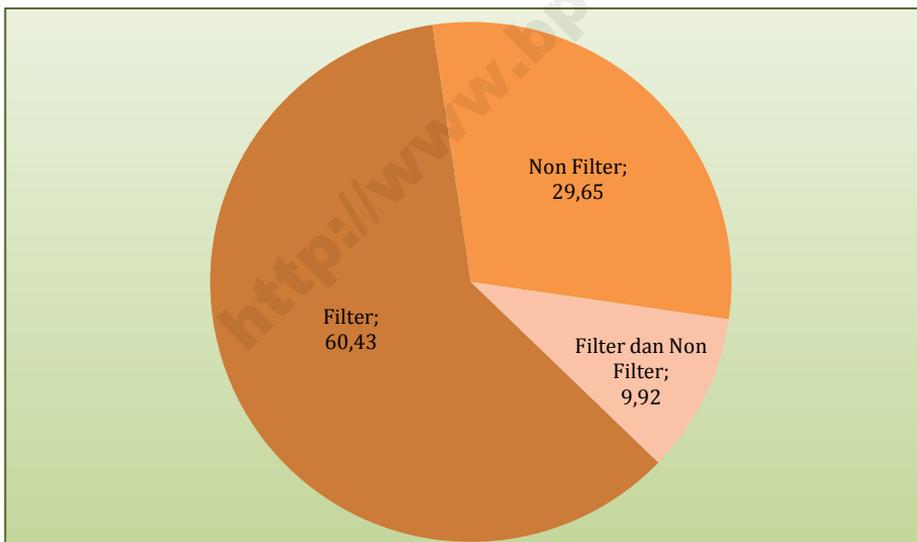
**Grafik 3.6.1** Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Merokok Seminggu yang Lalu Menurut Provinsi



Perilaku merokok remaja juga bisa dilihat dari struktur umur perokok aktif. Persentase penduduk umur 10 hingga 17 tahun yang merokok tercatat 2,45 persen (Tabel 3.6.2). Sementara untuk penduduk umur 18-24 tahun yang merokok tercatat sebesar 24,56 persen dan penduduk berumur lebih dari 25 tahun yang merokok tercatat sebesar 33,66 persen. Jika dilihat menurut provinsi, penduduk umur 10-17 tahun yang merokok tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,05 persen.

Selain struktur umur perokok aktif, jenis rokok juga ikut menentukan seberapa besar tekanan pencemaran udara dan tanah akibat perilaku merokok anggota rumah tangga. Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang merokok jenis rokok filter sebanyak 60,43 persen. Angka tersebut merupakan potensi yang besar untuk menyumbang sampah puntung rokok yang mengotori dan sulit diuraikan oleh tanah. Sementara penduduk berumur 10 tahun ke atas yang merokok jenis rokok non filter sebesar 29,65 persen, dan sisanya sebesar 9,92 persen merokok kedua-duanya (filter dan non filter).

**Grafik 3.6.2 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Merokok Menurut Jenis Rokok yang Dikonsumsi Seminggu yang Lalu**



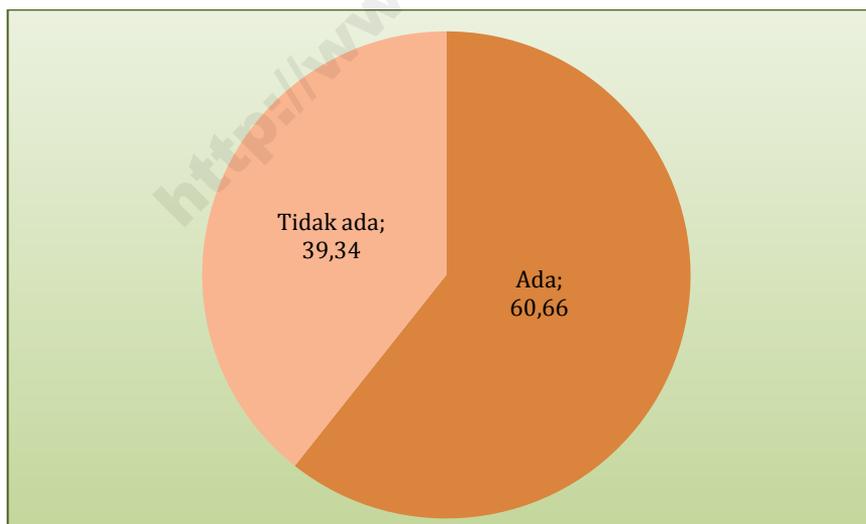
Berdasarkan Tabel 3.6.4 terlihat bahwa sebagian besar penduduk berumur 10 tahun ke atas yang merokok selama seminggu mengonsumsi rokok antara 8-70 batang rokok per minggu sebesar 47,00 persen dan mereka yang mengonsumsi rokok antara 71-140 batang per minggu tercatat sebesar 44,37 persen. Merokok sebanyak 8-70 batang per minggu berarti rata-rata dalam per hari merokok sebesar 1-10 batang. Adapun mereka yang merokok lebih dari 211 batang per minggu (rata-rata lebih dari 30 batang per hari) tercatat sebesar 1,39 persen.

### 3.6.2 Kerja Bakti

Budaya kerja bakti atau gotong royong merupakan modal sosial yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Kerja bakti memiliki arti melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Kerja bakti merupakan implementasi kewajiban sebagai warga masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi dan atau golongan, sementara haknya yang didapatkan warga masyarakat dari kegiatan kerja bakti adalah kepuasan secara batiniah dan jasmaniah (Khasanah, N. 2013).

Berdasarkan hasil survei SPPLH 2013, tercatat sebesar 60,66 persen rumah tangga menyatakan ada kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar rumahnya. Kerja bakti yang dimaksud adalah kerja bakti yang berhubungan dengan lingkungan. Dari kegiatan kerja bakti yang dilakukan rumah tangga, terdapat 88,24 persen anggota rumah tangga (ART) yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Angka ini mengindikasikan masih tingginya kepedulian rumah tangga sebagai bagian dari masyarakat untuk berkontribusi bagi kepentingan umum.

**Grafik 3.6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Kegiatan Kerja Bakti di Sekitar Lingkungan Rumah**

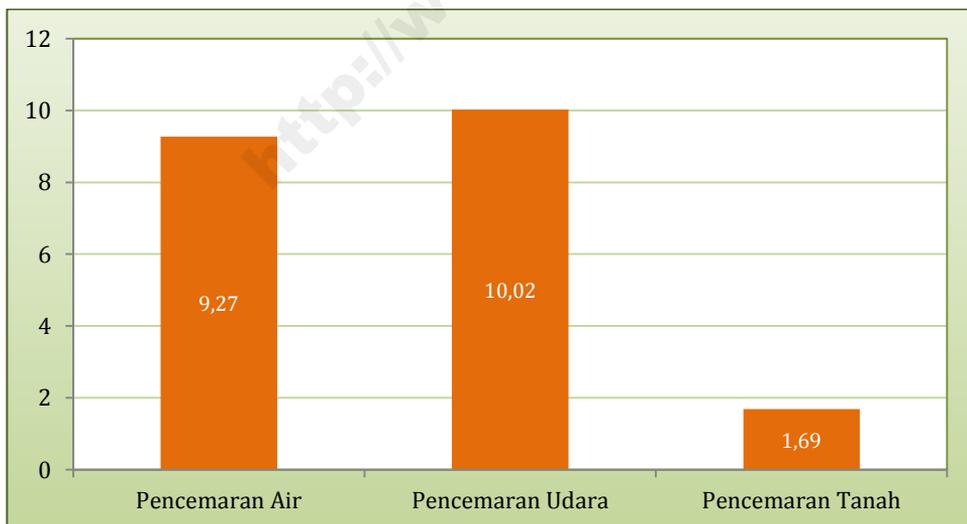


### 3.6.3. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan yang dimaksud dalam survei ini dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah.

Berdasarkan hasil survei SPPLH 2013, sebanyak 82,53 persen rumah tangga menyatakan tidak merasa terganggu terhadap kondisi/kualitas air, udara, dan tanah, atau dengan kata lain rumah tangga tidak merasakan adanya pencemaran di lingkungan sekitar rumah tangga. Pencemaran udara adalah gangguan yang paling sering dirasakan oleh rumah tangga yaitu sebesar 10,02 persen (Tabel 3.6.6). Pencemaran udara tertinggi dirasakan oleh rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yaitu mencapai 62,05 persen, diikuti Provinsi Riau sebesar 55,58 persen. Tingginya pencemaran udara yang dirasakan oleh rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau dimungkinkan karena sering terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap di kedua provinsi tersebut.

**Grafik 3.6.4** Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Gangguan Pencemaran Menurut Jenis Pencemaran



Gangguan kondisi/kualitas air (pencemaran air) dirasakan oleh sekitar 9,27 persen rumah tangga. Pencemaran air yang terbanyak dirasakan oleh rumah tangga terjadi di Provinsi Kalimantan

Barat dan Kalimantan Tengah yaitu masing-masing sebesar 25,41 persen dan 25,22 persen. Adapun untuk pencemaran tanah, jarang dirasakan oleh rumah tangga, yaitu hanya 1,69 persen rumah tangga yang menyatakan mengalami gangguan pencemaran tanah.

Tekanan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, udara, maupun tanah, perlu segera ditanggulangi. Rumah tangga yang peduli terhadap lingkungan sekitar memberikan upaya atau respon untuk mengatasi pencemaran yang terjadi. Upaya tersebut dapat berupa laporan/mengadu ke aparat setempat, menegur pelaku gangguan lingkungan, atau ikut menangani gangguan lingkungan dan dalam satu rumah tangga dapat melakukan lebih dari satu jenis upaya menanggulangi pencemaran. Dari Tabel 3.6.7 terlihat bahwa dari sejumlah rumah tangga yang mengalami pencemaran, tercatat sebanyak 27,09 persen rumah tangga melakukan upaya menanggulangi gangguan lingkungan/pencemaran. Dari rumah tangga yang menjawab ikut menanggulangi pencemaran, upaya yang paling banyak dilakukan adalah ikut menangani gangguan lingkungan yang terjadi (56,52 persen), diikuti upaya melaporkan/mengadu kepada aparat setempat (50,86 persen), dan menegur pelaku pencemaran (30,74 persen).

**Tabel 3.6.1 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Merokok Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal**

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	23,53	28,30	26,95
Sumatera Utara	25,06	26,06	25,56
Sumatera Barat	28,18	27,93	28,03
Riau	24,43	28,08	26,63
Jambi	26,00	28,43	27,68
Sumatera Selatan	23,22	32,23	28,97
Bengkulu	26,28	31,27	29,69
Lampung	26,56	31,04	29,87
Kep. Bangka Belitung	24,35	27,90	26,15
Kepulauan Riau	23,60	28,24	24,36
DKI Jakarta	23,54	-	23,54
Jawa Barat	27,93	32,24	29,38
Jawa Tengah	22,70	26,92	24,98
DI Yogyakarta	17,95	21,46	19,12
Jawa Timur	23,40	27,91	25,77
Banten	26,96	32,73	28,78
Bali	19,25	17,89	18,72
Nusa Tenggara Barat	26,88	26,07	26,41
Nusa Tenggara Timur	22,83	24,40	24,08
Kalimantan Barat	22,32	29,19	27,08
Kalimantan Tengah	23,05	30,66	28,07
Kalimantan Selatan	20,51	24,23	22,65
Kalimantan Timur	22,79	26,58	24,23
Sulawesi Utara	24,67	31,33	28,30
Sulawesi Tengah	25,20	30,36	29,08
Sulawesi Selatan	22,23	23,70	23,15
Sulawesi Tenggara	19,56	26,26	24,34
Gorontalo	26,26	33,33	30,86
Sulawesi Barat	23,11	25,82	25,19
Maluku	23,97	29,84	27,52
Maluku Utara	27,04	29,34	28,69
Papua Barat	24,57	27,28	26,45
Papua	23,38	29,16	27,65
<b>Indonesia</b>	<b>24,69</b>	<b>28,31</b>	<b>26,48</b>

**Tabel 3.6.2 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Merokok Menurut Provinsi dan Kelompok Umur**

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)			Total
	10-17	18-24	≥ 25	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Aceh	2,06	21,37	37,06	26,95
Sumatera Utara	1,20	21,28	35,28	25,56
Sumatera Barat	2,89	27,64	36,32	28,03
Riau	1,79	23,11	35,58	26,63
Jambi	3,28	26,87	35,11	27,68
Sumatera Selatan	4,05	27,39	37,08	28,97
Bengkulu	2,86	28,47	38,44	29,69
Lampung	3,41	31,89	37,40	29,87
Kep. Bangka Belitung	2,93	28,03	31,99	26,15
Kepulauan Riau	0,79	21,03	30,38	24,36
DKI Jakarta	3,02	18,34	29,20	23,54
Jawa Barat	2,93	26,36	37,68	29,38
Jawa Tengah	2,12	23,28	31,09	24,98
DI Yogyakarta	1,96	18,53	22,78	19,12
Jawa Timur	2,38	23,96	31,33	25,77
Banten	2,00	29,55	37,17	28,78
Bali	1,58	18,15	22,66	18,72
Nusa Tenggara Barat	2,36	26,15	34,10	26,41
Nusa Tenggara Timur	1,96	25,13	32,37	24,08
Kalimantan Barat	2,52	27,51	34,81	27,08
Kalimantan Tengah	3,55	25,18	36,08	28,07
Kalimantan Selatan	1,73	19,44	29,20	22,65
Kalimantan Timur	1,47	20,02	31,65	24,23
Sulawesi Utara	3,29	27,24	35,02	28,30
Sulawesi Tengah	2,87	29,55	37,23	29,08
Sulawesi Selatan	2,11	21,93	30,08	23,15
Sulawesi Tenggara	2,04	20,33	33,78	24,34
Gorontalo	3,42	30,11	39,88	30,86
Sulawesi Barat	2,34	21,66	34,53	25,19
Maluku	2,36	27,89	36,80	27,52
Maluku Utara	0,40	22,03	40,71	28,69
Papua Barat	1,42	26,92	34,73	26,45
Papua	3,98	27,07	37,05	27,65
<b>Indonesia</b>	<b>2,45</b>	<b>24,56</b>	<b>33,66</b>	<b>26,48</b>

**Tabel 3.6.3 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Merokok Menurut Provinsi dan Jenis Rokok yang Dikonsumsi Selama Seminggu yang Lalu**

Provinsi	Jenis Rokok			Total
	Filter	Non Filter	Filter dan Non Filter	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Aceh	63,53	29,11	7,36	100,00
Sumatera Utara	72,85	21,85	5,30	100,00
Sumatera Barat	81,00	17,41	1,59	100,00
Riau	80,62	17,30	2,07	100,00
Jambi	79,53	18,70	1,77	100,00
Sumatera Selatan	54,49	38,25	7,25	100,00
Bengkulu	45,66	47,66	6,68	100,00
Lampung	38,93	49,54	11,54	100,00
Kep. Bangka Belitung	81,99	15,35	2,66	100,00
Kepulauan Riau	87,13	11,69	1,17	100,00
DKI Jakarta	72,02	24,85	3,13	100,00
Jawa Barat	51,22	37,30	11,48	100,00
Jawa Tengah	47,69	36,92	15,39	100,00
DI Yogyakarta	55,02	37,64	7,33	100,00
Jawa Timur	57,39	29,92	12,68	100,00
Banten	60,14	33,59	6,27	100,00
Bali	84,71	14,33	,96	100,00
Nusa Tenggara Barat	51,14	29,00	19,86	100,00
Nusa Tenggara Timur	50,91	32,13	16,96	100,00
Kalimantan Barat	63,52	32,07	4,42	100,00
Kalimantan Tengah	77,43	18,76	3,81	100,00
Kalimantan Selatan	87,98	8,79	3,22	100,00
Kalimantan Timur	86,43	10,22	3,35	100,00
Sulawesi Utara	86,87	8,37	4,76	100,00
Sulawesi Tengah	86,21	8,50	5,30	100,00
Sulawesi Selatan	85,61	8,29	6,10	100,00
Sulawesi Tenggara	79,39	17,62	3,00	100,00
Gorontalo	76,27	13,26	10,47	100,00
Sulawesi Barat	86,67	10,16	3,16	100,00
Maluku	61,59	15,13	23,28	100,00
Maluku Utara	71,43	13,90	14,67	100,00
Papua Barat	75,06	11,27	13,66	100,00
Papua	50,06	20,00	29,94	100,00
<b>Indonesia</b>	<b>60,43</b>	<b>29,65</b>	<b>9,92</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.6.4 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Merokok Menurut Provinsi dan Jumlah Rokok yang Dikonsumsi Selama Seminggu yang Lalu**

Provinsi	Banyaknya Rokok yang Dikonsumsi (Batang)				
	1-7	8-70	71-140	141-210	≥ 211
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,04	42,78	46,50	6,04	2,65
Sumatera Utara	1,87	31,29	59,19	4,90	2,75
Sumatera Barat	8,60	31,07	52,37	4,79	3,17
Riau	1,92	24,54	62,53	5,74	5,27
Jambi	0,65	29,62	62,44	4,28	3,01
Sumatera Selatan	2,96	35,95	52,77	6,07	2,25
Bengkulu	3,01	31,58	56,15	4,76	4,51
Lampung	1,85	46,70	48,00	2,39	1,05
Kep. Bangka Belitung	5,21	23,48	54,92	8,45	7,93
Kepulauan Riau	1,86	33,38	52,83	4,57	7,35
DKI Jakarta	2,62	42,31	52,07	2,48	0,52
Jawa Barat	6,94	59,39	32,05	1,43	0,19
Jawa Tengah	3,62	57,75	36,66	1,83	0,14
DI Yogyakarta	2,88	59,23	36,08	1,52	0,29
Jawa Timur	4,34	45,27	46,24	3,55	0,60
Banten	4,36	41,04	50,56	3,06	0,99
Bali	15,81	48,03	34,70	1,33	0,12
Nusa Tenggara Barat	1,93	59,14	37,02	1,48	0,43
Nusa Tenggara Timur	6,96	66,22	23,59	2,47	0,77
Kalimantan Barat	0,79	29,57	60,81	4,72	4,11
Kalimantan Tengah	6,21	26,63	54,38	7,79	4,98
Kalimantan Selatan	1,22	24,58	64,87	3,85	5,48
Kalimantan Timur	2,66	30,94	61,16	2,64	2,60
Sulawesi Utara	3,64	48,43	45,01	1,36	1,55
Sulawesi Tengah	6,60	35,74	50,78	2,11	4,78
Sulawesi Selatan	2,32	32,26	59,57	2,57	3,27
Sulawesi Tenggara	2,96	43,66	48,82	2,69	1,86
Gorontalo	1,62	49,33	45,30	1,68	2,07
Sulawesi Barat	0,83	20,07	67,65	4,73	6,72
Maluku	1,98	69,45	25,17	2,10	1,30
Maluku Utara	0,56	62,98	31,42	2,23	2,81
Papua Barat	7,10	56,31	35,18	0,88	0,53
Papua	5,30	73,00	19,33	2,04	0,33
<b>Indonesia</b>	<b>4,29</b>	<b>47,00</b>	<b>44,37</b>	<b>2,95</b>	<b>1,39</b>

**Tabel 3.6.5 Persentase rumah Tangga yang Ada Kegiatan Kerja Bakti di Sekitar Lingkungan Rumah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal**

Provinsi	Persentase Rumah Tangga yang Ada Kegiatan Kerja Bakti di Lingkungan Rumah	Keikutsertaan Anggota Rumah Tangga dalam Kerja Bakti	
		Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	62,13	88,53	11,47
Sumatera Utara	36,72	86,08	13,92
Sumatera Barat	52,44	89,90	10,10
Riau	57,25	91,95	8,05
Jambi	54,96	91,57	8,43
Sumatera Selatan	33,96	90,76	9,24
Bengkulu	44,45	92,30	7,70
Lampung	70,70	92,56	7,44
Kep. Bangka Belitung	35,02	87,39	12,61
Kepulauan Riau	66,57	87,05	12,95
DKI Jakarta	88,20	81,89	18,11
Jawa Barat	65,31	85,93	14,07
Jawa Tengah	73,43	90,16	9,84
DI Yogyakarta	86,24	87,87	12,13
Jawa Timur	58,08	89,01	10,99
Banten	61,44	82,12	17,88
Bali	68,72	88,30	11,70
Nusa Tenggara Barat	39,83	90,07	9,93
Nusa Tenggara Timur	55,23	93,03	6,97
Kalimantan Barat	45,25	91,43	8,57
Kalimantan Tengah	37,19	92,45	7,55
Kalimantan Selatan	39,60	89,92	10,08
Kalimantan Timur	53,79	88,79	11,21
Sulawesi Utara	78,88	89,06	10,94
Sulawesi Tengah	75,45	94,00	6,00
Sulawesi Selatan	49,31	86,70	13,30
Sulawesi Tenggara	60,46	90,22	9,78
Gorontalo	62,79	90,94	9,06
Sulawesi Barat	44,81	87,40	12,60
Maluku	66,34	93,79	6,21
Maluku Utara	71,33	92,83	7,17
Papua Barat	59,39	94,67	5,33
Papua	38,65	91,97	8,03
<b>Indonesia</b>	<b>60,66</b>	<b>88,24</b>	<b>11,76</b>

**Tabel 3.6.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kejadian Gangguan Kondisi/Kualitas Lingkungan**

Provinsi	Tidak ada pencemaran	Jenis Gangguan Lingkungan / Pencemaran		
		Air	Udara	Tanah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	82,23	12,32	7,64	2,92
Sumatera Utara	77,24	12,83	14,41	2,09
Sumatera Barat	87,26	6,79	7,26	0,87
Riau	40,65	12,62	55,58	2,17
Jambi	77,76	13,08	12,04	1,66
Sumatera Selatan	81,40	10,38	10,22	1,71
Bengkulu	86,41	7,16	7,68	0,53
Lampung	90,78	4,80	5,47	0,83
Kep. Bangka Belitung	85,56	7,48	8,05	0,45
Kepulauan Riau	35,31	8,06	62,05	1,61
DKI Jakarta	82,21	11,08	10,57	2,78
Jawa Barat	82,97	9,55	9,16	1,74
Jawa Tengah	85,87	6,75	8,27	1,01
DI Yogyakarta	87,83	6,56	6,94	-
Jawa Timur	89,10	5,02	6,68	1,05
Banten	83,58	8,55	8,74	2,45
Bali	86,87	7,35	7,13	0,69
Nusa Tenggara Barat	86,59	10,78	3,82	1,44
Nusa Tenggara Timur	80,89	11,41	8,99	3,01
Kalimantan Barat	70,04	25,41	8,75	1,62
Kalimantan Tengah	63,32	25,22	17,07	4,01
Kalimantan Selatan	80,14	12,80	9,85	2,46
Kalimantan Timur	77,03	15,08	11,91	3,84
Sulawesi Utara	86,91	6,29	7,12	2,36
Sulawesi Tengah	85,69	10,59	4,18	1,20
Sulawesi Selatan	80,64	12,68	6,38	2,90
Sulawesi Tenggara	76,35	15,05	10,28	3,34
Gorontalo	77,59	14,01	9,37	1,75
Sulawesi Barat	78,87	11,70	11,74	1,03
Maluku	74,75	21,70	6,85	4,03
Maluku Utara	78,92	15,70	7,44	3,63
Papua Barat	82,97	11,76	6,26	3,69
Papua	89,10	7,77	3,22	1,89
<b>Indonesia</b>	<b>82,53</b>	<b>9,27</b>	<b>10,02</b>	<b>1,69</b>

**Tabel 3.6.7 Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Kondisi/Kualitas Lingkungan Menurut Provinsi dan Upaya untuk Menanggulangi Gangguan Lingkungan**

Provinsi	Persentase rumah tangga yang ada upaya menanggulangi gangguan lingkungan	Jenis upaya menanggulangi gangguan lingkungan		
		Melaporkan/mengadu kepada aparat setempat	Menegur pelaku gangguan lingkungan	Ikut menangani gangguan lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	28,40	30,92	33,56	53,94
Sumatera Utara	23,71	49,19	36,24	64,74
Sumatera Barat	26,00	46,42	21,78	56,04
Riau	7,17	27,87	24,84	67,68
Jambi	18,46	36,10	15,27	67,60
Sumatera Selatan	21,80	26,37	32,61	55,24
Bengkulu	32,28	47,71	44,16	50,83
Lampung	24,08	54,62	34,57	42,51
Kep. Bangka Belitung	34,87	22,71	51,71	82,70
Kepulauan Riau	4,91	51,30	26,65	62,68
DKI Jakarta	33,93	66,01	33,71	44,44
Jawa Barat	32,36	56,96	32,16	59,92
Jawa Tengah	27,91	44,64	33,34	54,95
DI Yogyakarta	30,43	43,56	44,66	22,52
Jawa Timur	32,73	59,82	38,31	45,24
Banten	26,79	62,71	25,00	60,19
Bali	29,74	41,60	39,66	49,33
Nusa Tenggara Barat	31,42	65,76	29,56	45,28
Nusa Tenggara Timur	49,81	39,92	23,57	63,06
Kalimantan Barat	18,98	66,65	26,19	48,00
Kalimantan Tengah	24,03	61,85	27,79	57,51
Kalimantan Selatan	15,73	54,06	21,20	61,91
Kalimantan Timur	24,25	59,37	30,76	51,46
Sulawesi Utara	60,62	67,42	17,84	48,38
Sulawesi Tengah	44,37	35,41	17,46	73,58
Sulawesi Selatan	31,59	30,21	13,59	73,18
Sulawesi Tenggara	35,95	41,65	11,10	70,36
Gorontalo	51,87	40,50	30,36	53,00
Sulawesi Barat	29,69	34,30	7,02	71,70
Maluku	34,14	27,94	28,45	82,92
Maluku Utara	29,74	73,86	29,87	45,69
Papua Barat	32,05	31,90	29,04	62,45
Papua	27,09	34,56	32,92	64,04
<b>Indonesia</b>	<b>27,09</b>	<b>50,86</b>	<b>30,74</b>	<b>56,52</b>

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S.1993. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Arif, Ahmad & Permanasari,Indira & Badil, Rudy. 2009. *Hidup Hirau Hijau: Langkah Menuju Hidup Ramah Lingkungan*. Jakarta; KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- BPS. 2013. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2013*. Jakarta.
- , 2013. *Perkembangan Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Indonesia*. Jakarta.
- Campos Inc. 2010. *Quantitative Research Report : Regional Environmental Study (World Environment Day)*.Pittsburgh.
- Gamal,Y. 2009. *Disertasi :Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Prolingkungan pada Masyarakat Perkotaan (Survey terhadap Masyarakat Kota Jakarta Selatan sebagai Peraih Adipura)*. Universitas Indonesia. Tidak dipublikasikan.
- GlobeScan. 2010. *Greendex 2010 : Consumer Choice and The Environment A Worldwide Tracking Survey*. Canada.
- Helmi, AF. 1999. Beberapa Teori Psikologi Lingkungan. *Buletin Psikologi*, Tahun VII, No.2 Desember 1999. [http://avin.staff.ugm.ac.id/data/jurnal/psikologilingkungan\\_avin.pdf](http://avin.staff.ugm.ac.id/data/jurnal/psikologilingkungan_avin.pdf).
- Instruksi Presiden RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air. Jakarta.
- Johanis. 2010. Rokok: Merokok Merusak Lingkungan.  
<http://forum.upi.edu/v3/index.php?PHPSESSID=733092916a60e344b6995e6ac9fda41e&topic=12571>.
- Khasanah, N. 2013. Pengejawantahan Nilai-Nilai Dalam Pengembangan Budaya Gotong Royong Di Era Digital. *Jurnal Edukasi*, Volume 01, Nomor 01, Juni 2013: 92-108
- Kollmurs,Anja & Agyeman,Julian. 2002. Mind The Gap : Why Do People Act Environmentally And What Are The Barriers To Pro-Environmental Behavior? *Environmental Education Research*, Vol . 8, No. 3, 2002.
- Lie,A. 2009. *Makalah : Program Konversi Minyak Tanah ke Elpiji (Potret Kebijakan Pemerintah Potret Kebijakan Pemerintah Dalam Sektor Pengelolaan Energi Nasional)*. Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan.
- Maloney, M. P., & Ward, M. P. (1973). *Ecology: Let's Hear from The People. An Objective Scale For The Measurement Of Ecological Attitudes And Knowledge*. *American Psychologist*, 28, 583–586.
- OECD. 2008. *2008 OECD Household Survey on Environmental Attitudes and Behaviour: Data Corroboration*.

- OECD. 2011. *Greening Household Behaviour : The Role of Public Policy*. OECD Publishing.  
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264096875-en>.
- OECD. 2013. *Greening Household Behaviour : Overview from The 2011 Survey*. OECD Studies on Environmental Policy and Household Behaviour. OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik. Jakarta.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air. Jakarta.
- Republic and State of Geneva. 2002. *The Geneva Guide to Sustainable Living*.  
[http://ge.ch/dares/developpement-durable/download\\_the\\_guide-1115-3473-8488.html](http://ge.ch/dares/developpement-durable/download_the_guide-1115-3473-8488.html)
- Scottish Government Social Research. 2009. *Scottish Environmental Attitudes and Behaviours Survey 2008*. [www.scotland.gov.uk/socialresearch](http://www.scotland.gov.uk/socialresearch).
- Tandra, H. 2003. *Merokok dan Kesehatan*. Diakses pada tanggal 14 November 2013.  
(<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0306/30/opini/398215.htm>)
- Tirtosastro, S dan A. S. Murdiyati. 2010. *Kandungan Kimia Tembakau dan Rokok*. Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri 2(1), April 2010:33-43. ISSN: 2085-6717
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Walpole, RE (1997). *Pengantar Statistika*. Edisi ketiga, Jakarta : PT Gramedia.

# **LAMPIRAN**

<http://www.bp-10.id>



**RELATIVE STANDARD ERROR (RSE)**

Penggunaan teknik *sampling* dalam SPPLH 2013, menyebabkan hasil estimasi tidak terlepas dari *sampling error*. *Sampling error* adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik *sampling* dalam suatu survei. Oleh karena itu, setiap estimasi perlu dilihat tingkat presisi atau keakuratannya, yaitu dengan melihat besarnya *sampling error*.

Secara teori statistik, besarnya *sampling error* ditunjukkan dengan besarnya angka *standard error*. *Standard error* juga dapat disajikan dalam bentuk persentase angka *standard error* terhadap nilai estimasinya. Penyajian *standard error* dalam bentuk persentase inilah yang disebut sebagai *Relative Standard Error* (RSE). Suatu estimasi dikatakan presisi atau akurat jika nilai RSE < 25%. Estimasi juga dikatakan terandal jika nilainya terletak pada selang kepercayaan yang memiliki batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Berikut disajikan hasil RSE dan selang kepercayaan beberapa indikator perilaku peduli lingkungan hidup 2013.

**Tabel 1. Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pencahayaan Matahari untuk Penerangan Ruang Menurut Provinsi**

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Atas	Batas Bawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	92,96	0,78	91,43	94,49	0,84
Sumatera Utara	89,32	0,60	88,15	90,49	0,67
Sumatera Barat	96,94	0,40	96,15	97,73	0,42
Riau	97,25	0,44	96,38	98,12	0,46
Jambi	97,02	0,52	96,01	98,03	0,53
Sumatera Selatan	93,17	1,02	91,18	95,17	1,09
Bengkulu	97,89	0,42	97,06	98,72	0,43
Lampung	94,55	0,64	93,30	95,81	0,68
Kep. Bangka Belitung	98,14	0,51	97,14	99,14	0,52
Kepulauan Riau	88,82	1,29	86,29	91,34	1,45
DKI Jakarta	81,69	1,28	79,18	84,20	1,57
Jawa Barat	93,47	0,44	92,60	94,33	0,47
Jawa Tengah	94,38	0,33	93,72	95,03	0,35
DI Yogyakarta	98,68	0,43	97,84	99,53	0,44
Jawa Timur	92,20	0,43	91,35	93,04	0,47
Banten	89,70	1,16	87,42	91,97	1,29
Bali	96,33	0,78	94,80	97,87	0,81
Nusa Tenggara Barat	91,74	0,89	90,01	93,48	0,97
Nusa Tenggara Timur	93,13	0,64	91,86	94,39	0,69
Kalimantan Barat	94,63	0,65	93,36	95,90	0,68
Kalimantan Tengah	97,81	0,41	97,01	98,60	0,41
Kalimantan Selatan	96,15	0,57	95,02	97,27	0,59
Kalimantan Timur	94,66	0,91	92,87	96,45	0,97
Sulawesi Utara	95,92	0,75	94,45	97,39	0,78
Sulawesi Tengah	94,14	0,77	92,63	95,65	0,82
Sulawesi Selatan	93,23	0,58	92,09	94,36	0,62
Sulawesi Tenggara	96,85	0,68	95,52	98,18	0,70
Gorontalo	96,07	0,66	94,79	97,35	0,68
Sulawesi Barat	83,42	3,48	76,60	90,24	4,17
Maluku	89,71	1,50	86,77	92,64	1,67
Maluku Utara	86,67	2,02	82,70	90,64	2,34
Papua Barat	90,80	1,22	88,42	93,18	1,34
Papua	80,79	1,59	77,67	83,91	1,97
Indonesia	92,80	0,16	92,48	93,12	0,17

**Tabel 2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Area Resapan Air\*) Menurut Provinsi**

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	38,23	1,64	35,01	41,45	4,30
Sumatera Utara	27,69	1,04	25,65	29,74	3,77
Sumatera Barat	34,70	1,67	31,43	37,97	4,81
Riau	33,85	1,62	30,68	37,02	4,77
Jambi	34,76	1,73	31,38	38,15	4,97
Sumatera Selatan	38,80	1,59	35,68	41,93	4,10
Bengkulu	52,14	2,32	47,59	56,69	4,46
Lampung	33,25	1,53	30,25	36,25	4,60
Kep. Bangka Belitung	31,62	2,23	27,25	36,00	7,06
Kepulauan Riau	18,59	1,65	15,36	21,82	8,87
DKI Jakarta	13,13	1,35	10,49	15,77	10,25
Jawa Barat	23,98	0,74	22,53	25,44	3,09
Jawa Tengah	28,21	0,89	26,46	29,96	3,17
DI Yogyakarta	33,83	2,15	29,61	38,05	6,37
Jawa Timur	25,73	0,87	24,02	27,45	3,40
Banten	26,78	1,85	23,16	30,40	6,89
Bali	67,02	1,87	63,36	70,69	2,79
Nusa Tenggara Barat	41,39	1,91	37,65	45,13	4,61
Nusa Tenggara Timur	37,83	1,71	34,49	41,18	4,51
Kalimantan Barat	48,63	2,08	44,55	52,70	4,28
Kalimantan Tengah	43,21	1,78	39,73	46,70	4,12
Kalimantan Selatan	25,51	1,73	22,12	28,91	6,78
Kalimantan Timur	29,11	1,61	25,94	32,27	5,55
Sulawesi Utara	33,41	2,64	28,24	38,58	7,89
Sulawesi Tengah	43,64	1,90	39,92	47,36	4,35
Sulawesi Selatan	29,65	1,20	27,29	32,01	4,06
Sulawesi Tenggara	37,56	2,55	32,56	42,56	6,79
Gorontalo	48,74	3,27	42,33	55,16	6,71
Sulawesi Barat	55,14	2,39	50,46	59,83	4,33
Maluku	20,35	1,12	18,16	22,55	5,50
Maluku Utara	26,19	2,27	21,74	30,64	8,68
Papua Barat	27,78	2,17	23,52	32,04	7,82
Papua	32,89	2,13	28,73	37,06	6,46
Indonesia	29,58	0,31	28,96	30,19	1,06

Catatan: minimal mempunyai salah satu diantara sumur resapan, lubang resapan biopori, atau taman/tanah berumput

**Tabel 3. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kebiasaan Sering atau Kadang-Kadang Menutup Panci Ketika Memasak Menurut Provinsi**

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	93,83	0,56	92,74	94,93	0,60
Sumatera Utara	93,78	0,45	92,90	94,65	0,48
Sumatera Barat	88,84	0,96	86,96	90,73	1,08
Riau	91,92	0,84	90,27	93,57	0,92
Jambi	94,35	0,66	93,06	95,63	0,70
Sumatera Selatan	97,53	0,40	96,75	98,30	0,41
Bengkulu	94,92	0,75	93,44	96,40	0,79
Lampung	98,01	0,33	97,36	98,66	0,34
Kep. Bangka Belitung	93,20	0,94	91,35	95,05	1,01
Kepulauan Riau	91,79	1,48	88,88	94,70	1,62
DKI Jakarta	89,85	1,29	87,32	92,38	1,44
Jawa Barat	95,94	0,33	95,30	96,59	0,34
Jawa Tengah	97,28	0,22	96,86	97,70	0,22
DI Yogyakarta	94,99	0,90	93,22	96,76	0,95
Jawa Timur	97,45	0,20	97,06	97,85	0,21
Banten	93,93	0,69	92,57	95,29	0,74
Bali	98,11	0,50	97,13	99,09	0,51
Nusa Tenggara Barat	98,10	0,39	97,34	98,86	0,40
Nusa Tenggara Timur	97,43	0,39	96,67	98,18	0,40
Kalimantan Barat	96,09	0,55	95,01	97,18	0,58
Kalimantan Tengah	98,47	0,34	97,82	99,13	0,34
Kalimantan Selatan	95,26	0,66	93,96	96,57	0,70
Kalimantan Timur	95,20	0,71	93,82	96,59	0,74
Sulawesi Utara	97,35	0,50	96,36	98,33	0,52
Sulawesi Tengah	98,28	0,42	97,45	99,11	0,43
Sulawesi Selatan	96,13	0,47	95,22	97,05	0,49
Sulawesi Tenggara	96,21	0,64	94,96	97,46	0,66
Gorontalo	95,89	0,91	94,11	97,67	0,95
Sulawesi Barat	98,60	0,48	97,66	99,54	0,49
Maluku	96,04	0,63	94,82	97,27	0,65
Maluku Utara	94,61	1,02	92,62	96,60	1,07
Papua Barat	95,06	0,96	93,18	96,95	1,01
Papua	90,07	1,06	88,00	92,14	1,17
Indonesia	95,79	0,12	95,57	96,02	0,12

**Tabel 4. Persentase Rumah Tangga yang Sudah Menggunakan Lampu Hemat Energi Menurut Provinsi**

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	96,89	0,42	96,07	97,71	0,43
Sumatera Utara	97,16	0,37	96,44	97,88	0,38
Sumatera Barat	97,33	0,46	96,43	98,23	0,47
Riau	97,27	0,39	96,51	98,03	0,40
Jambi	97,31	0,45	96,43	98,19	0,46
Sumatera Selatan	94,90	0,70	93,54	96,27	0,74
Bengkulu	94,33	0,82	92,72	95,94	0,87
Lampung	95,00	0,54	93,94	96,05	0,57
Kep. Bangka Belitung	97,83	0,57	96,72	98,95	0,58
Kepulauan Riau	99,12	0,41	98,32	99,92	0,41
DKI Jakarta	95,42	0,68	94,07	96,76	0,72
Jawa Barat	89,88	0,55	88,79	90,97	0,62
Jawa Tengah	94,18	0,35	93,50	94,86	0,37
DI Yogyakarta	98,37	0,46	97,46	99,27	0,47
Jawa Timur	94,70	0,31	94,09	95,32	0,33
Banten	94,26	0,71	92,86	95,65	0,75
Bali	96,21	0,61	95,02	97,40	0,63
Nusa Tenggara Barat	89,48	1,05	87,41	91,54	1,18
Nusa Tenggara Timur	95,63	0,58	94,50	96,76	0,60
Kalimantan Barat	95,79	0,51	94,80	96,78	0,53
Kalimantan Tengah	95,37	0,72	93,95	96,79	0,76
Kalimantan Selatan	96,72	0,51	95,72	97,73	0,53
Kalimantan Timur	97,79	0,45	96,90	98,69	0,46
Sulawesi Utara	98,61	0,37	97,89	99,34	0,38
Sulawesi Tengah	99,17	0,27	98,64	99,70	0,27
Sulawesi Selatan	97,58	0,32	96,96	98,20	0,32
Sulawesi Tenggara	95,07	1,02	93,08	97,07	1,07
Gorontalo	95,49	1,03	93,47	97,52	1,08
Sulawesi Barat	96,23	1,03	94,21	98,26	1,07
Maluku	96,22	0,71	94,83	97,60	0,73
Maluku Utara	97,34	0,79	95,79	98,89	0,81
Papua Barat	93,16	1,52	90,18	96,15	1,64
Papua	92,17	1,26	89,70	94,64	1,37
Indonesia	94,33	0,15	94,04	94,62	0,16

**Tabel 5. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Shower untuk Fasilitas Mandi Menurut Provinsi**

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,31	0,27	0,79	1,84	20,22
Sumatera Utara	1,11	0,26	0,60	1,61	23,21
Sumatera Barat	1,47	0,32	0,85	2,09	21,41
Riau	2,22	0,50	1,24	3,20	22,45
Jambi	1,00	0,27	0,47	1,53	27,07
Sumatera Selatan	1,55	0,47	0,63	2,47	30,20
Bengkulu	0,89	0,31	0,28	1,50	35,00
Lampung	0,82	0,23	0,36	1,28	28,53
Kep. Bangka Belitung	2,34	0,55	1,26	3,42	23,57
Kepulauan Riau	7,11	1,44	4,30	9,93	20,19
DKI Jakarta	8,44	0,86	6,75	10,13	10,21
Jawa Barat	2,62	0,26	2,12	3,12	9,76
Jawa Tengah	1,83	0,19	1,45	2,21	10,57
DI Yogyakarta	2,65	0,50	1,66	3,63	18,91
Jawa Timur	1,41	0,17	1,08	1,73	11,82
Banten	4,79	0,77	3,27	6,30	16,15
Bali	7,57	1,21	5,20	9,94	15,98
Nusa Tenggara Barat	1,54	0,41	0,73	2,35	26,87
Nusa Tenggara Timur	0,59	0,17	0,26	0,92	28,66
Kalimantan Barat	1,19	0,31	0,59	1,80	25,77
Kalimantan Tengah	1,27	0,31	0,66	1,88	24,53
Kalimantan Selatan	2,21	0,38	1,46	2,95	17,28
Kalimantan Timur	1,93	0,37	1,22	2,65	18,88
Sulawesi Utara	2,02	0,44	1,15	2,88	21,86
Sulawesi Tengah	1,06	0,30	0,47	1,64	28,24
Sulawesi Selatan	1,38	0,21	0,96	1,79	15,34
Sulawesi Tenggara	2,11	0,57	1,00	3,21	26,88
Gorontalo	1,61	0,60	0,43	2,79	37,28
Sulawesi Barat	0,96	0,48	0,01	1,90	50,45
Maluku	1,18	0,39	0,41	1,96	33,36
Maluku Utara	0,64	0,30	0,05	1,23	47,32
Papua Barat	1,31	0,45	0,42	2,19	34,53
Papua	0,14	0,06	0,01	0,26	46,91
Indonesia	2,26	0,09	2,09	2,44	3,97

**Tabel 6. Persentase Rumah Tangga yang Sering/Kadang-kadang Memanfaatkan Air Bekas Menurut Provinsi**

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	8,87	0,71	7,48	10,25	7,95
Sumatera Utara	16,67	0,84	15,02	18,33	5,06
Sumatera Barat	8,53	0,72	7,12	9,93	8,40
Riau	14,58	1,05	12,52	16,63	7,18
Jambi	10,07	1,05	8,01	12,12	10,40
Sumatera Selatan	8,54	0,84	6,91	10,18	9,79
Bengkulu	7,20	0,83	5,58	8,83	11,51
Lampung	10,72	0,73	9,29	12,15	6,81
Kep. Bangka Belitung	20,23	1,51	17,28	23,19	7,44
Kepulauan Riau	18,81	1,89	15,10	22,51	10,06
DKI Jakarta	17,52	1,29	14,99	20,06	7,38
Jawa Barat	14,52	0,66	13,23	15,81	4,52
Jawa Tengah	11,03	0,45	10,14	11,92	4,12
DI Yogyakarta	16,55	1,56	13,49	19,61	9,42
Jawa Timur	9,08	0,40	8,30	9,86	4,39
Banten	10,58	1,14	8,35	12,81	10,74
Bali	34,85	1,82	31,28	38,43	5,23
Nusa Tenggara Barat	13,76	1,33	11,15	16,38	9,68
Nusa Tenggara Timur	48,68	1,64	45,47	51,88	3,36
Kalimantan Barat	10,31	0,87	8,61	12,01	8,41
Kalimantan Tengah	5,88	0,80	4,31	7,44	13,63
Kalimantan Selatan	8,05	0,72	6,65	9,45	8,89
Kalimantan Timur	13,23	1,11	11,05	15,40	8,40
Sulawesi Utara	14,76	1,22	12,36	17,16	8,29
Sulawesi Tengah	9,51	0,88	7,79	11,24	9,25
Sulawesi Selatan	10,54	0,72	9,13	11,95	6,82
Sulawesi Tenggara	8,07	0,84	6,42	9,71	10,39
Gorontalo	10,68	1,87	7,01	14,36	17,55
Sulawesi Barat	12,29	1,92	8,52	16,05	15,62
Maluku	15,06	1,15	12,81	17,31	7,62
Maluku Utara	12,05	1,36	9,38	14,71	11,29
Papua Barat	11,55	1,34	8,92	14,18	11,61
Papua	11,75	1,10	9,59	13,91	9,38
Indonesia	12,99	0,20	12,60	13,37	1,53

**Tabel 7. Persentase Rumah Tangga yang Sudah Memilah Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk Menurut Provinsi**

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	18,79	1,29	16,27	21,31	6,85
Sumatera Utara	19,61	0,98	17,68	21,53	5,01
Sumatera Barat	17,47	1,08	15,34	19,60	6,21
Riau	20,87	1,20	18,51	23,23	5,77
Jambi	16,10	1,11	13,94	18,27	6,86
Sumatera Selatan	23,18	1,61	20,03	26,33	6,94
Bengkulu	18,90	1,46	16,03	21,76	7,73
Lampung	16,29	0,91	14,52	18,07	5,56
Kep. Bangka Belitung	23,32	1,74	19,90	26,73	7,47
Kepulauan Riau	20,01	2,19	15,72	24,31	10,95
DKI Jakarta	14,23	1,35	11,57	16,88	9,51
Jawa Barat	30,52	0,86	28,83	32,20	2,81
Jawa Tengah	27,41	0,78	25,87	28,94	2,86
DI Yogyakarta	31,26	1,40	28,52	34,01	4,48
Jawa Timur	19,93	0,56	18,82	21,03	2,83
Banten	18,42	1,20	16,06	20,78	6,53
Bali	31,17	1,86	27,53	34,82	5,97
Nusa Tenggara Barat	17,83	1,23	15,41	20,25	6,92
Nusa Tenggara Timur	29,63	1,60	26,49	32,78	5,41
Kalimantan Barat	15,80	1,02	13,81	17,79	6,43
Kalimantan Tengah	23,84	1,60	20,71	26,98	6,70
Kalimantan Selatan	20,11	1,13	17,89	22,34	5,64
Kalimantan Timur	29,03	1,35	26,38	31,68	4,66
Sulawesi Utara	34,95	1,57	31,88	38,03	4,49
Sulawesi Tengah	29,95	1,64	26,74	33,17	5,48
Sulawesi Selatan	28,58	1,11	26,39	30,76	3,90
Sulawesi Tenggara	26,78	1,65	23,54	30,03	6,18
Gorontalo	22,25	2,25	17,84	26,66	10,10
Sulawesi Barat	20,52	2,58	15,47	25,57	12,56
Maluku	15,59	1,43	12,79	18,39	9,16
Maluku Utara	16,59	2,11	12,47	20,72	12,69
Papua Barat	27,98	2,03	24,00	31,96	7,26
Papua	16,98	1,06	14,89	19,07	6,27
Indonesia	23,69	0,27	23,17	24,21	1,12

**Tabel 8. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Sepeda Motor dan Menggunakan Sepeda Motornya Secara Bersama Menurut Provinsi**

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	62,42	1,48	59,52	65,33	2,38
Sumatera Utara	59,08	1,37	56,39	61,77	2,32
Sumatera Barat	57,67	1,54	54,65	60,68	2,67
Riau	57,45	1,70	54,12	60,77	2,95
Jambi	66,14	1,90	62,42	69,87	2,87
Sumatera Selatan	60,69	1,77	57,22	64,16	2,92
Bengkulu	65,14	2,18	60,86	69,43	3,35
Lampung	61,06	1,27	58,58	63,55	2,08
Kep. Bangka Belitung	51,07	2,06	47,04	55,10	4,02
Kepulauan Riau	37,87	3,45	31,10	44,63	9,11
DKI Jakarta	38,08	1,98	34,21	41,96	5,19
Jawa Barat	48,53	1,17	46,24	50,83	2,42
Jawa Tengah	47,99	0,86	46,31	49,68	1,79
DI Yogyakarta	39,77	2,71	34,45	45,08	6,82
Jawa Timur	48,65	0,90	46,89	50,40	1,84
Banten	49,91	2,48	45,05	54,78	4,97
Bali	39,05	2,14	34,85	43,24	5,48
Nusa Tenggara Barat	58,21	2,43	53,44	62,98	4,18
Nusa Tenggara Timur	57,89	2,05	53,88	61,90	3,53
Kalimantan Barat	57,84	1,34	55,21	60,46	2,32
Kalimantan Tengah	59,50	1,78	56,01	62,99	2,99
Kalimantan Selatan	54,58	1,48	51,68	57,48	2,71
Kalimantan Timur	47,46	1,94	43,65	51,28	4,10
Sulawesi Utara	64,49	2,15	60,28	68,70	3,33
Sulawesi Tengah	71,29	1,82	67,72	74,86	2,56
Sulawesi Selatan	60,85	1,62	57,67	64,03	2,67
Sulawesi Tenggara	61,86	2,12	57,71	66,00	3,42
Gorontalo	54,74	3,05	48,77	60,70	5,56
Sulawesi Barat	48,51	3,40	41,84	55,17	7,01
Maluku	63,05	2,83	57,49	68,60	4,50
Maluku Utara	71,59	2,59	66,51	76,66	3,61
Papua Barat	69,27	2,56	64,26	74,28	3,69
Papua	62,11	2,80	56,63	67,59	4,50
Indonesia	51,71	0,37	50,98	52,43	0,72

**Tabel 9. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Mobil dan Menggunakan Mobilnya Secara Bersama Menurut Provinsi**

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	59,56	3,92	51,86	67,25	6,59
Sumatera Utara	69,25	3,43	62,52	75,98	4,96
Sumatera Barat	55,93	3,58	48,92	62,94	6,39
Riau	46,74	4,66	37,60	55,89	9,98
Jambi	68,14	4,43	59,45	76,84	6,51
Sumatera Selatan	62,72	3,47	55,92	69,53	5,53
Bengkulu	53,86	5,31	43,45	64,27	9,85
Lampung	67,95	4,27	59,57	76,33	6,29
Kep. Bangka Belitung	56,65	4,93	46,98	66,31	8,70
Kepulauan Riau	58,89	6,83	45,49	72,28	11,60
DKI Jakarta	64,03	4,02	56,15	71,92	6,28
Jawa Barat	63,28	2,46	58,46	68,11	3,89
Jawa Tengah	64,44	2,12	60,28	68,60	3,29
DI Yogyakarta	73,74	4,60	64,72	82,76	6,24
Jawa Timur	65,13	2,39	60,44	69,82	3,67
Banten	77,84	3,80	70,38	85,30	4,89
Bali	78,21	3,46	71,42	84,99	4,43
Nusa Tenggara Barat	77,40	5,03	67,54	87,27	6,50
Nusa Tenggara Timur	63,64	5,98	51,91	75,37	9,40
Kalimantan Barat	62,28	5,31	51,86	72,70	8,53
Kalimantan Tengah	66,92	4,31	58,47	75,38	6,44
Kalimantan Selatan	59,04	4,48	50,26	67,83	7,59
Kalimantan Timur	53,55	4,57	44,59	62,51	8,53
Sulawesi Utara	76,43	3,64	69,29	83,56	4,76
Sulawesi Tengah	69,99	5,26	59,67	80,31	7,52
Sulawesi Selatan	71,94	2,52	66,99	76,88	3,51
Sulawesi Tenggara	70,16	5,69	59,00	81,31	8,11
Gorontalo	65,64	8,18	49,60	81,68	12,46
Sulawesi Barat	51,55	10,11	31,72	71,38	19,62
Maluku	78,98	5,66	67,89	90,07	7,16
Maluku Utara	80,27	8,60	63,42	97,12	10,71
Papua Barat	63,23	6,99	49,54	76,93	11,05
Papua	77,53	4,78	68,16	86,90	6,16
Indonesia	65,29	0,82	63,68	66,91	1,26

**Tabel 10. Persentase Rumah Tangga yang Ada Kegiatan Kerja Bakti dan Mengikuti Kegiatan Kerja Bakti Menurut Provinsi**

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	88,53	0,93	86,71	90,35	1,05
Sumatera Utara	86,08	1,07	83,98	88,18	1,24
Sumatera Barat	89,90	1,08	87,79	92,01	1,20
Riau	91,95	0,95	90,08	93,82	1,04
Jambi	91,57	1,08	89,46	93,68	1,18
Sumatera Selatan	90,76	1,38	88,05	93,47	1,52
Bengkulu	92,30	1,41	89,54	95,07	1,53
Lampung	92,56	0,65	91,30	93,83	0,70
Kep. Bangka Belitung	87,39	2,22	83,03	91,74	2,54
Kepulauan Riau	87,05	2,28	82,57	91,52	2,62
DKI Jakarta	81,89	1,52	78,91	84,87	1,86
Jawa Barat	85,93	0,72	84,53	87,34	0,83
Jawa Tengah	90,16	0,50	89,18	91,13	0,55
DI Yogyakarta	87,87	1,79	84,36	91,39	2,04
Jawa Timur	89,01	0,53	87,98	90,05	0,59
Banten	82,12	1,18	79,81	84,43	1,44
Bali	88,30	1,83	84,72	91,88	2,07
Nusa Tenggara Barat	90,07	1,60	86,93	93,21	1,78
Nusa Tenggara Timur	93,03	0,89	91,30	94,77	0,95
Kalimantan Barat	91,43	1,13	89,21	93,65	1,24
Kalimantan Tengah	92,45	1,24	90,02	94,89	1,34
Kalimantan Selatan	89,92	1,38	87,22	92,62	1,53
Kalimantan Timur	88,79	1,49	85,86	91,71	1,68
Sulawesi Utara	89,06	1,00	87,10	91,02	1,12
Sulawesi Tengah	94,00	0,81	92,41	95,59	0,86
Sulawesi Selatan	86,70	1,08	84,58	88,82	1,25
Sulawesi Tenggara	90,22	1,27	87,73	92,71	1,41
Gorontalo	90,94	1,54	87,92	93,96	1,69
Sulawesi Barat	87,40	1,93	83,62	91,18	2,21
Maluku	93,79	1,58	90,69	96,89	1,69
Maluku Utara	92,83	1,30	90,27	95,39	1,41
Papua Barat	94,67	1,15	92,41	96,93	1,22
Papua	91,97	1,10	89,82	94,13	1,19
Indonesia	88,24	0,24	87,77	88,70	0,27



REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIK

**SPPLH13.RT**

## SURVEI PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN HIDUP 2013

**RAHASIA**

I. KETERANGAN TEMPAT			
1	Provinsi		<input type="text"/> <input type="text"/>
2	Kabupaten/Kota *)		<input type="text"/> <input type="text"/>
3	Kecamatan		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4	Desa/Kelurahan*)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5	Klasifikasi Desa/Kelurahan	1. <i>Perkotaan</i> 2. <i>Perdesaan</i>	<input type="text"/>
6	Nomor Blok Sensus		
7	Nomor Kode Sampel (NKS)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
8	Nomor Urut Sampel Rumah Tangga		<input type="text"/> <input type="text"/>
9	Nama Kepala Rumah Tangga		
10	Alamat (nama jalan/gang, RT/RW/dusun)		
11	Status Pencacahan	1. Berhasil dicacah 2. Tidak ditemukan 3. Menolak } <b>STOP</b>	<input type="text"/>
12	Pemberi Informasi	1. Nama : 2. No. Urut ART (Disalin dari Blok IV Kol.1)	<input type="text"/> <input type="text"/>

II. RINGKASAN (Diisi setelah Blok IV terisi)			
1	Banyaknya anggota rumah tangga		<input type="text"/> <input type="text"/>
2	Banyaknya anggota rumah tangga umur 10 tahun ke atas		<input type="text"/> <input type="text"/>

III. KETERANGAN PETUGAS			
Uraian	Pencacah		Pengawas/Pemeriksa
1. Nama	.....		.....
2. Jabatan	1. Staf BPS Provinsi 2. Staf BPS Kab/Kota	3. KSK 4. Mitra <input type="text"/>	1. Staf BPS Provinsi 2. Staf BPS Kab/Kota 3. KSK 4. Mitra <input type="text"/>
3. Tanggal Pencacahan/Pemeriksaan	Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> Bulan <input type="text"/> <input type="text"/>		Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> Bulan <input type="text"/> <input type="text"/>
4. Tanda Tangan			

\*) Coret yang tidak perlu

IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA

No. urut	Nama anggota rumah tangga (Tulis siapa saja yang biasanya tinggal dan makan di ruma ini baik dewasa, anak-anak maupun bayi)	Hubungan dengan kepala rumah tangga	Jenis kelamin	Umur (Tahun)	Status perkawinan	Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki	Dalam 3 tahun terakhir, apakah [NAMA] pernah/ sedang mengikuti/ penyuluhan/ pelatihan terkait lingkungan hidup?	Jika kol.(8) = 1 Jenis utama pelatihan terakhir yang pernah diikuti	Kegiatan utama selama seminggu yang lalu	Jika Kol. (10) ≠ 0 Sarana angkutan yang paling sering digunakan untuk menunjang kegiatan utama		Perilaku Merokok		Ketika di lingkungan rumah, bagaimana kebiasaan [NAMA] dalam membuang sampah			
										Jenis angkutan	[Kode]	Apakah [NAMA] merokok selama seminggu yang lalu?	Jenis rokok yang dikonsumsi seminggu yang lalu		Jumlah rokok yang dikonsumsi seminggu yang lalu (Batang)		
(1)	(2)	[Kode]	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	[Kode]	(9)	(10)	[Kode]	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1			1														
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

2

<b>V. PERUMAHAN</b>	
1. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati : 1. Milik sendiri                      2. Bukan milik sendiri	<input type="checkbox"/>
2. a. Luas tanah tempat tinggal : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> m <sup>2</sup> b. Luas lantai dasar : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> m <sup>2</sup> c. Luas tanah yang tidak tertutup semen/bangunan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> m <sup>2</sup>	
3. a. Tempat pembuangan akhir tinja : 1. Tangki/SPAL                      4. Lubang tanah 2. Kolam/sawah                      5. Pantai/tanah lapang/kebun 3. Sungai/danau/laut                      6. Tidak tahu	<input type="checkbox"/>
b. Jika R3.a = 1 (tangki/SPAL), apakah kloset menggunakan sistem penyiraman "flush"? 1. Ya                      2. Tidak	<input type="checkbox"/>
4. Di saat siang hari yang cerah, apakah rumah ini memanfaatkan pencahayaan dari sinar matahari untuk penerangan ruangan? 1. Ya, sebagian besar ruangan 2. Ya, sebagian kecil ruangan 3. Tidak	<input type="checkbox"/>
5. Apakah rumah tangga menanam/memelihara tanaman keras/tahunan di rumah (seperti : pohon mangga, pohon jambu, ketapang, cemara dll) ? 1. Ya                      2. Tidak	<input type="checkbox"/>
6. Apakah terdapat sumur resapan, lubang resapan biopori, dan taman/tanah berumput di lingkungan rumah? a. Sumur resapan                      1. Ya    2. Tidak b. Lubang resapan biopori                      1. Ya    2. Tidak c. Taman/tanah berumput                      1. Ya    2. Tidak	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>VI. PEMANFAATAN ENERGI</b>	
7. Bahan bakar memasak yang digunakan : 1. Listrik                      6. Arang 2. Gas Kota/Elpiji                      7. Kayu bakar 3. Biogas                      8. Lainnya 4. Minyak tanah                      9. Tidak memasak → [R9] 5. Briket	Utama <input type="checkbox"/> Cadangan <input type="checkbox"/>
8. Pada saat memasak, seberapa sering menutup panci? 1. Tidak pernah                      3. Sering 2. Kadang-kadang	<input type="checkbox"/>
9. a. Sumber penerangan utama : 1. Listrik PLN 2. Listrik non PLN bersumber energi alternatif 3. Listrik non PLN bukan bersumber energi alternatif 4. Petromak/pelita/sentir/orbor 5. Lainnya	<input type="checkbox"/>
} [R14.a]	
9. b. Jika listrik PLN (R9.a=1), daya listrik terpasang : 1. 450 watt                      4. 2.200 watt 2. 900 watt                      5. > 2.200 watt 3. 1.300 watt                      6. Tanpa meteran	<input type="checkbox"/>
10. a. Jumlah lampu yang terpasang dirumah : <input type="text"/> <input type="text"/> buah b. Jumlah lampu <b>hemat energi</b> yang terpasang di rumah : <input type="text"/> <input type="text"/> buah c. Jumlah lampu yang <b>menyala</b> pada siang hari : <input type="text"/> <input type="text"/> buah d. Jumlah lampu yang <b>tetap menyala</b> pada malam hari ketika tidur : <input type="text"/> <input type="text"/> buah	
11. Berapa jumlah alat elektronik yang dikuasai/digunakan rumah tangga dan bagaimana kebiasaan rumah tangga dalam penggunaannya?	
<b>Alat elektronik yang digunakan</b>	<b>Jumlah</b>
Jika kol (2) ≠ 0, bagaimana kebiasaan rumah tangga dalam penggunaannya? Apakah sering, kadang-kadang, atau tidak pernah membiarkan menyala meski tidak digunakan? <b>1. Sering</b> <b>2. Kadang-kadang</b> <b>3. Tidak pernah</b>	
(1)	(2)
(3)	
a. Televisi	1    2    3
b. AC	1    2    3
c. Kipas angin/Exhaust fan	1    2    3
d. Komputer/Laptop	1    2    3
e. Radio/tape/DVD	1    2    3
f. Pompa air	1    2    3
g. Setrika	
h. Lemari es	
i. Dispenser	
j. Magic com/Rice cooker	
k. Mesin cuci satu tabung	
l. Mesin cuci dua tabung	
12. Jika memiliki AC (R11.b kol. (2) ≠ 0), Apakah menyalakan AC pada suhu di bawah 25°C selama <b>sebulan terakhir</b> : 1. Tidak pernah                      3. Ya, Sering 2. Ya, Kadang-kadang	<input type="checkbox"/>
13. a. Dalam <b>setahun terakhir</b> , apakah rumah tangga mengurangi pemakaian listrik? 1. Ya                      2. Tidak → [R14.a]	<input type="checkbox"/>
b. Alasan <b>utama</b> mengurangi pemakaian listrik : (pilihan jawaban jangan dibacakan) 1. Penghematan biaya 2. Peduli lingkungan 3. Keterbatasan daya/pasokan sumber listrik	<input type="checkbox"/>

VII. PENGELOLAAN SAMPAH		VIII. PEMANFAATAN AIR																																																																																	
14. a. Perlakuan terhadap sampah : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1. Didaur ulang</td><td>1. Ya</td><td>2. Tidak</td></tr> <tr><td>2. Dibuat kompos/pupuk</td><td>1. Ya</td><td>2. Tidak</td></tr> <tr><td>3. Diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA</td><td>1. Ya</td><td>2. Tidak</td></tr> <tr><td>4. Dijual ke pengumpul barang bekas</td><td>1. Ya</td><td>2. Tidak</td></tr> <tr><td>5. Ditimbun/dikubur</td><td>1. Ya</td><td>2. Tidak</td></tr> <tr><td>6. Dibakar</td><td>1. Ya</td><td>2. Tidak</td></tr> <tr><td>7. Dibuang ke laut/sungai/got</td><td>1. Ya</td><td>2. Tidak</td></tr> <tr><td>8. Dibuang sembarangan</td><td>1. Ya</td><td>2. Tidak</td></tr> <tr><td>9. Dijadikan makanan ternak</td><td>1. Ya</td><td>2. Tidak</td></tr> </table>		1. Didaur ulang	1. Ya	2. Tidak	2. Dibuat kompos/pupuk	1. Ya	2. Tidak	3. Diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA	1. Ya	2. Tidak	4. Dijual ke pengumpul barang bekas	1. Ya	2. Tidak	5. Ditimbun/dikubur	1. Ya	2. Tidak	6. Dibakar	1. Ya	2. Tidak	7. Dibuang ke laut/sungai/got	1. Ya	2. Tidak	8. Dibuang sembarangan	1. Ya	2. Tidak	9. Dijadikan makanan ternak	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>																																																						
1. Didaur ulang	1. Ya	2. Tidak																																																																																	
2. Dibuat kompos/pupuk	1. Ya	2. Tidak																																																																																	
3. Diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA	1. Ya	2. Tidak																																																																																	
4. Dijual ke pengumpul barang bekas	1. Ya	2. Tidak																																																																																	
5. Ditimbun/dikubur	1. Ya	2. Tidak																																																																																	
6. Dibakar	1. Ya	2. Tidak																																																																																	
7. Dibuang ke laut/sungai/got	1. Ya	2. Tidak																																																																																	
8. Dibuang sembarangan	1. Ya	2. Tidak																																																																																	
9. Dijadikan makanan ternak	1. Ya	2. Tidak																																																																																	
b. Perlakuan terhadap sampah yang paling utama/sering dilakukan: (Isikan kode 1-9 sesuai dengan R14.a yang berkode 1)		<input type="checkbox"/>																																																																																	
15. a. Apakah melakukan pemilahan sampah mudah membusuk dan tidak mudah membusuk dan bagaimana perlakuan akhirnya? <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1. Dipilah dan sebagian dimanfaatkan</td><td rowspan="3" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td><td rowspan="3" style="vertical-align: middle;"><b>[R16]</b></td></tr> <tr><td>2. Dipilah kemudian dibuang</td></tr> <tr><td>3. Tidak dipilah</td></tr> </table>		1. Dipilah dan sebagian dimanfaatkan	}	<b>[R16]</b>	2. Dipilah kemudian dibuang	3. Tidak dipilah	<input type="checkbox"/>																																																																												
1. Dipilah dan sebagian dimanfaatkan	}	<b>[R16]</b>																																																																																	
2. Dipilah kemudian dibuang																																																																																			
3. Tidak dipilah																																																																																			
b. Jika tidak dipilah (R15.a=3), apa alasan utama tidak melakukan pemilahan sampah? <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1. Malas</td><td>4. Tidak ada peraturan</td></tr> <tr><td>2. Tidak menguntungkan</td><td>5. Tidak mengetahui</td></tr> <tr><td>3. Tidak ada fasilitas</td><td>sampah harus dipilah</td></tr> </table>		1. Malas	4. Tidak ada peraturan	2. Tidak menguntungkan	5. Tidak mengetahui	3. Tidak ada fasilitas	sampah harus dipilah	<input type="checkbox"/>																																																																											
1. Malas	4. Tidak ada peraturan																																																																																		
2. Tidak menguntungkan	5. Tidak mengetahui																																																																																		
3. Tidak ada fasilitas	sampah harus dipilah																																																																																		
16. Bagaimana perlakuan akhir terhadap sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (seperti: bungkus deterjen, kemasan pemutih pakaian, bohlam lampu, baterai, kaleng bekas obat nyamuk, kaleng bekas cat, bungkus pembersih lantai, obat kadaluarsa)? <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1. Didaur ulang/diolah</td></tr> <tr><td>2. Dijual</td></tr> <tr><td>3. Lainnya</td></tr> </table>		1. Didaur ulang/diolah	2. Dijual	3. Lainnya	<input type="checkbox"/>																																																																														
1. Didaur ulang/diolah																																																																																			
2. Dijual																																																																																			
3. Lainnya																																																																																			
17. a. Apa yang sering dilakukan pada barang bekas layak pakai (seperti: baju bekas, sepatu bekas, perkakas, dll)? <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1. Dibuang</td><td>3. Diberikan kepada orang lain</td></tr> <tr><td>2. Dijual</td><td>4. Dimanfaatkan untuk keperluan lain</td></tr> </table>		1. Dibuang	3. Diberikan kepada orang lain	2. Dijual	4. Dimanfaatkan untuk keperluan lain	<input type="checkbox"/>																																																																													
1. Dibuang	3. Diberikan kepada orang lain																																																																																		
2. Dijual	4. Dimanfaatkan untuk keperluan lain																																																																																		
b. Dalam <b>sebulan terakhir</b> , apakah membeli produk yang dapat diisi ulang (seperti : sabun cair, pewangi pakaian, pembersih lantai)? <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1. Tidak pernah</td><td>3. Ya, Sering</td></tr> <tr><td>2. Ya, Kadang-kadang</td><td></td></tr> </table>		1. Tidak pernah	3. Ya, Sering	2. Ya, Kadang-kadang		<input type="checkbox"/>																																																																													
1. Tidak pernah	3. Ya, Sering																																																																																		
2. Ya, Kadang-kadang																																																																																			
c. Dalam <b>setahun terakhir</b> , apakah ketika berbelanja membawa tas belanja sendiri (seperti: tas kanvas, tas kain, tas nilon, dll) untuk mengurangi tas plastik? <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1. Tidak pernah</td><td>3. Ya, Sering</td></tr> <tr><td>2. Ya, Kadang-kadang</td><td></td></tr> </table>		1. Tidak pernah	3. Ya, Sering	2. Ya, Kadang-kadang		<input type="checkbox"/>																																																																													
1. Tidak pernah	3. Ya, Sering																																																																																		
2. Ya, Kadang-kadang																																																																																			
18. Sumber air utama yang digunakan: [Isikan kode jenis sumber air] <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis sumber air</th> <th colspan="5">Penggunaan</th> </tr> <tr> <th>Minum</th> <th>Masak</th> <th>Mandi</th> <th>Cuci baju</th> <th>Cuci kendaraan</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01. Air kemasan/air isi ulang</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02. Leding</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03. Sumur bor/pompa</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04. Sumur terlindung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05. Sumur tidak terlindung</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>06. Mata air terlindung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07. Mata air tidak terlindung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08. Air sungai</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09. Waduk/danau</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10. Air hujan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Jenis sumber air	Penggunaan					Minum	Masak	Mandi	Cuci baju	Cuci kendaraan	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	01. Air kemasan/air isi ulang						02. Leding						03. Sumur bor/pompa						04. Sumur terlindung						05. Sumur tidak terlindung	<input type="checkbox"/>	06. Mata air terlindung						07. Mata air tidak terlindung						08. Air sungai						09. Waduk/danau						10. Air hujan														
Jenis sumber air	Penggunaan																																																																																		
	Minum	Masak	Mandi	Cuci baju	Cuci kendaraan																																																																														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																																																																														
01. Air kemasan/air isi ulang																																																																																			
02. Leding																																																																																			
03. Sumur bor/pompa																																																																																			
04. Sumur terlindung																																																																																			
05. Sumur tidak terlindung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																														
06. Mata air terlindung																																																																																			
07. Mata air tidak terlindung																																																																																			
08. Air sungai																																																																																			
09. Waduk/danau																																																																																			
10. Air hujan																																																																																			
19. Dalam <b>seminggu terakhir</b> , apakah memanfaatkan air bekas (cuciian sayur/buah/beras, wudhu, dll) untuk keperluan lain? <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1. Tidak pernah</td><td>3. Ya, Sering</td></tr> <tr><td>2. Ya, Kadang-kadang</td><td></td></tr> </table>		1. Tidak pernah	3. Ya, Sering	2. Ya, Kadang-kadang		<input type="checkbox"/>																																																																													
1. Tidak pernah	3. Ya, Sering																																																																																		
2. Ya, Kadang-kadang																																																																																			
20. Fasilitas mandi yang digunakan sebagian besar anggota rumah tangga : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1. Shower</td><td>4. Lainnya</td></tr> <tr><td>2. Gayung</td><td>9. Tidak menggunakan fasilitas mandi</td></tr> <tr><td>3. Bathub</td><td></td></tr> </table>		1. Shower	4. Lainnya	2. Gayung	9. Tidak menggunakan fasilitas mandi	3. Bathub		<input type="checkbox"/>																																																																											
1. Shower	4. Lainnya																																																																																		
2. Gayung	9. Tidak menggunakan fasilitas mandi																																																																																		
3. Bathub																																																																																			
21. Bagaimana penggunaan air untuk membilas cucian pakaian? <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1. Menggunakan mesin cuci satu tabung</td></tr> <tr><td>2. Air mengalir</td></tr> <tr><td>3. Air ditampung (≤ 2 kali bilas)</td></tr> <tr><td>4. Air ditampung (&gt; 2 kali bilas)</td></tr> <tr><td>5. Lainnya</td></tr> </table>		1. Menggunakan mesin cuci satu tabung	2. Air mengalir	3. Air ditampung (≤ 2 kali bilas)	4. Air ditampung (> 2 kali bilas)	5. Lainnya	<input type="checkbox"/>																																																																												
1. Menggunakan mesin cuci satu tabung																																																																																			
2. Air mengalir																																																																																			
3. Air ditampung (≤ 2 kali bilas)																																																																																			
4. Air ditampung (> 2 kali bilas)																																																																																			
5. Lainnya																																																																																			
22. Apakah menggunakan instalasi air (seperti: pipa, selang, dll)? <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1. Ya</td><td>2. Tidak → <b>[R26.a]</b></td></tr> </table>		1. Ya	2. Tidak → <b>[R26.a]</b>	<input type="checkbox"/>																																																																															
1. Ya	2. Tidak → <b>[R26.a]</b>																																																																																		
23. Bagaimana penggunaan air untuk mencuci? (Isikan kode 1 jika 'air mengalir' dan kode 2 jika 'air ditampung') <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>a. Alat makan dan minum</td></tr> <tr><td>b. Sayuran/buah</td></tr> </table>		a. Alat makan dan minum	b. Sayuran/buah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																														
a. Alat makan dan minum																																																																																			
b. Sayuran/buah																																																																																			
24. Apakah pernah membiarkan air mengalir tanpa digunakan? <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1. Tidak pernah</td><td>3. Ya, Sering</td></tr> <tr><td>2. Ya, Kadang-kadang</td><td></td></tr> </table>		1. Tidak pernah	3. Ya, Sering	2. Ya, Kadang-kadang		<input type="checkbox"/>																																																																													
1. Tidak pernah	3. Ya, Sering																																																																																		
2. Ya, Kadang-kadang																																																																																			

25. a. Dalam <b>setahun terakhir</b> , apakah rumah tangga mengurangi pemakaian air? 1. Ya                      2. Tidak → <b>[R26.a]</b>	<input type="checkbox"/>	30. b. Jika melakukan pengurangan (R30.a=1), upaya apa yang dilakukan: <b>(pilihan jawaban jangan dibacakan)</b> 1. Menggunakan kendaraan umum bermotor tanpa rute tertentu (ojek, taksi, dll)                      1. Ya    2. Tidak 2. Menggunakan kendaraan umum bermotor dengan rute tertentu (angkot, bus)                      1. Ya    2. Tidak 3. Jalan kaki/menggunakan sepeda                      1. Ya    2. Tidak 4. Menggunakan kendaraan secara bersama ( <i>carpooling</i> )                      1. Ya    2. Tidak 5. Lainnya                      1. Ya    2. Tidak	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
b. Alasan <b>utama</b> mengurangi pemakaian air : <b>(pilihan jawaban jangan dibacakan)</b> 1. Penghematan biaya 2. Peduli lingkungan 3. Pasokan/distribusi air terbatas	<input type="checkbox"/>		
<b>IX. PENGGUNAAN TRANSPORTASI</b>			
26. a. Jumlah sepeda motor yang dikuasai/digunakan ART selama <b>sebulan terakhir</b> ..... unit	<input type="checkbox"/>		
b. <b>Jika menguasai/menggunakan sepeda motor (R26.a ≠ 0)</b> , Penggunaan sepeda motor yang lebih sering dilakukan oleh ART selama <b>sebulan terakhir</b> : 1. Sendiri                      2. Bersama	<input type="checkbox"/>		
27. a. Jumlah mobil yang dikuasai/digunakan ART selama <b>sebulan terakhir</b> ..... unit	<input type="checkbox"/>		
b. <b>Jika menguasai/menggunakan mobil (R27.a ≠ 0)</b> , Penggunaan mobil yang lebih sering dilakukan oleh ART selama <b>sebulan terakhir</b> : 1. Sendiri                      2. Bersama	<input type="checkbox"/>		
28. <b>Jika tidak menguasai/tidak menggunakan kendaraan bermotor (R26.a=0 dan R27.a=0)</b> , Apa alasan utama rumah tangga tidak menguasai/tidak menggunakan kendaraan bermotor? 1. Keterbatasan ekonomi 2. Tidak tersedia infrastruktur jalan kendaraan bermotor 3. Dapat pergi kemanapun tanpa berkendara 4. Akses terhadap kendaraan umum mudah 5. Dapat berdampak buruk pada lingkungan 6. Lainnya	<input type="checkbox"/>	c. Alasan utama mengurangi penggunaan kendaraan bermotor : <b>(pilihan jawaban jangan dibacakan)</b> 1. Penghematan biaya 2. Peduli lingkungan 3. Aktivitas berkurang (pensiun) / Alasan kesehatan 4. Jarak tempuh ke tempat aktivitas semakin dekat/ Semakin mudah mengakses kendaraan umum 5. Menghindari macet 6. Lainnya	<input type="checkbox"/>
<b>X. PEDULI LINGKUNGAN SEKITAR</b>			
		31. a. Dalam <b>tiga bulan terakhir</b> , apakah di sekitar lingkungan rumah diadakan kegiatan kerja bakti? 1. Ya                      2. Tidak → <b>[R32.a]</b>	<input type="checkbox"/>
		b. Apakah ada ART yang ikut dalam kegiatan tersebut? 1. Ada                      2. Tidak	<input type="checkbox"/>
		32. a. Dalam <b>setahun terakhir</b> , apakah rumah tangga merasa terganggu terhadap kondisi/kualitas: 1. Air                      1. Ya    2. Tidak 2. Udara                      1. Ya    2. Tidak 3. Tanah                      1. Ya    2. Tidak	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>JIKA MENGUASAI/MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR [R26.a ≠ 0 atau R27.a ≠ 0]</b>			
29. a. Apakah melakukan perawatan mesin secara rutin selama <b>setahun terakhir</b> ? 1. Ya                      9. Belum waktunya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>	b. Jika mengalami gangguan (R32.a ada yang berkode 1), apakah rumah tangga melakukan upaya untuk menanggulangi gangguan lingkungan tersebut? 1. Ya                      2. Tidak → <b>[R33.a]</b>	<input type="checkbox"/>
b. Apakah melakukan pemeriksaan tekanan ban selama <b>sebulan terakhir</b> ? 1. Ya                      2. Tidak	<input type="checkbox"/>	c. Jika ikut menanggulangi (R32.b=1), upaya apa yang dilakukan rumah tangga terhadap gangguan lingkungan yang terjadi? 1. Apakah melaporkan/mengadukan kepada aparat setempat                      1. Ya    2. Tidak 2. Apakah menegur pelaku gangguan lingkungan                      1. Ya    2. Tidak 3. Apakah ikut menangani gangguan lingkungan                      1. Ya    2. Tidak	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
30. a. Dalam <b>setahun terakhir</b> , apakah rumah tangga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ? 1. Ya                      2. Tidak → <b>[R31.a]</b>	<input type="checkbox"/>		

<b>XI. PENGETAHUAN PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN</b>															
<p>33. Apakah pernyataan-pernyataan ini menurut [NAMA] benar atau salah? (Isikan : 1. Benar 2. Salah atau 9. Tidak tahu)</p>															
<p>a. Membakar sampah mencemari udara</p> <p>b. Sampah plastik, sampah makanan, sampah kertas, dan sampah lainnya tidak perlu dipilah sebelum dibuang</p> <p>c. Sampah yang mengandung bahan kimia (seperti: kaleng bekas obat nyamuk semprot, baterai, bohlam lampu, botol insektisida, dll) sebaiknya dikubur</p> <p>d. Asap kendaraan bermotor menyebabkan semakin memanasnya suhu bumi</p> <p>e. Membiarkan air mengalir tanpa digunakan berpeluang menyebabkan pemborosan air</p> <p>f. Rumah tangga perlu menyediakan area resapan air</p> <p>g. Menghemat listrik berarti menghemat bahan bakar</p> <p>h. Menggunakan kendaraan umum ketika bepergian berarti menghemat bahan bakar</p> <p>i. Melakukan perawatan kendaraan bermotor tidak ada kaitannya dengan menjaga lingkungan</p> <p>j. Sinar matahari dapat dijadikan sumber energi listrik alternatif</p> <p>k. Menutup panci ketika memasak dapat menghemat bahan bakar</p>	<p>a. <input type="checkbox"/></p> <p>b. <input type="checkbox"/></p> <p>c. <input type="checkbox"/></p> <p>d. <input type="checkbox"/></p> <p>e. <input type="checkbox"/></p> <p>f. <input type="checkbox"/></p> <p>g. <input type="checkbox"/></p> <p>h. <input type="checkbox"/></p> <p>i. <input type="checkbox"/></p> <p>j. <input type="checkbox"/></p> <p>k. <input type="checkbox"/></p>														
<p>34. Dari sumber mana saja [NAMA] memperoleh informasi terkait lingkungan hidup? ( <i>Jangan bacakan sumber informasi</i> ) Isikan kode 1 jika "ya", kode 2 jika "tidak"</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Brosur/Leaflet <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">h. Guru/Dosen <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b. Surat kabar <input type="checkbox"/></td> <td>i. Penyuluhan <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>c. Majalah/Tabloid <input type="checkbox"/></td> <td>j. Teman/Tetangga <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>d. Radio <input type="checkbox"/></td> <td>k. Anggota keluarga <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>e. TV <input type="checkbox"/></td> <td>l. Famili lain <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>f. Internet <input type="checkbox"/></td> <td>m. Buku ilmiah <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>g. Aparat desa/kecamatan dan tomas/toga <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>		a. Brosur/Leaflet <input type="checkbox"/>	h. Guru/Dosen <input type="checkbox"/>	b. Surat kabar <input type="checkbox"/>	i. Penyuluhan <input type="checkbox"/>	c. Majalah/Tabloid <input type="checkbox"/>	j. Teman/Tetangga <input type="checkbox"/>	d. Radio <input type="checkbox"/>	k. Anggota keluarga <input type="checkbox"/>	e. TV <input type="checkbox"/>	l. Famili lain <input type="checkbox"/>	f. Internet <input type="checkbox"/>	m. Buku ilmiah <input type="checkbox"/>	g. Aparat desa/kecamatan dan tomas/toga <input type="checkbox"/>	
a. Brosur/Leaflet <input type="checkbox"/>	h. Guru/Dosen <input type="checkbox"/>														
b. Surat kabar <input type="checkbox"/>	i. Penyuluhan <input type="checkbox"/>														
c. Majalah/Tabloid <input type="checkbox"/>	j. Teman/Tetangga <input type="checkbox"/>														
d. Radio <input type="checkbox"/>	k. Anggota keluarga <input type="checkbox"/>														
e. TV <input type="checkbox"/>	l. Famili lain <input type="checkbox"/>														
f. Internet <input type="checkbox"/>	m. Buku ilmiah <input type="checkbox"/>														
g. Aparat desa/kecamatan dan tomas/toga <input type="checkbox"/>															
<p>35. Seberapa peduli rumah tangga Anda terhadap lingkungan hidup?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"> <p>1. Sangat tidak peduli</p> <p>2. Tidak peduli</p> <p>3. Kurang peduli</p> <p>4. Peduli</p> <p>5. Sangat peduli</p> </td> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table>		<p>1. Sangat tidak peduli</p> <p>2. Tidak peduli</p> <p>3. Kurang peduli</p> <p>4. Peduli</p> <p>5. Sangat peduli</p>	<input type="checkbox"/>												
<p>1. Sangat tidak peduli</p> <p>2. Tidak peduli</p> <p>3. Kurang peduli</p> <p>4. Peduli</p> <p>5. Sangat peduli</p>	<input type="checkbox"/>														
<b>XII. GAMBARAN KONDISI EKONOMI</b>															
<p>36. Pendapatan rumah tangga per bulan:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. &lt; 500 ribu rupiah</td> <td style="width: 50%;">4. 2,6 – 5 juta rupiah</td> </tr> <tr> <td>2. 500 ribu – 1 juta rupiah</td> <td>5. 5,1 – 10 juta rupiah</td> </tr> <tr> <td>3. 1,1 – 2,5 juta rupiah</td> <td>6. &gt; 10 juta rupiah</td> </tr> </table>		1. < 500 ribu rupiah	4. 2,6 – 5 juta rupiah	2. 500 ribu – 1 juta rupiah	5. 5,1 – 10 juta rupiah	3. 1,1 – 2,5 juta rupiah	6. > 10 juta rupiah								
1. < 500 ribu rupiah	4. 2,6 – 5 juta rupiah														
2. 500 ribu – 1 juta rupiah	5. 5,1 – 10 juta rupiah														
3. 1,1 – 2,5 juta rupiah	6. > 10 juta rupiah														
<b>XIII. CATATAN</b>															





# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : [bpsHQ@bps.go.id](mailto:bpsHQ@bps.go.id)

ISBN 978-979-064-657-5



9 789790 646575